



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007**

RKPD 2007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2006**

LAMPIRAN

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	I - 1
	1.1 Latar belakang	I - 1
	1.2 Maksud dan Tujuan	I - 10
	1.3 Landasan Hukum	I - 11
	1.4 Proses dan Penyusunan Sistematika RKPD	I - 12
BAB II	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2007	II - 1
	2.1 Kerangka Ekonomi Daerah	II - 1
	2.1.1 Kondisi Ekonomi	II - 1
	2.1.2 Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah	II - 11
	2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	II - 12
	2.1.4 Lingkungan External dan Internal	II - 14
	2.1.5 Target Pertumbuhan Ekonomi	II - 16
	2.1.6 Strategi Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi	II - 18
	2.2 Batas Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Rembang	II - 19
BAB III	Prioritas Pembangunan Daerah	III - 1
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan	IV - 1
BAB V	Ringkasan Pendanaan	V - 1
	5.1 Kebijakan Umum Anggaran	V - 1
	5.2 Pendapatan	V - 2
	5.3 Belanja	V - 4
	5.4 Pembiayaan	V - 8
BAB VI	Penutup	V I - 1
	Lampiran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	

DAFTAR ISI RENJA SKPD

I	Bagian – Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang	Hal
	1 Bagian Organisasi dan Kepegawaian	1
	2 Bagian Infokom	3
	3 Bagian Pemerintahan	4
	4 Bagian Kemasyarakatan	13
	5 Bagian Hukum	20
	6 Bagian Kekayaan Daerah	21
	7 Bagian Perekonomian	25
	8 Bagian Pengendalian Program	29
	9 Bagian Umum	35
	10 Bagian Keuangan	37
II	Badan / Kantor	
	1 Bappeda	1
	2 BKD	8
	3 Bawasda	15
	4 BKB & PM	18
	5 Sekretariat Dewan	26
	6 KKP	28
	7 Kantor capil dan Kependudukan	30
	8 Kantor Parsip dan PDE	31
	9 Kantor Kesbanglinmas	33
	10 RSU	37
	11 Satpol PP	44

III	Dinas – Dinas	
1	Dinas Kesosnakertrans	1
2	Dinas Kesehatan	16
3	Dinas Pendidikan	26
4	Dinas Perindagkop	33
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	36
6	Dinas Pertanian dan Peternakan	47
7	Dinas Pariwisata & Seni Budaya	54
8	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar	63
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	67
10	Dinas Perhubungan	70
11	Dinas Pertambangan, Energi dan LH	75
12	Dinas Pekerjaan Umum	78

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Pemberian kewenangan tersebut agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan. Sebagai konsekuensi pemerintah daerah harus dapat melakukan antisipasi pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam semua bidang pembangunan.

Pada tahapan perencanaan pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu rencana pembangunan tahunan (RKPD Tahunan) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Tahun 2006 – 2010). Sedangkan perencanaan jangka panjang (RPJP Tahun 2006 – 2025) akan disusun pada tahun 2007.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun sebagai implementasi dari dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholders), serta dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Mengingat RKPD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Rembang pada tahun 2007, maka perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007 dengan tujuan mengalokasikan program kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah dan untuk mengantisipasi serta atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kurun waktu satu tahun.

A. Visi dan Misi Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 adalah: “Terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan Kawasan”. Sedangkan misi untuk mencapai visi pembangunan ditetapkan pada tiga aspek utama yaitu:

1. Kemandirian Daerah yang bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal.
2. Peningkatan Kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan.
3. Pengembangan Sinergitas Sistem Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam Pembangunan Kawasan.

Fokus utama (spesifikasi) visi dan misi jangka menengah tersebut adalah Pembangunan Kawasan. Pembangunan Kawasan merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alam (*ecosystem*) yang ada di Kabupaten Rembang. Dengan Visi dan Misi ini diharapkan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Rembang dapat lebih ditingkatkan.

Tujuan Pembangunan Kawasan di Kabupaten Rembang adalah :

1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya,
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan konservasi SDA demi kesinambungan pembangunan daerah;
6. Lebih mempercepat kelangsungan sinergi antar sektor antar wilayah;
7. Mendorong pemanfaatan ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 akan dilaksanakan melalui 2 (dua) agenda, yaitu *pertama*, mewujudkan Rembang yang mandiri melalui pembangunan kawasan, dan *kedua*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai agenda pembangunan pertama ditetapkan dua sasaran pokok pembangunan yaitu meningkatnya kinerja sistem ekonomi dan optimalnya pemanfaatan potensi lingkungan (ekosistem). Sedangkan agenda pembangunan kedua mempunyai dua sasaran yaitu meningkatnya kualitas sumberdaya dan meningkatnya pelayanan sosial.

B. Kondisi Umum Saat Ini

Dalam penyusunan rencana pembangunan perlu ditemukeni kondisi yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Kabupaten Rembang mempunyai posisi strategis sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya, sehingga dalam penyusunan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan kondisi riil. Dari berbagai kondisi yang ada, secara makro peta kondisi riil adalah sebagai berikut :

B.1. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial

Secara Keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai akhir tahun 2005 berjumlah sekitar 591.786 jiwa atau tumbuh sebesar 1.08% atau lebih kecil jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2001 – 2005) sebesar 1,57% atau relatif rendah apabila dibanding dengan pertumbuhan di tingkat nasional yang mencapai 1,92%. Apabila dilihat dari komposisi penduduk, menunjukkan kategori piramida yang sudah berada pada penyempitan penduduk usia muda. Hal ini terlihat pada komposisi kelompok usia 0 – 14 tahun sebesar 157.539 jiwa (26,26%); dan kelompok usia 15 – 64 tahun sebesar 400.708 jiwa (67,71%) serta kelompok usia 65 tahun ke atas sebesar 33.539 jiwa (5,67%). Sementara itu dalam perkembangannya sampai pada tahun 2005 terdapat 160.876 keluarga yang ada di Kabupaten Rembang, dimana sebanyak 99.068 (61,58%) keluarga diantaranya berada pada level atau tingkat Keluarga Pra Sejahtera, sebanyak 16.074 (9,99%) Keluarga Sejahtera I, sebanyak 14.430 (8,96%) KS II, sebanyak 26.119 (16,23%) KS III dan sebanyak 5.186 (3,22%) KS III+.

Meskipun demikian dampak dari kenaikan jumlah penduduk tersebut masih berada pada daerah dalam Kategori Kota Sedang, mengakibatkan adanya masalah tenaga kerja yang merupakan aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kurang seimbangnya lapangan kerja baru dan laju pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Kondisi ini dapat dilihat dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2005 sebesar 52,65 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,13. Walaupun telah mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun masih jauh dari harapan bahwa semua penduduk mendapatkan pekerjaan. Jumlah

pekerja pada sektor primer saat ini baru mencapai sebesar 69.488 orang dan jumlah pekerja pada sektor tersier sebesar 38.157 orang.

Secara umum tingkat keberhasilan suatu periodisasi pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat melalui indikator pendapatan per kapita masyarakat. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun dan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat (berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat). Fenomena ini ditandai dengan indikator *Gini Rasio* Kabupaten Rembang yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2001 angka gini rasio adalah 0,199 maka pada tahun 2005 telah turun menjadi 0,188. Ini berarti bahwa dari tahun ke tahun terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang lebih merata pada 14 kecamatan yang ada sehingga Kabupaten Rembang termasuk dalam kelompok daerah dengan ketimpangan rendah.

Indikasi keberhasilan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada kondisi pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang. Sampai dengan tahun 2005 pembangunan bidang kesehatan terus diupayakan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Rembang. Hal ini terlihat pada terjadinya perbaikan beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat antara lain : *pertama*, pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, dimana terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2005 sebesar 17,8/1000 KH dibanding 18,56 %/1000 KH di tahun 2004. Sementara itu Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 sebesar 147,24/100.000 KH menjadi 91,66/100.000 KH, namun pada tahun 2005 meningkat sebesar 174,01/100.000 KH. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 84,44% dibanding 77,30% pada tahun sebelumnya, juga rata-rata cakupan imunisasi DPT 1

cenderung menurun menjadi sebesar 86% dibandingkan rata – rata periode 2002 – 2005 sebesar 87,4%.

Kedua, Pada kondisi pemberantasan penyakit menular di Kabupaten telah terjadinya penurunan angka penderita Demam Berdarah sebesar 2,97/10.000 penduduk di tahun 2004 menjadi sebesar 2,59/10.000 penduduk pada tahun 2005. Sementara itu angka kematian (CFR) mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 3,5 % pada tahun 2004 menjadi 0% pada tahun 2005. Angka Penderita Diare masyarakat mengalami penurunan dari sebesar 249/10.000 penduduk pada tahun 2005 menjadi sebesar 102/10.000 penduduk pada tahun 2005. Selain itu juga menurunnya CDR dari sebesar 44% di tahun 2004 menjadi sebesar 27% pada tahun 2005. Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, di Kabupaten Rembang tersedia 16 buah Puskesmas, dengan 71 buah Puskesmas Pembantu. Dengan demikian pada saat ini satu Puskesmas untuk melayani sekitar 36.987 penduduk, dan satu Puskesmas Pembantu untuk melayani 8.335 penduduk.

Sedangkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tercermin dari indikator keberhasilan wajib belajar 9 Tahun. Pencapaian indikator bidang pendidikan pada tahun 2005 adalah *pertama*, angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD sebesar 97,48% dan SLTP sebesar 85,69 %. Pada capaian angka yang demikian, berarti masih ada sekitar 2,52% anak usia SD dan 14,31% anak usia SMP yang belum mendapat pelayanan pendidikan. *Kedua*, nilai ujian nasional SD adalah 6,93 dan SLTP sebesar 6,20. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan siswa SD dan SMP. *Ketiga*, angka transisi SD ke SLTP 86,87%, yang berarti masih ada sekitar 13,13% lulusan SD tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dengan alasan ketidakmampuan pembiayaan pendidikan sekolah sehingga diharuskan bekerja membantu orang tuanya.

B.2. Perekonomian Wilayah

Indikator pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB, meski mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun menunjukkan kecenderungan yang positif. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai nilai (-) 10,38 % pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi, berangsur-angsur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mampu diupayakan bangkit bahkan mencapai nilai 4,98 % pada tahun 2000. Namun rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2001-2005 sebesar 3,75%

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Rembang dalam tahun 2005 ini masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 44,74%, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 19,04% dan sektor jasa - jasa sebesar 12,21% Kemudian berturut turut adalah sektor angkutan dan komunikasi 7,41%, sektor industri pengolahan sebesar 5,58%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,13%, sektor bangunan sebesar 3,27%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,95%, serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,68%. Dari analisis kontribusi sektoral ini, terlihat adanya indikasi surplus produksi pada sektor Pertanian, Perdagangan Hotel Restoran, dan Jasa-jasa; sehingga sektor-sektor tersebut layak untuk disebut sebagai sektor basis ekonomi Kabupaten Rembang.

Indikator perekonomian wilayah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan PAD selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, artinya selama kurun waktu itu terjadi peningkatan kemampuan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yakni pada tahun 2003 sebesar 6,61% menjadi 6,39% dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,89%. Namun demikian dari besaran persentase tersebut menunjukkan betapa masih jauh

dari kemandirian. Kecenderungan kebutuhan belanja daerah menunjukkan angka yang semakin besar sementara peningkatan PAD tidak sejalan dengan kebutuhan sehingga *gap* fiskal yang muncul semakin besar. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui cara - cara konvensional serta berupaya memperoleh sumber-sumber pembiayaan, baik dari DAU, DAK maupun sumber-sumber lain yang sah guna membiayai kebutuhan daerah.

Disisi lain, fluktuasi nilai inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang, terlihat cukup signifikan. Hal ini terlihat seperti setelah terjadinya kenaikan laju inflasi barang dan jasa dari tahun 2000 yang menunjukkan nilai 7,48% menjadi 11,42% di tahun 2001. Nilai laju inflasi pada tahun 2002 menjadi 9,79% dan pada tahun 2003 laju inflasi barang dan jasa di Kabupaten Rembang kembali menurun menjadi 5,27%. Kondisi ini mampu bertahan hingga tahun 2004 sebesar 5,52 %. Namun pada akhir tahun 2005 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sebesar 13,14 % sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

B.3. Prasarana Wilayah

Perkembangan daerah yang sangat pesat, membutuhkan berbagai sarana dan prasarana wilayah agar dapat mengakomodir kebutuhan prasarana kota yang tersedia agar aktivitas perkotaan dapat berjalan dengan lancar mengikuti dinamika masyarakat yang senantiasa tumbuh secara dinamis. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2005 telah terjangkau layanan angkutan umum. Namun kondisi terminal Rembang dan beberapa terminal pendukung lain di

Kabupaten iRembang saat ini kurang memadai kualitasnya, sehingga pelayanan angkutan umum menjadi kurang optimal. Selain itu prasarana jalan merupakan prasarana pengangkutan yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan, peningkatan jalan akan semakin mempermudah akses dan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di Kabupaten Rembang mencapai 559,79 Km, dimana 86,24% sudah beraspal sedangkan kondisinya : jika pada tahun 2005 sebesar 35,39% dalam keadaan baik, 23,08 % dalam keadaan sedang dan sisanya dalam kondisi rusak maka pada tahun 2006 diperkirakan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan pada tahun 2006 telah dilakukan peningkatan jalan dan jembatan sebagai upaya dalam penyediaan infrastruktur dasar pelayanan publik di seluruh Kabupaten Rembang yang menyerap investasi yang cukup besar yaitu sebesar \pm 112M. Namun demikian pada elemen prasarana kabupaten lainnya seperti kondisi sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman serta air bersih dan irigasi masih belum memadai. Sedangkan pada kawasan perkotaan; masih terdapat permasalahan yakni belum tertatanya wajah kota Rembang yang mencitrakan image *waterfront city*, yang diharapkan mampu mengoptimalkan kota sebagai pusat perekonomian wilayah dan kota. Sementara itu pada kawasan perdesaan, masih belum tergarapnya pengembangan desa pusat pertumbuhan (DPP) dan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) yang diharapkan mampu menjadi *triger* bagi pengembangan desa-desa hinterlandnya sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya wilayah perdesaan. Selain itu juga kondisi lingkungan pasar tradisional cenderung semakin menurun.

C. Issue Utama Pembangunan Kabupaten Rembang

Memasuki tahun 2007 pembangunan dalam lingkup wilayah Kabupaten Rembang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yaitu :

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin atau Keluarga Pra Sejahtera.
- 2) Terbatasnya lapangan kerja bagi penduduk.
- 3) Kondisi dan struktur perekonomian daerah yang belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara optimal.
- 4) Belum optimalnya kondisi infrastruktur wilayah dalam berbagai bidang guna mendukung perekonomian wilayah.
- 5) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- 6) Masih kurangnya akses memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 7) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

I.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2007 dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing, yang selanjutnya dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Rembang serta program kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain yang sah baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah

Pusat. Dokumen ini juga sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan dan sinergi pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien dan mempertajam prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan agar dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

I.3. Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007 disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri No.

1181/M.PPN/02/2005 dan 050/244/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2006.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah.

I.4. Proses dan Penyusunan Sistematika RKPD

A. Proses Penyusunan RKPD

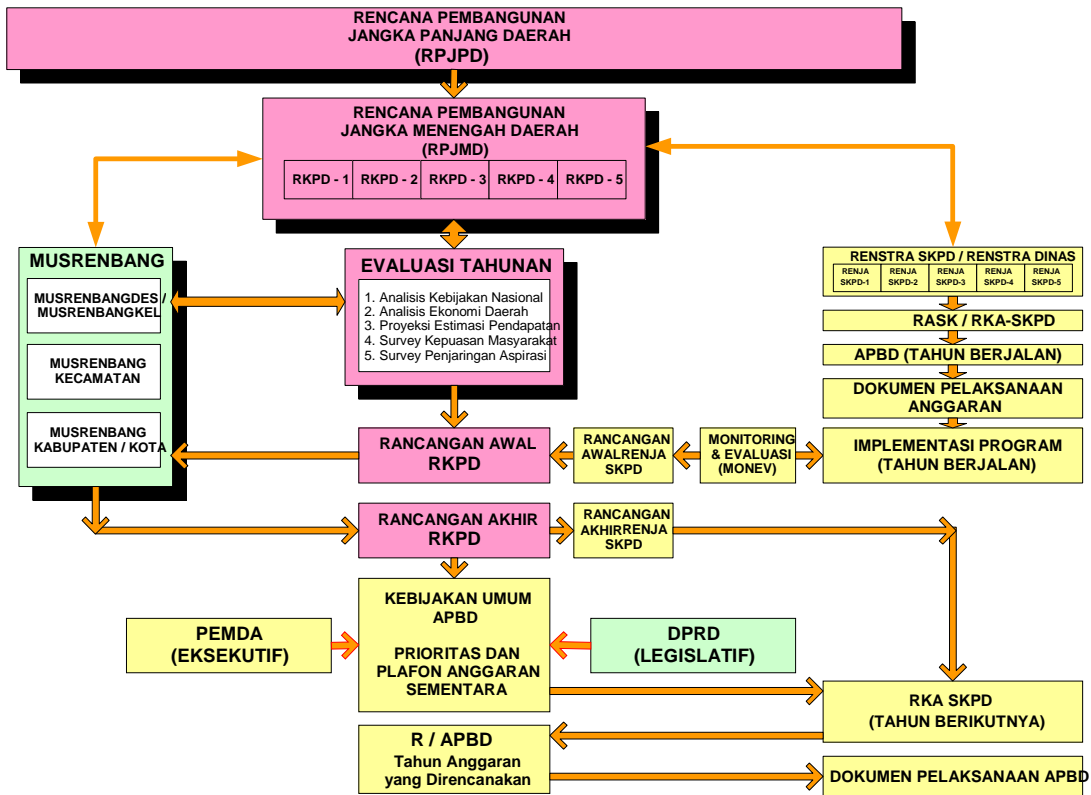
Penyusunan RKPD sebagaimana yang tertera dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan melalui mekanisme/prosedur yang tergambar dalam bagan alir seperti dalam gambar I.1.

Lebih lanjut dalam SE Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ dijelaskan tentang pelaksanaan Musrenbang tahun 2006 untuk penyusunan RKPD tahun 2007 yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2007.
- 2) Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui penyelenggaraan Musrenbang di Daerah.

Gambar I.1

Bagan Alir Mekanisme Perencanaan & Penganggaran Pembangunan



Syahroni & Charles P. Poluan Jr. (GTZ SIFDM)
 Planning and Budgeting Flowchart File (October 2004)

- 3) Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPDP yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 4) Pelaksanaan Musrenbang tahun 2006 dalam rangka penyusunan rancangan RKPDP tahun 2007 diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten / Kota.
 - b. Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret 2006.

Mengingat kondisi transisi perubahan kepemimpinan daerah, dan dengan ditetapkannya RPJM Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010 pada awal tahun 2006 sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang maka Musrenbang Kabupaten Rembang direncanakan pada pertengahan bulan Mei 2006.

- 5) Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBD sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.

B. Sistematika RKPD

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri No. 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ maka Sistematika Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari :

- I.1. Latar Belakang (Visi dan Misi Daerah, Kondisi Umum Terkini serta Issu Mendesak)
- I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
- I.3. Landasan Hukum Penyusunan RKPD
- I.4. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD

BAB II : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Bab III : Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Ringkasan Pendanaan

BAB VI : Penutup

BAB II

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2007

2.1 Kerangka Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah, dalam menciptakan nilai-nilai sumberdaya yang ada untuk kepentingan publik. Melalui perencanaan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai *economic entity*.

Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi suatu daerah dalam menggali Pendapatan Daerah. Ditambah dengan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Penerimaan Lain-lain yang Sah, setiap tahunnya dapat diakumulasikan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai tugas-tugas pelayanan Pemerintah Daerah dan program-program pembangunan yang direncanakan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2001 sampai dengan 2005, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan pasang surut pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh menguatnya ekonomi pada tahun 2002, kemudian tahun 2003 mengalami penurunan dan kembali menguat di tahun 2004. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut, masih berada dalam kategori "*growth and development*" yang ditandai dengan angka laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel II.1
Perbandingan beberapa Variabel Ekonomi
Kabupaten Rembang dengan Kabupaten-Kabupaten di sekitarnya
Tahun 2000 – 2004

Tahun	Variabel Makro	Kabupaten Rembang dan Kabupaten di sekitarnya				
		Rembang	Jejara	Kudus	Pati	Blora
	PDRB (harga konstan 2000)					
2000	Jutaan Rupiah	1.355.597,85	2.788.494,20	7.561.441,64	2.935.497,05	1.575.040,84
2001	Jutaan Rupiah	1.398.058,75	2.877.653,63	7.854.876,91	3.051.143,43	1.620.474,91
2002	Jutaan Rupiah	1.479.081,95	2.990.539,39	8.048.850,61	3.136.064,75	1.666.986,55
2003	Jutaan Rupiah	1.525.177,35	3.105.547,29	8.184.393,50	3.202.772,29	1.745.258,55
2004	Jutaan Rupiah	1.584.428,68	3.222.872,00	8.449.294,34	3.334.916,06	1.822.178,03
	PDRB (harga berlaku)					
2000	Jutaan Rupiah	1.355.597,85	2.788.494,20	7.561.441,64	2.935.497,05	1.575.040,84
2001	Jutaan Rupiah	1.472.717,30	3.230.272,33	8.535.117,28	3.364.593,60	1.774.708,94
2002	Jutaan Rupiah	1.801.431,83	3.640.576,68	9.710.565,38	3.702.741,14	2.008.778,61
2003	Jutaan Rupiah	1.950.799,03	3.997.536,36	10.568.084,00	3.999.910,32	2.231.824,40
2004	Jutaan Rupiah	2.130.734,80	4.347.150,43	11.558.546,59	4.401.098,33	2.505.361,16
	LPE (harga konstan 2000)					
2000	Dalam persen	-	-	-	-	-
2001	Dalam persen	3,13	3,20	3,88	3,94	2,88
2002	Dalam persen	5,80	3,92	2,47	2,78	2,87
2003	Dalam persen	3,12	3,85	1,68	2,13	4,70
2004	Dalam persen	3,88	3,78	3,24	4,13	4,41
	LPE (harga berlaku)					
2000	Dalam persen	-	-	-	-	-
2001	Dalam persen	8,64	15,84	12,88	14,62	12,68
2002	Dalam persen	22,32	12,70	13,77	10,05	13,19
2003	Dalam persen	8,29	9,81	8,83	8,03	11,10
2004	Dalam persen	9,22	8,75	9,37	10,03	12,26
	Kontribusi pembentukan PDRB Jawa Tengah (ADHK 2000)					
2000	Dalam persen	1,34	2,76	7,47	2,90	1,56
2001	Dalam persen	1,34	2,75	7,52	2,92	1,55
2002	Dalam persen	1,36	2,74	7,39	2,88	1,53
2003	Dalam persen	1,35	2,74	7,23	2,83	1,54
2004	Dalam persen	1,40	2,85	7,46	2,95	1,61
	Kontribusi pembentukan PDRB Jawa Tengah (harga berlaku)					
2000	Dalam persen	1,34	2,76	7,47	2,90	1,56
2001	Dalam persen	1,27	2,79	7,37	2,91	1,53
2002	Dalam persen	1,37	2,76	7,37	2,81	1,52
2003	Dalam persen	1,34	2,75	7,27	2,75	1,54
2004	Dalam persen	1,47	2,99	7,96	3,03	1,72
	Pendapatan perkapita (ADHK 2000)					
2000	Dalam Rupiah	2.434.653,18	2.877.812,88	10.744.942,44	2.517.587,58	1.909.855,74
2001	Dalam Rupiah	2.484.046,71	2.922.149,20	11.048.967,75	2.593.014,76	1.958.893,32
2002	Dalam Rupiah	2.597.715,31	2.983.435,83	11.230.996,13	2.645.378,34	2.005.103,07
2003	Dalam Rupiah	2.642.038,25	3.001.111,61	11.333.464,34	2.677.016,88	2.090.705,88
2004	Dalam Rupiah	2.722.212,99	3.059.727,34	11.614.054,51	2.745.754,11	2.176.163,70
	Pendapatan perkapita (harga berlaku)					
2000	Dalam Rupiah	2.434.653,18	2.877.812,88	10.744.942,44	2.517.587,58	1.909.855,74
2001	Dalam Rupiah	2.616.698,73	3.280.220,24	12.005.819,65	2.859.400,45	2.145.337,44
2002	Dalam Rupiah	3.163.859,20	3.631.929,06	13.549.676,53	3.123.389,81	2.416.221,15
2003	Dalam Rupiah	3.379.335,31	3.863.104,20	14.634.316,70	3.343.299,64	2.673.580,03
2004	Dalam Rupiah	3.660.823,63	4.127.093,79	15.887.905,52	3.623.579,60	2.992.065,49

Sumber : PDRB Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Tengah, Tahun 2005.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Rembang pada tahun 2001 tumbuh dengan 3,13%, tahun 2002 tumbuh dengan 5,80%, tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 3,12%, tahun 2004 naik lagi menjadi 3,88% dan pada tahun 2005 bertahan pada kisaran angka 4,00%. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Rembang tahun 2001 tumbuh dengan 8,64%, 2002 tumbuh dengan 22,32% dan untuk tahun-tahun sesudahnya mengalami penurunan, yakni menjadi 8,29% pada tahun 2003, 9,22% pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 diestimasikan masih berada di atas angka 10,00%.

Produk Domestik Regional Bruto sebagai cerminan kondisi perekonomian Kabupaten Rembang, berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 2.131 triliun. Berdasarkan besaran PDRB tersebut, besarnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 3.660.823,- dan berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.2.712.213,-. Dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten disekitarnya, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Rembang lebih tinggi di bandingkan dengan Kabupaten Blora, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara.

Dari kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi, tampak bahwa sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar (44,74%). Dari sektor ini, sub sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan memberi sumbangan terbesar (70,88%) dan sub sektor Perikanan berada pada urutan kedua (13,86%). Sektor lain yang memberi kontribusi cukup berarti bagi pembentukan PDRB Kabupaten Rembang, adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (19,04%), dengan sumbangan terbesar diberikan oleh sub sektor Perdagangan (81,79%). Sektor Jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang, hanya memberikan kontribusi sebesar (12,21%) dengan sumbangan terbesar diberikan oleh sub sektor Pemerintahan Umum (81,24%). Sektor kegiatan ekonomi Kabupaten

Rembang yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB tahun 2005, adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang kontribusinya hanya (0,68%).

Dari besaran nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 dibandingkan dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, kiranya dapat memberikan gambaran tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang. Selama 5 tahun terakhir ini, laju inflasi cukup tinggi terjadi pada tahun 2001 yang mencapai angka (11,42%). Pada tahun-tahun berikutnya menurun menjadi (9,79%) di tahun 2002, menjadi (5,27%) pada tahun 2003 dan (5,25%) pada tahun 2004, kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi kembali pada tahun 2005 sebesar (13,14%), hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada Bulan Oktober 2005 yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian secara makro. Angka inflasi ini kiranya tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, yang masih berada pada angka satu digit. Dengan besaran angka tersebut, sifat inflasi di Kabupaten Rembang dapat dikategorikan sebagai inflasi merangkak (*creeping inflation*), di mana dengan sifat inflasi yang demikian ini dapat lebih mendorong perekonomian daerah.

Dengan kondisi perekonomian seperti dijelaskan di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang tahun 2005 mencapai Rp 23.911 milyar, di mana besaran ini mengalami kenaikan sebesar (27,75%) dibandingkan dengan tahun 2004. Berdasarkan sumbernya, sumbangan terbesar PAD diberikan oleh Retribusi Daerah (56,69%) dari total PAD, dan penerimaan dari Pajak Daerah hanya memberi sumbangan sebesar (20,42%).

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2005 hanya sebesar (8,14%).

Perubahan sistem keuangan daerah dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melalui dana Perimbangan ini, total Penerimaan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005 tercatat sebesar Rp. 302.951 milyar. Total Penerimaan Daerah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp. 23.911 milyar, dana Perimbangan sebesar Rp.258.824 milyar, dengan rincian DAU sebesar Rp. 215.234 milyar, DAK sebesar Rp.11.280 milyar, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp.16.591 milyar, dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 15.719 milyar.

Memperhatikan pada sumber-sumber Penerimaan Daerah tersebut, angka ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Rembang pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Atasan kiranya masih cukup tinggi, yakni sebesar 85,43 %.

Apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tingkat regional, yakni Kabupaten-Kabupaten sekitar dan Jawa Tengah, tampak bahwa :

1. *Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan 2000.*

§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

2. *Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku.*

§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

3. *Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga konstan 2000.*

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blora.

- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara dan Blora tetapi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pati dan Kudus.
- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Blora tetapi lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Jepara dan Kudus.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga berlaku

- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kudus, Blora, Pati dan Kabupaten Jepara.
- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Kabupaten Pati tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blora.
- § Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, dan Kabupaten Blora tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jepara.

5. Kontribusi pembentukan PDRB Jawa Tengah.

- § Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga konstan tahun 2000 adalah yang terendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Blora.

§ Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga berlaku, juga yang terendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi perekonomian Kabupaten Rembang sebenarnya tidaklah terlalu tertinggal apabila dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil setelah mengalami krisis dan bahkan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi (hanya di bawah Kabupaten Kudus) dan mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah prestasi yang perlu disikapi dengan berupaya semaksimal mungkin menambah/memperbesar nilai tambah bruto riilnya (nilai rupiah atas dasar harga berlaku). Fenomena permasalahan kondisi perekonomian tersebut telah dicoba untuk dilakukan upaya-upaya lewat pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 2000, yang menghasilkan beberapa perkembangan sebagai berikut:

- a) laju pertumbuhan ekonomi yang mendekati dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
- b) kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga berlaku yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana kontribusinya sebesar 1,34% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 1,47% pada tahun 2004.

Tabel II. 2.
Kondisi Kependudukan dan Perekonomian
Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2007

NO	URAIAN	2004	2005	2006	2007
1	Jumlah Penduduk	585.446	590.119	594.829	599.577
2	Jumlah Penduduk di atas 10 tahun	483.241	487.319	491.431	495.578
3	Angkatan Kerja	331.959	342.78	353.953	375.491
4	Pekerja	294.955	299.991	306.059	311.159
5	% pekerja Terhadap Penduduk diatas 10 Th	61.04	61.56	62.28	62.79
6	Pencari Kerja	37.004	40.789	38.394	37.931
7	Pengangguran	55.786	55.299	52.412	50.526
8	TPAK (%)	68.69	70.34	72.03	75.77
9	TP Terbuka (%)	11.15	11.90	10.85	10.10
10	Tingkat Pengangguran (%)	16.81	16.13	14.81	13.46
11	Penduduk Miskin	0	246.443	225.074	205.559
12	% Penduduk Miskin	0	41.76	37.84	34.28
13	% Pertumbuhan Ekonomi	3.88	3.56	4.00	4.5
14	% Laju Inflasi	5.53	15.36	8.00	8.0

Sumber : BPS Kab. Rembang, 2006

Arah Umum Kebijakan Ekonomi Kabupaten Rembang 2006 – 2010

Berdasarkan gambaran berbagai kondisi ekonomi kabupaten Rembang di atas, arah kebijakan umum pembangunan ekonomi kabupaten Rembang tahun 2006-2010 mendasar pada:

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan yang meningkat dari tahun ketahun dan berlangsung secara berkelanjutan dan mandiri (sustain).

2. Peningkatan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja dari tahun ketahun. Peningkatan lapangan kerja, kesempatan untuk bekerja dan pengurangan tingkat pengangguran ini merupakan startegi dasar untuk mengurangi masalah kemiskinan
3. Peningkatan pembangunan yang berbasis pada pengembangan Kawasan dan partisipasi masyarakat (community and rural / urban based development).

Asumsi (Komitmen Pemda):	2006	2007	2008	2009	2010
ICOR	3.96	3.96	3.80	3.70	3.60
EKK	0.30	0.40	0.50	0.70	0.80
Efisiensi	Tetap	Tetap	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Intensitas	Smkn pdt karya	Smkn pdt karya	Smkn pdt karya	Smkn pdt karya	Smkn pdt karya
Keterangan		Pemb Kwsn pedesaan	Pemb Kwsn pedesaan	Pemb Kwsn pedesaan	Pemb Kwsn pedesaan

Rencana Capaian Pembangunan Kabupaten Rembang, 2006-2010

Arah dasar pembangunan kabupaten Rembang, 2006-2010 tersebut sekaligus merupakan komitmen pemerintah daerah dan stakeholder kabupaten Rembang. Arah dasar tersebut juga merupakan bentuk pewujudan visi pemerintah daerah dan sekaligus merupakan bentuk nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan milinium (Millenium Development Golas) yang juga sudah menjadi komitmen pemerinah pusat maupun lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tahun 2006 – 2010, pertumbuhan ekonomi kabupaten Rembang direncanakan meningkat dari tahun ketahun dengan rata-rata sebesar 4,19 persen pertahun. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan masalah pengangguran, keterbatasan lapangan kerja dan meningkatnya angkatan kerja dari tahun ketahun secara berangsur-angsur mulai teratasi.

Pemerintah kabupaten Rembang telah berhasil menekan pertumbuhan penduduk pada tingkat yang relatif rendah yakni rata-rata 0,99 persen pertahun. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang masuk pada usia kerja, akan cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 2006-2010, angkatan kerja diperkirakan akan meningkat dengan rata-rata 2,10 persen pertahun, sedangkan tenaga kerja diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 1,64 persen pertahun. Dengan situasi perkembangan ketenagakerjaan tersebut, sangat potensial masalah pengangguran masih menjadi masalah yang sangat berat pada periode 2006-2010. Tingkat pengangguran diperkirakan akan menurun dari waktu ke waktu, dari rata-rata 5,05 persen menjadi rata-rata 4,94 persen, sehingga pada tahun 2010 tingkat pengangguran tersebut akan sebesar 4,45 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, pertumbuhan kesempatan kerja ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 2,23 persen pertahun.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampu menjamin tercapainya berbagai sasaran tersebut, harus ditumbuhkan investasi yang berkelanjutan. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, investasi rata-rata pertahun harus sebesar 15,96 persen dari PDRB Kabupaten Rembang. Peningkatan investasi ini, ditempuh secara sinergis dengan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan efektifitas dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang didasarkan pada upaya mencapai berbagai sasaran tersebut.

Pada periode 2006-2010, sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mempunyai sumbangan paling besar, baik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan masih menjadi sektor kedua yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB dan kesempatan kerja.

Pengembangan sektor pertanian dan dan perdagangan ini merupakan kebijakan yang strategis, karena kedua sektor tersebut merupakan sektor yang banyak diusahakan oleh para pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

2.1.2 Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terakumulasi dari 3 (tiga) sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan pada Tabel II.3, besarnya Penerimaan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2002 sebesar Rp. 227.289 milyar, pada tahun 2003 sebesar Rp. 276.284 milyar, tahun 2004 sebesar Rp. 292.276 milyar dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 302.952 milyar. Dari besaran Penerimaan Daerah tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, pertumbuhan eksponensialnya mencapai 10,34%/tahun.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rembang, yang sumbernya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Lain-lain PAD, jumlahnya mencapai Rp. 14.427 milyar pada tahun 2002 dan meningkat menjadi Rp. 23.911 milyar pada tahun 2005, sehingga selama jangka waktu tersebut pertumbuhannya mencapai 18,96%/tahun. Dana Perimbangan, yang sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, jumlahnya pada tahun 2002 mencapai Rp. 188.155 milyar, tahun 2003 meningkat menjadi

Rp. 229.023 milyar, tahun 2004 sebesar Rp. 236.050 milyar dan pada tahun 2005 jumlahnya sebesar 258.824 milyar. Dari besaran tersebut, Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tumbuh sebesar 9,82%/tahun. Lain-lain Pendapatan yang Sah, jumlahnya memang cenderung naik, di mana pada tahun 2003 sebesar Rp. 13.956 milyar, tahun 2004 sebesar Rp. 14.044 milyar dan pada tahun 2005 jumlahnya naik menjadi Rp. 15.719 milyar.

Kontribusi masing-masing sumber Penerimaan Daerah di Kabupaten Rembang

dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, masih banyak didominasi oleh Dana Perimbangan (lihat Tabel II.3), yang pada tahun 2002 mencapai 93,01%, tahun 2003 menurun menjadi 87,34%, tahun 2004 sebesar 86,98% dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi sebesar 88,95%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, masih relatif kecil yang persentasenya berada pada kisaran angka 7,00% selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.

Struktur Belanja Daerah di Kabupaten Rembang dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Aparatur Daerah yang mengucur sebagai belanja rutin dan belanja Pelayanan Publik yang mengucur sebagai belanja pembangunan. Besarnya Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk 4 (empat) tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan, yang pertumbuhannya mencapai 0,75%/tahun. Besaran Belanja Daerah Kabupaten Rembang tersebut, adalah Rp. 232.333 milyar pada tahun 2002, Rp, 271.111 milyar pada tahun 2003, Rp. 287.723 milyar pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp. 293.625 milyar.

2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang kebijakannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, namun Keputusan Menteri untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut belum tersedia, sehingga Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 masih bisa digunakan.

Dari substansi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang dapat digunakan sebagai dasar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang, adalah tujuan utama penganggaran itu sendiri yang meliputi (1) stabilitas fiskal, (2) alokasi sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan persepektif jangka menengah, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dalam kondisi di mana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "*trade-off*" antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

Dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, disebutkan bahwa pendapatan dan pembelanjaan dalam APBD merupakan satu kesatuan, yang di dalamnya terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, yang masing-masing dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Daerah, menurut kelompoknya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Yang Sah.
- 2) Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik.
- 3) Pembiayaan, yang menurut sumber pembiayaannya merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- 4) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- 5) Surplus anggaran, dapat dimanfaatkan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal dan/atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.
- 6) Defisit anggaran, dapat dibiayai dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan dan Transfer dari Dana Cadangan.

2.1.4 Lingkungan Eksternal dan Internal

Sebagai suatu sistem, kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi eksternal dan kondisi internal. Yang dimaksud dengan kondisi eksternal, adalah suatu kondisi regional dan nasional yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Rembang. Sedangkan kondisi internal adalah kondisi yang ada di Kabupaten Rembang sendiri, baik karena kebijakan umum maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Rembang.

Kondisi lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan dalam mengestimasi keberhasilan dalam penyediaan dana pembangunan hingga tahun 2010, diantaranya adalah (1) kenaikan harga bahan bakar minyak yang masih akan terus berlanjut mengikuti harga pasar internasional, (2) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (3) kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, (4) kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Berbasis Komunitas menetapkan bahwa kebijakan dan program pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, kewenangan desa, investasi pembangunan, keserasian lingkungan hidup dan konservasi SDA dan kepentingan umum, yang kesemuanya akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Rembang. Kondisi lingkungan eksternal yang disebut pertama, memang cukup dirasakan oleh para nelayan dan industri kecil yang banyak memanfaatkan bahan bakar solar di Kabupaten Rembang, yang dampaknya akan memperbesar biaya operasi dan mengurangi hasil tangkapan ikan serta produktivitas industri kecil.

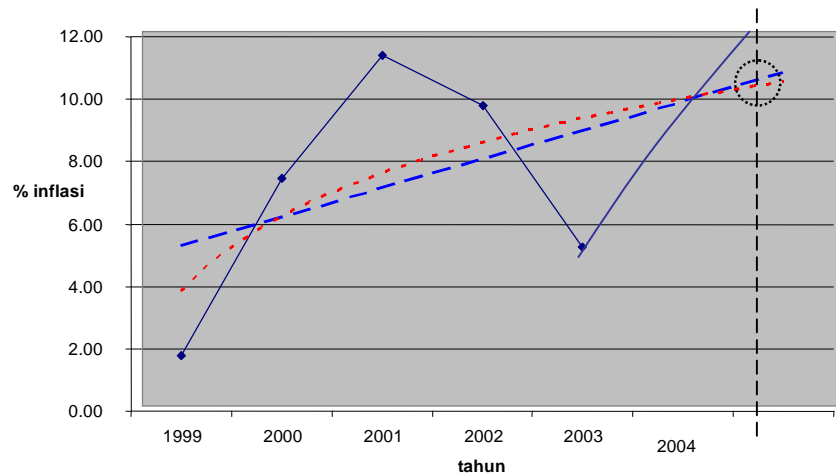
Kondisi lingkungan internal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya program 4 (empat) pilar Kabupaten Rembang, yaitu: Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik, Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas, Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Program Pengembangan Ekonomi Rembang (*Holding Company*), kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta perubahan kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada Pengembangan Kawasan, kiranya dapat dikembangkan menjadi modal dasar dan akan menumbuhkan iklim sejuk dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Di samping itu, beberapa event seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di tahun 2009, Pemilihan

Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2008 dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rembang di tahun 2010, pembiayaannya akan mempengaruhi ketersediaan dana untuk membiayai Belanja Pelayanan Publik pada tahun-tahun yang bersangkutan.

2.1.5 Target Pertumbuhan Ekonomi

Untuk merencanakan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, kita tetap harus memperhatikan pertimbangan terhadap trend nilai inflasi dan trend pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya.

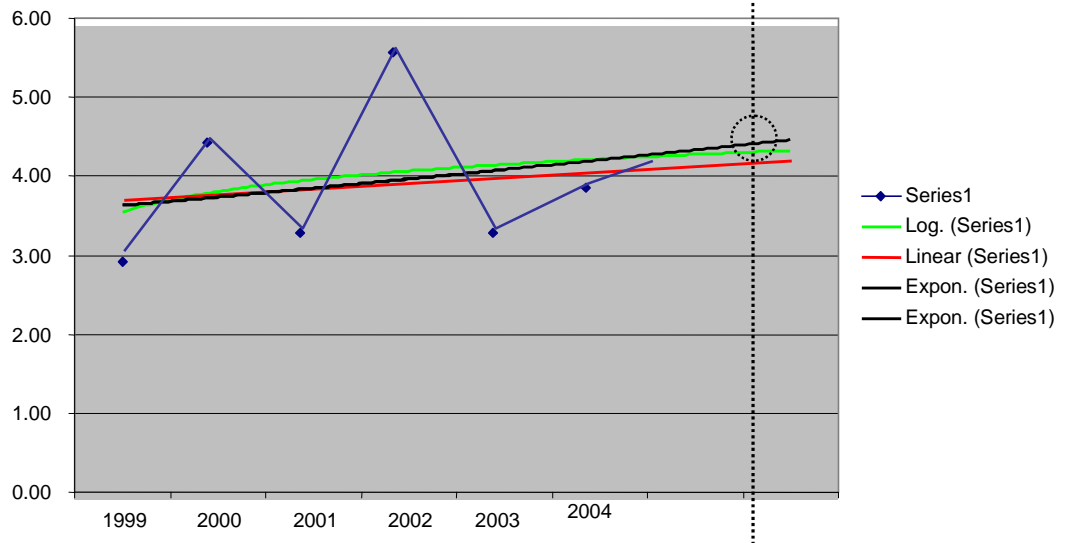
Grafik 2.1. Trend Nilai Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 1999 – 2005



Berdasar trend nilai inflasi ini maka dapat terlihat bahwa kecenderungan nilai inflasi untuk tahun perencanaan (2006) cenderung akan mengalami kenaikan seperti terlihat dari kecenderungan lengkungan kurva dan tarikan kemiringan garis lurus pada grafik di atas. Kecenderungan naiknya nilai inflasi untuk tahun anggaran berikutnya ini juga didorong dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal Oktober 2005.

Grafik 2.2.

Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 1999-2005 dan Analisis Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi tahun berikutnya



Berdasar grafik trend nilai pertumbuhan ekonomi diatas dan kaitannya dengan kecenderungan nilai inflasi serta permasalahan ekonomi yang menyertainya, maka untuk tahun anggaran 2007 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dalam skenario mederat adalah 4,5 %. Target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Rembang dengan memberikan kesempatan kerja sebesar 389.279 orang selama tahun 2007, dengan rincian masing-masing untuk sektor basis adalah sektor pertanian sebesar 195.908 orang, sektor jasa-jasa sebesar 38.998 orang dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 34.640 orang. Target moderat ini didasari dengan pertimbangan stabilitas ekonomi makro Kabupaten Rembang dapat terjaga, investasi diperkirakan akan terus meningkat, pembangunan infrastruktur berjalan mantap dengan adanya program empat pilar, sektor-sektor di luar pertanian terus meningkat, dan Program Revitalisasi Pertanian mulai menunjukkan hasil. Kondisi tersebut akan tercapai dengan asumsi nilai rata-rata inflasi tahun 2006, relatif masih terkendali serta tidak terlampaui jauh melebihi dari nilai grafis perkiraan (10 %). Untuk itu perlu strategi pengembangan sektor-sektor ekonomi, meskipun terjadi kenaikan nilai inflasi namun tetap mampu diimbangi dengan meningkatnya nilai tambah sektor-sektor penunjang dari berkurangnya laju pertumbuhan sektor terkena dampak.

2.1.6. Strategi Pengembangan sektor-sektor Ekonomi

Untuk mencapai target pertumbuhan 4,5 % pada tahun anggaran 2007, diperlukan strategi terutama dalam memanfaatkan potensi sektor-sektor yang berkembang di Kabupaten Rembang. Dalam analisis korelasi potensi, potret ekonomi Kabupaten Rembang jelas terlihat bahwa landasan utama dalam memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ini adalah dari Sektor Pertanian. Kreasi terhadap sinergi penunjang sektor inilah yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian nilai percepatan pertumbuhan ekonominya.

Bercermin dari pengembangan kawasan yang telah berjalan, maka pengembangan sektor ekonomi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rembang adalah sebanyak mungkin mensinergikan pengembangan suatu sektor dengan sektor yang lain, dengan melihat peluang antar wilayah dalam output pemasarannya (*expor*).

Prioritas pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Rembang lebih diarahkan pada pengembangan *leading sector* yang ingin disinergikan dengan sektor yang mempunyai sifat/nilai multiplier efek paling banyak, yakni sektor Industri berbasis pertanian. Kaitan dua sektor inilah yang kemudian akan direalisasikan dalam bentuk program pengembangan Ekonomi Rembang melalui program *Holding Company*. Dalam kaitannya dengan industri Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Rembang juga akan terus membangun Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK) dan telah mulai membangun Kawasan BBS dengan didahului pengembangan Agrowisata Gunung Lasem di Kawasan BBS Zona I Kecamatan Lasem dan Sluke.

Dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi khususnya jalan dan jembatan yang sangat banyak diusulkan oleh masyarakat, strategi pengembangannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan

jalan dan jembatan yang menuju pada terpenuhinya sarana/prasarana sektor pertanian untuk membuka keterisolasian daerah serta memperlancar pertukaran barang dan jasa dari produsen di perdesaan ke konsumen di wilayah sekitarnya. Untuk kawasan yang cukup berkembang potensi sektor pertaniannya namun belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah merencanakan dengan strategi pengembangan kawasan Agropolitan.

Disisi lain dalam memicu percepatan pertumbuhan ekonomi, juga harus diimbangi dengan faktor demografi. Modal yang paling memungkinkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sisi ini adalah dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal, baik untuk seluruh masyarakat maupun Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan memprioritaskan pengembangan upaya-upaya yang mampu memcerdaskan SDM, maka efisiensi nilai produksi ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam akan lebih maksimal direalisasikan.

2.2 Batas Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Rembang

Berdasarkan uraian kerangka ekonomi daerah Kabupaten Rembang tahun 2003 sampai dengan 2005, Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah kiranya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menetapkan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Rembang 5 (lima) tahun mendatang, yang nantinya dapat mencerminkan besaran Anggaran Belanja Pelayanan Publik yang mampu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendanai program-program kegiatan pembangunan yang diindikasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2006 - 2010.

Karena tuntutan keragaman dan kesamaan struktur Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga dapat dilakukan untuk mengestimasi batas kapasitas fiskal daerah berdasarkan struktur Pendapatan dan Belanja Daerah 5 (lima) tahun mendatang, maka data yang digunakan adalah data realisasi APBD tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005. Dengan pertumbuhan eksponensial selama tahun 2001 - 2005 dan berbasis pada struktur APBD tahun 2006 yang sudah tersusun, akan dapat diestimasi kemampuan fiskal Kabupaten Rembang tahun 2007.

Untuk mengetahui batas kapasitas fiskal yang dapat digunakan dalam menentukan kemampuan Belanja Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang, hal pertama yang perlu dianalisis diantaranya adalah trend APBD lima tahun terakhir ditambah tahun pertama berjalan, di mana selama jangka waktu tersebut pertumbuhannya mencapai 24,24%/tahun.

Tabel II.2
Trend APBD Kabupaten Rembang Tahun 2001-2005

Dalam ribuan

No	JENIS BELANJA	TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Belanja Aparatur	136.456.566	169.218.292	169.017.217	183.687.751	186.827.071	223.200.802	
2.	Belanja Pelayanan Publik	59.119.076	63.114.703	102.093.391	104.035.691	106.721.629	281.365.978	
	Total APBD	186.575.642	232.332.995	271.110.608	287.723.442	293.634.800	504.566.780	
	Pertumbuhan		24,52%	16,69%	6,13%	2,05%	71,83%	24,24%

Sumber: APBD Kabupaten Rembang 2001-2006, diolah.

Disamping itu perlu pula diketahui analisis kecenderungan Penerimaan Daerah, untuk memperkirakan besarnya alokasi Belanja Pelayanan Publik yang layak direncanakan untuk tahun 2007.

Tabel II.3.
Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1996 – 2005

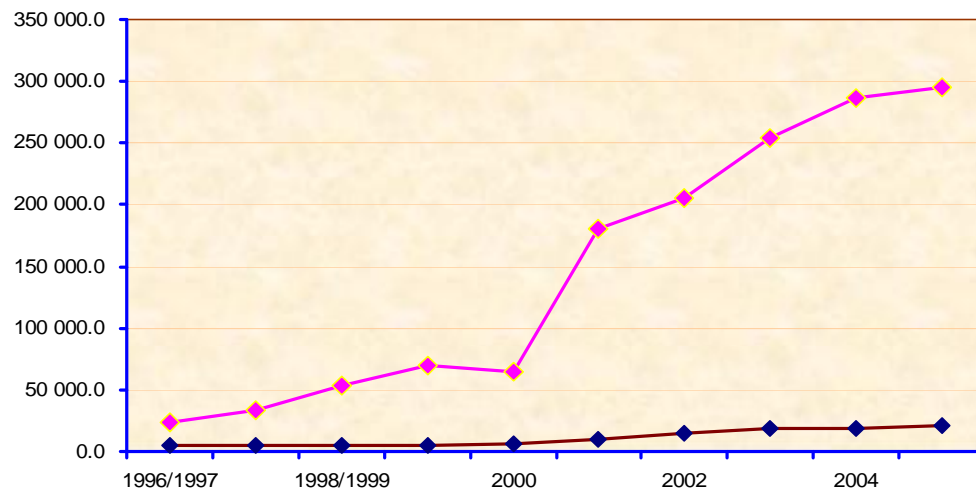
JENIS PENERIMAAN		1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Perkiraan Pendapatan 2006
1	Sisa Lebih Tahun Lalu	448.2	998.8	855.6	2 460.8	2 743.6	4 491.8	12 744.5	24 512.8	8 304.0	7.300.0	24.155.8
2	Pendapatan Asli Daerah											
	a. Pajak Daerah	732.9	797.0	731.7	1 091.1	1 191.7	2 233.5	3 444.3	4 089.2	4 521.7	4.852.5	5.117,5
	b. Retribusi Daerah	3 786.5	3 887.2	3 153.7	3 830.6	4 174.9	6 131.2	7 994.8	10 621.9	12 781.4	13.554,3	16.189,7
	c. Bagian laba BUMD	172.1	189.2	147.7	59.6	61.0	171.5	229.5	441.7	710.0	770,0	945,0
	d. Pendapatan lain	305.7	315.4	1 330.0	449.8	972.8	914.0	2 758.5	3 142.6	702.6	4.733,8	3.428,0
	Jumlah 2	4 997.2	5 188.8	5 363.2	5 431.2	6 400.3	9 450.2	14 427.2	18 295.5	18 715.7	23.910,6	25.680,2
3	Dana Perimbangan											
	a. Bagi Hasil Pajak	3 803.1	4 815.0	4 537.9	6 406.2	7 624.4	12 910.1	15 028.7	21 237.0	16 234.7	16.591,5	21.422,3
	b. DAU/Imbang Keu.Neg.	7 220.9	13 682.5	32 940.0	45 757.2	51 792.4	151 525.7	173 125.9	188 930.0	196 642.0	215.234,0	342.777,0
	c. DAK/Bant.pembang.	8 192.1	9 450.4	7 627.7	12 054.7	0.0	8 569.0	0.0	4 900.0	8 130.0	11.280,0	45.910,0
	d. Bantuan kontijensi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 955.6	14 043.7	15.718,6	17.100,0
	Jumlah 3	19 216.1	27 947.9	45 105.6	64 219.4	59 416.8	172 604.8	188 154.6	229 022.6	236 050.4	258.824,1	427.209,3
4	Pinjaman Daerah											
	a. Pinjaman Dalam Negeri	0.0	320.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 225.2	0.0	20.775,4
	b. Pinjaman Luar Negeri	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Jumlah 4	0.0	320.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 225.2	0.0	20.775,4
5	Lain-lain Pendapatan yang Sah											
	a. Penerimaan dari Prop.	0.0	0.0	371.7	198.6	505.3	6 968.8	11 963.0	5 043.3	0.0	12.917,1	5.645,0
	b. Bantuan dana kontijensi	0.0	0.0	404.5	437.3	493.4	0.0	0.0	0.0	16 681.5	0,0	13.907,2
	Jumlah 5	0.0	0.0	776.1	635.9	998.7	6 968.8	11 963.0	5 043.3	16 681.5	12.917,1	19.552,2
	Jumlah penerimaan	24 661.4	34 455.7	52 100.5	72 747.1	69 559.4	193 515.6	227 289.4	276 874.1	292 976.8	302.951,8	517.372,9

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Rembang, 2005

Berdasarkan data di atas tampak bahwa di Kabupaten Rembang terdapat kecenderungan pertumbuhan PAD dan Belanja Daerah, serta hal-hal lain yang terkait dengan alokasi Belanja Pelayanan Publik dalam rentang jangka menengah.

Pembiayaan untuk Belanja Pelayanan Publik sangat erat kaitannya dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah, yang mendukungnya. Dengan melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka akan terlihat seberapa besar kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya. Di mana, cerminan tingkat kemandiran dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam membiayai pembangunannya, dapat terlihat melalui grafik berikut ini.

Gambar 2.3
Grafik Perbandingan Kemampuan Pembiayaan PAD dengan Besarnya Belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 1996 - 2005



Sumber : Analisis, 2006

Dari tabel di atas tercermin bahwa meski terjadi kenaikan nilai PAD yang cukup signifikan, namun tidak mampu mengimbangi kenaikan trend Belanja Daerah, sehingga menimbulkan *gap* yang semakin melebar. Dengan kata lain, Kabupaten Rembang dalam melaksanakan belanja daerah untuk

membiayai pembangunan daerah masih sangat tergantung sumber dana dari luar baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Dana Perimbangan sebagai representasi dana dari luar (Pemerintah Pusat/Propinsi) yang mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah, tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 172.605 milyar, tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 188.155 milyar, tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 229.023 milyar, tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 236.050 milyar dan pada tahun 2005 sebesar 258.824 milyar. Dengan besaran tersebut, laju pertumbuhan eksponensial Dana Alokasi Umum Kabupaten Rembang mencapai 10,84%/tahun.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Rembang yang mampu direalisasikan pada tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 6.969 milyar, tahun 2002 sebesar Rp. 11.963 milyar, tahun 2003 sebesar Rp. 5.043 milyar dan tahun 2004 sebesar Rp. 16.681 milyar, sehingga pertumbuhannya mencapai 55,50%/tahun.

Estimasi meningkatnya kapasitas fiskal Kabupaten Rembang akan terlaksana dan melebihi dari yang direncanakan, apabila arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan kemampuan pembiayaan daerah diasumsikan dengan upaya antara lain :

1. Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah, melalui
 - a. Peningkatan penggalan Penerimaan Daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.
 - b. Optimalisasi Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi dan sumber-sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.
 - c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
 - d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.

- e. Pendayagunaan potensi Pinjaman dan Obligasi Daerah serta pengembangan pembiayaan indikatif.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah, melalui
 - a. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik pada Belanja Aparatur maupun Belanja Pelayanan Publik.
 - b. Transparansi APBD.
 - c. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dan Antar Negara, dengan masyarakat dan swasta, maupun lembaga-lembaga donor.
 - d. Revitalisasi aset-aset Pemda.
 - e. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak jual bagi investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
 - f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis yang terlihat pada tabel dan grafik-grafik sebelumnya, maka dalam perencanaan anggaran belanja pembangunan pada tahun anggaran 2007 diperlukan tindakan yang cermat dan berhati-hati, mengingat kecenderungan semakin melebarnya *gap* antara PAD dengan Belanja Daerah dan stagnannya trend pertumbuhan APBD Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun, selama 5 tahun terakhir ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten Rembang, maka strategi untuk mengarahkan SKPD terutama dalam menyusun daftar skala prioritas kegiatan pembangunannya (yang tertuang dalam Renja SKPD) dibuatlah sistem Pagu. Sistem ini diterapkan untuk mengarahkan agar usulan yang direncanakan dari SKPD benar-benar diperhitungkan pada tingkat urgensi yang paling tinggi yang mendukung

program empat pilar dan program-program prioritas Kabupaten Rembang, dengan kriteria sebagai berikut :

- § Memperkuat dan mengembangkan infrastruktur, sarana & prasarana publik,
- § Peningkatan kualitas SDM masyarakat, melalui pendidikan gratis
- § Mendukung program jaminan kesehatan Rembang sehat
- § Pengembangan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,
- § Upaya mengatasi Krisis multidimensi & pengentasan kemiskinan,
- § Kebutuhan/Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mempunyai Daya Ungkit (*Vallue Added & Multiplier Effect*) Tinggi,
- § Pengembangan produk-produk unggulan daerah yang menggunakan muatan lokal (*local content*),
- § Pengembangan kawasan strategis prioritas (Konstelasi kegiatan),
- § Peningkatan kapasitas kelembagaan,
- § Antisipasi perubahan lingkungan strategis.

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2007

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Rembang sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, arah kebijakan umum ini merupakan penjabaran dari visi, misi, prioritas dan strategi pembangunan di Kabupaten Rembang dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan menentukan program prioritas tahun 2007. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2007 dalam konteks mikro dalam spesifikasi visi pembangunan kawasan adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat terutama di perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan dilakukan dengan pertimbangan ekonomi keruangan dan lingkungan. Pertimbangan ekonomi keruangan adalah untuk menciptakan keseimbangan perkembangan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, dan dalam struktur perekonomian, kawasan perdesaan akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi berbasis kepada kegiatan pertanian dalam pengertian luas. Pertimbangan lingkungan yang dimaksudkan adalah pemberian peran bagi kawasan perdesaan sebagai kawasan dalam beberapa hal dapat berfungsi sebagai kawasan lindung, baik sebagai hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai, dan kawasan budi daya lainnya.

III.1. Prioritas Bidang – Bidang Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah masing-masing bidang berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- § Mendorong upaya pengembangan Investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha
- § Mengembangkan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja melalui Koperasi, dan UKM
- § Mengembangkan perdagangan dan pertumbuhan ekspor non migas serta peningkatan efisiensi/efektifitas sistem distribusi dan tertib perdagangan
- § Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha
- § Meningkatnya kinerja ekonomi perdesaan
- § Mendorong pengembangan kluster industri
- § Meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat mendukung upaya peningkatan PAD

2. Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan

- § Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas produksi
- § Mendorong upaya revitalisasi sumberdaya kehutanan dan perkebunan
- § Mewujudkan kawasan agribisnis pertanian
- § Meningkatkan produktivitas pertanian
- § Mendorong pengembangan sentra-sentra produksi kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing dan berorientasi Pasar
- § Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi dan budidaya

3. Bidang Perikanan dan Kelautan

- § Mewujudkan kawasan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan multisektor
- § Mendorong pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar

§ Mewujudkan upaya peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan

4. Bidang Energi

§ Mendorong peningkatan layanan jaringan listrik

§ Mendorong pengembangan energi alternatif sebagai upaya mengatasi krisis energi

5. Bidang Konstruksi

§ Mewujudkan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an untuk mendukung Kabupaten Rembang yang mandiri melalui pembangunan kawasan

§ Mendorong peran serta masyarakat dan swasta untuk pembiayaan prasarana jalan

§ Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

§ Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum

§ Meningkatkan kapasitas pelayanan jasa perhubungan

§ Meningkatkan kualitas pelayanan dasar public

§ Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penyediaan air minum

6. Bidang Pertambangan

§ Meningkatkan kegiatan pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan golongan c yang ramah lingkungan

§ Mengembangkan kawasan industri pertambangan sesuai tata ruang wilayah

§ Meningkatkan investasi pertambangan melalui kejasama dengan daerah lain

7. Bidang Lingkungan Hidup

§ Mendorong upaya pengelolaan dan penataan lahan area bekas pertambangan

- § Memanfaatkan Sumber Daya Ikan yang berkesinambungan dan memperbaiki Ekosistem Pesisir
- § Menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan perlindungan daerah pantai
- § Menjaga kelestarian lahan melalui rehabilitasi lahan dan konservasi tanah
- § Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam

8. Bidang Sumber Daya Air

- § Meningkatkan fungsi jaringan irigasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian
- § Meningkatnya fungsi prasarana dan sarana perdesaan
- § Mengelola Sumber Daya Air secara terpadu
- § Meningkatkan cakupan layanan air bersih di wilayah potensial
- § Meningkatkan kegiatan eksplorasi sumber-sumber air di wilayah potensial dalam upaya peningkatan ketersediaan sumber daya air

9. Bidang Kesehatan

- § Meningkatkan upaya kesehatan
- § Penggalangan kemitraan lintas sektoral, masyarakat dan swasta
- § Meningkatkan akses masyarakat akan prasarana kesehatan yang berkualitas
- § Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan
- § Meningkatkan akses masyarakat dari keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
- § Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standard kepada masyarakat

10. Bidang Pariwisata dan Budaya

- § Meningkatkan potensi pariwisata dan budaya daerah

- § Meningkatkan prasarana dan sarana wisata
- § Mewujudkan kerjasama pariwisata antar daerah

11. Bidang Agama

- § Meningkatkan kualitas ibadah umat beragama dan pelayanan ibadah haji
- § Meningkatkan sarana dan prasarana tempat peribadatan
- § Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan antar umat berbagai agama

12. Bidang Pendidikan

- Mengembangkan SDM sedini mungkin secara terarah terpadu dan menyeluruh
- Memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan
- Meningkatkan mutu pendidikan melalui penyempurnaan prasarana dan sarana pendidikan
- Memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi

13. Bidang Pelayanan Umum

- § Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur
- § Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
- § Meningkatkan perumusan kebijakan pengelolaan barang daerah
- § Memberikan jasa pelayanan yang prima kepada masyarakat di segala bidang layanan
- § Meningkatnya keserasian dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah dan kawasan
- § Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran

§ Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

§ Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup anak dan keluarga terhadap pelayanan sosial dasar

14. Bidang Ketrentraman dan Ketertiban

§ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas

§ Meningkatkan penegakan peraturan daerah

§ Menciptakan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemerintahan melalui Peningkatan Pengawasan

§ Menciptakan rasa aman kepada masyarakat

15. Bidang Perlindungan Sosial

- Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya

- Meningkatkan pengamanan dan perlindungan masyarakat pasca bencana

- Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana

- Meningkatnya fungsi dan penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

- Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Rembang

Program prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, akan ditempuh antara lain melalui upaya mempercepat pengentasan kemiskinan; mengurangi angka pengangguran; peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan perbaikan iklim ketenagakerjaan.

III.2. Empat Pilar Program Strategis Pembangunan Daerah

Mengingat esensi dari visi dan misi pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang adalah percepatan pembangunan daerah sehingga diperlukan strategi dan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam mengoptimalkan tuntutan perkembangan kebijakan dan representasi aspirasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki daerah. Selanjutnya kemasannya strategi dan prioritas pembangunan daerah periode 5 tahun adalah Empat Pilar Program Strategis Pembangunan. Percepatan pencapaian visi dan misi melalui pembangunan kawasan diharapkan dapat :

1. Mengungkit tumbuhnya ekonomi baru,
2. Mengembangkan nilai tambah (value added) serta efek pengganda (multiplier effect) ekonomi wilayah di sekitar kawasan terbangun,
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Dalam rangka mencapai upaya tersebut di atas maka dirumuskan Empat Pilar Program Strategis Pembangunan Kabupaten Rembang yaitu :

1). Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik

Program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik bertujuan : *pertama*, untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah guna memperlancar arus barang, jasa dan penumpang dalam melakukan kegiatan ekonomi; *kedua*, penyediaan infrastruktur kawasan strategis yang diharapkan dapat menarik investasi daerah sebagai pemicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru lainnya serta dapat mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat maupun investor. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa;
2. Optimalisasi sumber daya air;

3. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.
4. Penyediaan infrastruktur pada kawasan strategis seperti Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri, Kawasan BBS, Penataan Kawasan Perkotaan, Kawasan Sentra Produksi Komoditas Pertanian, Kawasan Sentra Peternakan, Kawasan Sentra Perkebunan, Kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu sebagai Pusat Pelayanan Publik dan Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kawasan lainnya yang dikembangkan.

2). Program Pendidikan SD / SMP Gratis dan Berkualitas

Amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam mengatasi adanya kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah dan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan serta kurang efisiennya pengelolaan pendidikan pada jenjang SD maka Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik – baiknya melalui program peningkatan kualitas pendidikan dengan tujuan pemerataan pendidikan bagi masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan melalui Pendidikan SD dan SMP Gratis dan berkualitas dan regrouping SD. Program pendidikan SD/SMP gratis dan berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat, sedangkan Program Regrouping SD dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pendidikan sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat dioptimalkan.

3). Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS)

Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan upaya peningkatan derajat kesehatan yang ditempuh melalui penanaman perilaku hidup, makan dan lingkungan sehat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Program yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat, yang diharapkan menjadi embrio untuk pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat menuju Rembang Sehat 2010. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan gratis kelas II puskesmas dan pelayanan gratis kelas III RSUD bagi seluruh penduduk Kabupaten Rembang.

4). Program Pengembangan Ekonomi Rembang (*Holding Company*)

Dalam era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk senantiasa berfikir kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara arif dan bijaksana, sehingga mampu menggerakkan dan mendorong pengembangan ekonomi di daerahnya. Pengembangan ekonomi di daerah merupakan faktor pendukung bagi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pemerintah daerah di bidang pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi kegiatan pelayanan umum, pelayanan keuangan dan kegiatan dalam usaha pemanfaatan asset / potensi daerah. Salah satu langkah non konvensional yang ditempuh daerah guna meningkatkan pendapatan yang berorientasi bisnis adalah melalui pembentukan *Holding Company* .

Tujuan pendirian *Holding Company* adalah untuk menciptakan rancangan lembaga pengelola usaha - usaha daerah. Lembaga ini

dibentuk dalam upaya pemberdayaan asset daerah yang diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi daerah serta dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu diharapkan akan diperoleh optimalisasi penggunaan dan pengolahan sumber daya sesuai dengan bidang usaha masing – masing dan membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan taraf hidup masyarakat daerah.

Keterpaduan usaha daerah dalam satu holding menjadi tidak dapat dielakkan ketika daerah memiliki lebih dari satu unit usaha. *Holding Company* mempunyai fungsi yang vital untuk meningkatkan PAD secara langsung ketika komponen PAD lainnya sulit untuk dioptimalkan. *Holding Company* akan membuka lapangan kerja baru dan menggairahkan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya PAD maka kebutuhan sumber dana untuk pembangunan (APBD) dapat terus ditingkatkan. Roda pembangunan yang diantaranya berfungsi untuk memberikan standart pelayanan minimal, pemenuhan hak dasar masyarakat, membuka keterisolasian daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat akan dapat tercapai.

Jenis – jenis pengembangan usaha daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan pemanfaatan asset / potensi daerah dalam berbagai bidang, antara lain: usaha bidang perikanan, bidang pertanian dan peternakan, bidang pertambangan, bidang industri, bidang pariwisata, bidang kehutanan, bidang keuangan, bidang jasa, dan lain-lainnya. Penentuan jenis usaha tersebut tentu mempertimbangkan beberapa faktor

antara lain : kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan tujuannya (fungsi sosial atau bisnis), serta prospek dimasa depan.

III.3. Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan. Kawasan prioritas dapat dilihat sebagai kawasan-kawasan atau ruang wilayah yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting terhadap aspek-aspek Poleksosbudhankamneg. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai : *pertama*, fungsi tertentu, seperti untuk kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain; dan *kedua*, sifat khusus, karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertanahan keamanan (hankam), kawasan perbatasan, dan lain-lain.

Penataan kawasan prioritas diselenggarakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan wilayah nasional maupun wilayah propinsi dan wilayah kabupaten dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan ruang kawasan yang bersifat secara serasi, selaras, dan seimbang serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini tujuan utama pengembangan kawasan prioritas adalah antara lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan kawasan yang sangat tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Implementasi pengembangan kawasan prioritas tahun 2007 yang akan dan terus menerus dikembangkan adalah : *pertama*, Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT). *Kedua*, Pengembangan Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang. *Ketiga*, Pengembangan Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan (BBS) Zona II. *Keempat*, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Peternakan.

III.4. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tersebar nya desa – desa dalam wilayah Kabupaten Rembang dan pada sisi lain yakni aspek keruangan dalam implementasi prioritas masing – masing bidang pembangunan daerah, sehingga strategi pembangunan perdesaaan yang ditempuh adalah pengembangan kawasan perdesaaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal dalam rangka menciptakan klaster – klaster ekonomi yang saling berkait dalam kegiatan perekonomian wilayah. Deliniasi kawasan perdesaaan sebagai bagian wilayah dalam pengertian luas (*regional*) yang mempunyai karakteristik dan potensi tertentu yaitu satu desa sebagai desa pusat pertumbuhan/pengembangan dan desa – desa sekitar sebagai *hinterland*-nya merupakan satu kesatuan fungsi / kegiatan produksi, pengumpul maupun distribusi hasil pertanian (dalam pengertian luas) yang melayani baik dalam skala kawasan tersebut maupun dalam skala wilayah (kabupaten, propinsi maupun nasional).

Implementasi pengembangan kawasan perdesaaan tahun 2007 sebagai satu tahap awal dari empat tahapan pelaksanaan hingga tahun 2010; memfokuskan atau memprioritaskan pada kawasan perdesaaan yang mempunyai potensi unggulan ekonomi lokal yang strategis untuk dikembangkan pada masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang.

Pada akhirnya, kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar mungkin kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Kesejahteraan yang akan

dicapai adalah meningkatnya kemampuan masyarakat yang dalam hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, pencegahan proses kemiskinan lebih lanjut dan menghapus perangkap keterbelakangan sosial budaya, melainkan juga pemenuhan akan nilai tambah sosial- sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Rembang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penjabaran visi, misi, agenda dan prioritas pembangunan daerah yang kemudian tersusun dalam arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Rembang; perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program maupun kegiatannya. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Dengan demikian program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Rembang atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah/SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Konteks kegiatan dalam hal ini bisa dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran.

Untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Negara serta Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, maka penjabaran prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2007 dalam kerangka urusan Pemerintahan Daerah, kemudian ditransformasikan dalam Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) seperti tertera dalam tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1.

Transformasi Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD Pelaksana

No	Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD Pelaksana
	URUSAN WAJIB	
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN	Dinas Kesehatan RSUD
3	PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Bappeda
5	PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan
6	LINGKUNGAN HIDUP	Kantor Kebersihan dan Pertamanan
7	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	Kantor Catatan Sipil dan kependudukan
8	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	BKBPM
9	TENAGA KERJA	Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
11	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP
12	PEMERINTAHAN UMUM	DPRD BUPATI DAN WAKIL BUPATI Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Bawasda Kecamatan Dispenlopas
13	KEPEGAWAIAN	BKP
14	KEARSIPAN	Kantor Parsip dan PDE
	URUSAN PILIHAN	
1	PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
2	KEHUTANAN	Dinas Kehutanan dan perkebunan
3	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
4	PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan dan Kelautan

Selengkapnya Rencana Kerja SKPD seperti dalam tabel IV. 2 dst sebagai berikut :

BAB V

RINGKASAN PENDANAAN

5.1. Kebijakan Umum Anggaran

Agar strategi pembangunan Daerah Kabupaten Rembang ini dapat mencapai kinerja agregat seperti yang diharapkan, fungsi anggaran pembangunan di Kabupaten Rembang diarahkan dalam 3 fungsi utama, yakni :

- ✓ Pertama fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat *public services* seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
- ✓ kedua fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya, dan
- ✓ ketiga fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Disamping fungsi anggaran, untuk penyusunan APBD juga mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang telah lazim dikenal dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Rembang yakni :

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran;
- 2) Disiplin Anggaran;
- 3) Keadilan Anggaran; dan
- 4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Mengingat keterbatasan anggaran, maka Untuk Kabupaten Rembang, masih perlu pula ditambah dengan dikembangkannya pembiayaan indikatif guna mengatasi keterbatasan dana PAD maupun APBD/APBN, seperti misalnya dengan pinjaman daerah, obligasi, dan privatisasi. Apabila seluruh kegiatan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik maka akan tercapai penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, percepatan pembangunan ekonomi, pemerataan memperoleh pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan.

5.2. Pendapatan

Kebijakan di bidang Keuangan Daerah meliputi dua aspek penting yaitu Kebijakan di Bidang Penerimaan/Pendapatan Daerah (*Revenue Policy*) dan Kebijakan di Bidang Pembelanjaan Keuangan Daerah (*Expenditure Policy*). Kecuali kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya *expenditure policy* adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Revenue policy dikembangkan berdasarkan tatanan hukum normatif yaitu pada bagian "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah". Berlandaskan tatanan hukum normatif tersebut, maka *revenue policy* ditekankan pada pengembangan konsep *revenue sharing*. *Revenue sharing* ditujukan pada *tax sharing* maupun *non tax sharing* yang diterapkan secara konsisten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pengembangan konsep *revenue sharing* tersebut didasarkan atas pemikiran untuk memberdayakan Daerah melalui upaya pemanfaatan potensi Daerah. Konsep ini disamping dapat

mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Daerah melalui Pemerintah Daerah, juga tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan. Artinya, kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terwakili secara proporsional.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang mengedepankan transparansi, maka pada implementasi konsep *revenue sharing* tersebut dibutuhkan transparansi di pihak Pemerintah Pusat dalam perhitungan Bagian Penerimaan Daerah. Keterlibatan Daerah dalam perhitungan *sharing* berbagai penerimaan, baik PPh, PPh, Cukai maupun Dana Alokasi Umum harus ditingkatkan melalui forum-forum pembahasan secara nasional. Penerapan konsep kebijakan di bidang Pendapatan Daerah apabila dilaksanakan secara konsisten akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi Daerah dalam pembangunan secara nasional, sehingga hubungan antara Pusat dan Daerah dapat berjalan secara serasi.

Kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut diupayakan melalui pos-pos anggaran sebagai berikut :

1). Pendapatan Asli Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah serta mendorong timbulnya inovasi dan kreatifitas. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan (pendanaan), khususnya untuk memenuhi pendanaan

Pemerintahan dan Pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Sementara itu, Dana Perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, jumlahnya relatif kurang memadai sehingga daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja harus di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Sedangkan pungutan retribusi memungkinkan untuk dikembangkan dan tergantung jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Jasa dimaksud adalah jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat namun tetap harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Khususnya terhadap Retribusi Jasa usaha, pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis retribusi yang memberikan jasa, manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan retribusi tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten.

2). Dana Perimbangan

Untuk mengurangi ketimpangan antara Pusat dan Daerah diberlakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pola Bagi Hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Bagi Hasil penerimaan negara tersebut meliputi Bagi Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari sektor Kehutanan, Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam serta Perikanan. Bagi Hasil tersebut diberikan kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang baru (Undang-undang Nomor 17 tahun 2000), mulai tahun 2001 Daerah memperoleh Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi (*personal income tax*) yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.

5.3 Belanja

Arah dan kebijakan umum belanja pembangunan memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang dilaksanakan dalam lima tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.

Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk belanja (kerangka anggaran), namun dapat dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif (kerangka regulasi). Dengan konsepsi tersebut dibutuhkan kejelian dalam menganalisis berbagai implementasi kebijakan apakah harus dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja, khususnya pada Pos Pelayanan Publik guna membiayai indikasi kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh masing-masing SKPD (seperti yang nantinya akan tersirat dalam Matrik Indikasi Program RPJM Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010), didasarkan pada batas kapasitas fiskal daerah. Dengan pendekatan yang didasari atas pemikiran keterbatasan anggaran dan pembatasan usulan dengan urgensi yang paling tinggi, maka dikembangkan sistem Pagu Indikatif anggaran yang nantinya akan dijadikan usulan anggaran SKPD, terutama dalam penyusunan RKPD tahun per tahun pada periode 2006 – 2010.

Untuk menghitung share pagu indikatif anggaran tiap SKPD dalam membiayai Belanja Pelayanan Publik menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yakni mendasarkan pada faktor – faktor determinan Anggaran Belanja SKPD sesuai Tujuan Pembangunan (Renstra) SKPD Kabupaten Rembang. Namun mengingat penyusunan RKPD tahun 2007 adalah tahap kedua (tahun kedua) pelaksanaan RPJM 2006 – 2010 maka dipergunakan 2 komponen yang diasumsikan sebagai faktor – faktor determinan Anggaran Belanja SKPD sesuai Tujuan Pembangunan (Renstra) SKPD, yaitu : Komponen 1 adalah Stakeholder Perception Index (SPI); yang menunjukkan urutan prioritas anggaran SKPD berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing SKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang direpresentasikan oleh indeks-indeks pembangunan yang didasarkan pada empat pilar program pembangunan daerah. Komponen 2 yaitu menunjukkan kapasitas dan peranan SKPD dalam pembangunan berdasarkan determinasi anggaran belanja publik tahun sebelumnya (tahun 2006). Namun demikian skenario seimbang “tidak kaku” dalam pengalokasian anggaran SKPD mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk sampai kepada Alokasi anggaran masing-masing SKPD, telah dilampaui proses dari mengakomodasikan usulan masyarakat hingga pemeriksaan akhir (Validasi Verifikasi dan *Appraisal*) Panitia Anggaran Eksekutif.
- Sebelum ditetapkan alokasi hingga menjadi Perda APBD, telah dilampaui pula pembahasan masing-masing kegiatan yang diajukan SKPD dengan pihak Legislatif; yang diakhiri dengan penetapan "kebijakan dan kegiatan yang layak" dalam Rapat Paripurna penatapan Anggaran DPRD.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi uji kelayakan dan konsesi kebijakan dari/antara SKPD kepada Kepala Daerah dan DPRD, sebagai representasi dari keputusan kebijakan yang maksimal pada tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya pagu indikatif anggaran (belanja publik) SKPD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 adalah seperti dalam tabel V.1.

Tabel V.1
Pagu Indikatif Anggaran SKPD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2007

NO	SKPD	SHARE	JUMLAH (Rp.)
1	Sekretariat Daerah		
	a. Bagian Pemerintahan	0.0883	20,212,758,366.14
	b. Bagian Hukum	0.0029	672,802,471.05
	c. Bagian Infokom	0.0031	705,256,000.76
	d. Bagian Pengendalian Program	0.0084	1,933,138,648.27
	e. Bagian Perekonomian	0.0032	738,098,421.23
	f. Bagian Kemasyarakatan	0.0709	16,234,367,514.28
	g. Bagian Keuangan	0.0000	0.00
	h. Bagian Kekayaan Daerah	0.0287	6,571,956,334.16
	i. Bagian Umum	0.0105	2,415,225,000.00
	j. Bagian Organisasi dan Kepegawaian	0.0033	746,250,000.00
2	Sekretariat DPRD	0.0178	4,072,723,118.33
3	Dinas Pendapatan Pengelolaan Pasar	0.0085	1,949,443,919.08
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.0327	7,499,344,291.36
5	Badan Pengawas Daerah	0.0018	408,500,000.00
6	BKBPM	0.0099	2,272,763,403.14
7	Badan Kepegawaian Daerah	0.0018	400,756,018.65
8	Kantor Perpustakaan dan PDE	0.0066	1,516,648,807.25
9	Kantor Kesbang Linmas	0.0027	613,861,594.82
10	Dinas Pertanian dan Peternakan	0.0255	5,837,730,117.89
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	0.0236	5,395,250,000.00
12	Dinas Pertambangan , Energi dan LH	0.0090	2,068,628,654.88
13	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0.0066	1,506,979,348.61
14	Dinas Perindagkop	0.0097	2,215,274,997.16
15	Diskesosnakertrans	0.0032	724,683,946.74
16	Dinas Kesehatan	0.0894	20,468,958,147.04
17	Badan RSUD	0.0066	1,504,750,000.00
18	Dinas Pendidikan	0.1313	30,075,068,347.24
19	DPU	0.2863	65,563,059,023.89
20	KKP	0.0071	1,615,008,028.55
21	Dinas Perhubungan	0.0855	19,574,842,503.16
22	Kantor Capil dan Kependudukan	0.0046	1,055,210,451.95
23	Diparsenibud	0.0085	1,937,338,949.92
24	Satpol PP	0.0022	495,250,000.00
	TOTAL (1-24)	1.00	229,001,926,425.58
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1,386,168,000.00
1.e*	Penyertaan Modal Holding Company		25,000,000,000.00
	TOTAL		255,388,094,425.58
	Catatan		
1	Asumsi : jumlah pendapatan tetap dikurangi defisit Rp.22M		
2	Jika terdapat penambahan pendapatan maka penghitungan nominal pagu = share x jumlah total pendapatan		
3	SKPD DKK termasuk UPT PUSKESMAS		
4	SKPD DIKNAS termasuk UPT SKB,TK,SMP,SMA/SMK		
5	SKPD DISHUB termasuk rencana investasi pembangunan pelabuhan niaga sebesar Rp. 17 M		

Sumber : Hasil analisis, 2006

Hasil dari perhitungan inilah yang nantinya akan dijadikan landasan pembatasan usulan dari SKPD dalam penyusunan anggaran tahun 2007. Penerapan Pagu Indikatif berdasar pendekatan ini masih perlu divalidasi terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Jika dalam perjalanannya terjadi perubahan SOTK (penambahan atau perampingan), maka cara pengitungan yang sama (rata-rata alokasi anggaran) dilakukan dengan menambah atau mengurangi pecahan dan/atau penggabungan SKPD.
- 3). Metode Validasi, Verifikasi dan *Appraisal* terhadap bertambah/berkurangnya anggaran dari usulan atas dasar pagu indikatif ini hingga menjadi menjadi Raperda APBD; akan ditentukan kemudian berdasarkan : *pertama*, perkembangan kebijakan; *kedua*, representasi aspirasi; dan *ketiga*, konstelasi dana perimbangan.

5.4 Pembiayaan

1). Arah dan Kebijakan

Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari Arah Kebijakan Umum APBD. Sebagai bagian dari arah kebijakan umum APBD maka arah yang diinginkan dan kebijakan yang disepakati dalam Pos Pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen pembiayaan daerah diarahkan pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk

Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau penerbitan obligasi.

2). Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah

a). Pinjaman Daerah

Otonomi daerah sebagai suatu cita-cita pemerintah dan bangsa Indonesia pada era reformasi ini diharapkan dapat memberi spirit bagi pemerintah daerah untuk aktif dan membenahi diri dengan melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik dapat berupa sarana dan prasarana daerah yang menyangkut infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, ekonomi seperti pusat pembelanjaan/ area industri, dan infrastruktur yang dibangun dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan murni, seperti pasar, terminal, jalan dan jembatan dan lain-lain.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut tentu diperlukan dana tidak sedikit. Suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup/ memadai tentu memerlukan tambahan dari pihak lain, agar program pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat terlaksana. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah lembaga perbankan, pemerintah pusat, atau pihak asing yang peduli dengan program pembangunan suatu daerah. Dalam hubungan ini pemerintah daerah dapat melakukan suatu kegiatan yang dikenal dengan nama "pinjaman daerah".

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Pinjaman Daerah , UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 49 perihal batasan pinjaman, PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah dan KMKRI No. 35/ KMK.07/ 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan / Penatausahaan, penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah.

Dalam mempergunakan alternatif dana pinjaman ini, diarahkan untuk lebih berhati-hati, terutama dalam kaitannya :

- a. Syarat pinjaman, hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang;
- b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai *multiplier effect* yang besar dan *cost recovery*;
- c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik;
- d. Tata cara pengesahan pinjaman tidak berbelit-belit, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/ kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam; dan
- e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

b). Obligasi Daerah

Dalam peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah disebutkan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dalam negeri dapat berasal dari Pemerintah Pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman dari masyarakat untuk pendanaan pembangunan yang dikenal dengan obligasi daerah (*Municipal Bond*), juga dapat digunakan sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah.

Meskipun obligasi bukan merupakan hal yang baru bagi kalangan swasta (*Private Sector*) maupun bagi sektor pemerintah (*Public Sector*),

namun khusus bagi pemerintah daerah di Indonesia pemanfaatan obligasi sebagai alternatif pendanaan pembangunan dapat dikatakan baru, karena selama ini tidak satupun pemerintah daerah di Indonesia baik propinsi maupun kabupaten/ kota pernah melakukannya.

Perkembangannya, obligasi pertama kali diperkenalkan di pasar modal Indonesia pada tahun 1983 oleh PT (Persero) Jasa Marga untuk mendanai pembangunan jalan tol Jagorawi. Dalam perkembangan selanjutnya pasar obligasi mengalami pasang surut. Oleh karena itu, untuk terus menggairahkan pasar modal di dalam negeri, pada tahun 1980-an, beberapa paket kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah.

Namun tetap saja pasar obligasi belum mendapat apresiasi seperti halnya yang terjadi pada perdagangan saham. Di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat pasar obligasi diramaikan juga dengan obligasi dari lembaga pemerintah, baik pemerintah federal maupun pemerintah lokal. Tidak demikian halnya di Indonesia. Pada periode sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 25/ 1999 dan UU No.33/2004 hanya pemerintah pusat yang diperbolehkan mengeluarkan obligasi, seperti baru-baru ini dilakukan untuk menalangi dana BLBI. Sedangkan bagi pemerintah daerah belum pernah terjadi. Salah satu alasan yang biasanya dijadikan pertimbangan mengapa pemerintah suatu negara tidak menerbitkan obligasi adalah kekhawatiran akan terjadinya persaingan antara sektor pemerintah dan swasta dalam memperebutkan dana masyarakat. Namun dengan terjadinya perubahan paradigma dari sistem sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik yang salah satu kebijakannya adalah memperbolehkannya pemerintah daerah mengeluarkan obligasi untuk mendanai pembangunan merupakan angin segar yang akan mampu menyemarakkan pasar obligasi di dalam negeri.

Obligasi dapat dimengerti sebagai surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (*investor*) dengan yang

diberi pinjaman (emiten). Sehingga, sertifikat obligasi sebenarnya adalah surat pengakuan hutang, dengan demikian obligasi sama dengan hutang pada umumnya yang diperoleh dari lembaga keuangan, hanya saja obligasi penjualannya dipublikasikan dan dijual pada investor langsung di pasar modal dengan menawarkan tingkat bunga (*Rate*) tertentu dan jangka waktu pengembalian (*maturity*) tertentu pula.

Selanjutnya obligasi daerah berdasarkan jenis pinjaman atas pengembalian hutang pokok dan bunganya meliputi :

- a. Obligasi Umum (*General Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/ kota untuk membiayai investasi dengan jaminan atas pembayaran kembali utang pokok dan bunganya adalah seluruh penerimaan pemerintah daerah tanpa transfer (*full faith and credit local government*) ;
- b. Obligasi Pendapatan (*Revenue Bond*) yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan proyek tersebut ; dan
- c. *Obligasi Barelled* atau *Hybrid Obligation* yaitu obligasi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah daerah atau BUMD untuk membiayai suatu proyek tertentu. Jaminan pembayaran kembali hutang pokok dan bunganya akan berasal dari penerimaan daerah dan penerimaan proyek tersebut

Selain perlunya kepercayaan dari masyarakat, lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha serta semakin efesiensinya pemerintah kabupaten juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan obligasi ini antara lain adalah :

- 1) Mendapat persetujuan dari DPRD
- 2) Analisa kemampuan pinjam
- 3) Analisa IRR
- 4) Analisa biaya hutang (*cost of Debt*)

c). Memperkuat dan Memperluas Kemitraan

Kemitraan dengan swasta sudah merupakan tuntutan jaman sekarang ini, karena peranan pemerintah sudah mulai “berkurang”, sementara peranan swasta semakin meningkat terutama dalam sektor perekonomian. Prinsip kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan bagi pemerintahan, swasta dan masyarakat dilaksanakan melalui langkah-langkah:

- a. Perumusan model-model kemitraan yang paling tepat dilakukan ;
- b. Perumusan kriteria mitra yang potensial sebagai mitra pemerintah propinsi
- c. Terciptanya model-model kerjasama antara pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat, dan antar swasta dengan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi, penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan.

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, namun tidak semua jenis prasarana dan sarana dapat dikerjasamakan, ada bagian-bagian tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Bagaimanapun, calon investor hanya mau diukur dengan kriteria financial atau ekonomi, seperti *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Pay Back Period*. Oleh karena itu, dimasa mendatang dituntut adanya kemampuan aparat atau pejabat pemerintah Provinsi untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi swasta untuk mengadakan kemitraan di bidang penyediaan pelayanan jasa bagi masyarakat.

Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain (Permendagri No. 4 Tahun 1990) :

- 1) Kerjasama manajemen, kerjasama operasional, pembagian keuntungan, kerjasama patungan (*Joint venture*), kerjasama pembiayaan, kerjasama pembagian hasil produksi

- 2) Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha
- 3) Pembelian saham, obligasi dari perseroan terbatas (PT) yang telah yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik
- 4) Keagenan, pemakaian dan penyaluran
- 5) Penjualan saham, obligasi dan memasyarakatkan saham, obligasi (go public)
- 6) Kerjasama bantuan teknik dalam maupun luar negeri
- 7) Gabungan dari 2 atau lebih bentuk-bentuk kerjasama di atas.

d). Mengembangkan Privatisasi/Swastanisasi

Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan meletakkan sektor swasta sebagai *"the engine of growth"* dan mengurangi peran sektor publik dengan memberi peluang yang seluas-luasnya (*catalytic goverment*) peran investasi swasta/ masyarakat untuk sektor usaha yang *full cost recovery*. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan privatisasi/ swastanisasi pelayanan umum (di bidang-bidang yang yang secara efisien dapat dikelola sektor swasta). Langkah-langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan kriteria privatisasi secara transparan
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang dikerjakan oleh pemerintah dan jenis pekerjaan yang dapat dilimpahkan pada swasta
3. Meningkatkan dan memperluas keikutsertaan peran swasta untuk membangun prasarana dan sarana pelayanan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007 ini merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun rencana Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rembang tahun anggaran 2007. Pedoman dan atau acuan ini disusun agar setiap instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembangunan dalam memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung pula pada kemampuan berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan semenetara itu ego sektoral maupun ego instansional perlu dihilangkan.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan dilakukan secara horisontal,

vertikal, maupun diagonal baik melalui forum reguler yang telah terprogram maupun forum parsial atau forum terfokus antar pelaku pembangunan (Stakeholders).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2007 juga dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					DPRD				
					BELANJA LANGSUNG				
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				8,259,956,000
					JUMLAH				8,259,956,000
					BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
					BELANJA LANGSUNG				1,262,000,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG	ADMINISTRASI KANTOR			803,690,000
					JUMLAH				2,065,690,000
					SEKRETARIAT DAERAH				
					Gaji				8,666,210,000
					Tunjangan Kesejahteraan				2,616,902,000
					Bunga				281,383,000
					Belanja Tidak Terduga				4,800,262,000
					Administrasio Kantor				4,627,754,000
					Tenaga Kontrak				1,392,596,000
					BAG. ORGANISASI				
1	20	xx	29	01	Penataan kelembagaan	Tersusunnya SOTK perangkat daerah	100	Bag. Orpeg	200,000,000
1	20	xx	29	02	Penyusunan formasi dan persyaratan jabatan	Tersedianya pedoman kebutuhan pegawai sesuai kompetensinya	100	Bag. Orpeg	65,000,000
1	20	xx	29	03	Penyusunan uraian tugas	Tersusunnya tupoksi pejabat struktural perangkat daerah	100	Bag. Orpeg	100,000,000
1	20	xx	38	03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda	Terciptanya tertib administrasi kepegawaian Setda	100	Bag. Orpeg	35,000,000
1	20	xx	38	04	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	Terciptanya peningkatan kinerja pegawai	100	Bag. Orpeg	75,000,000
1	20	xx	38	12	Evaluasi dan monitoring budaya kerja	Terciptanya peningkatan kinerja aparatur	100	Bag. Orpeg	20,000,000
1	20	xx	38	13	Fasilitasi peningkatan sumber daya aparatur	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur	100	Bag. Orpeg	100,000,000
1	20	xx	38	14	FORKOMPANDA	tersedianya forum komunikasi SKPD	100	Bag. Orpeg	15,000,000
1	20	xx	38	15	Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat	Terwujudnya transparansi pelayanan	100	Bag. Orpeg	36,000,000
					JUMLAH RENJA				646,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					BAG. INFOKOM				
1	20	xx	23	03	Operasional Media Centre	Meningkatnya akses informasi	100	Bag. Infokom	40,000,000
1	20	xx	23	04	Optimalisasi Radio CB FM	Meningkatnya akses informasi	100	Bag. Infokom	75,000,000
1	20	xx	23	05	Penerbitan Majalah bangkit	Meningkatnya informasi pembangunan	100	Bag. Infokom	185,000,000
1	20	xx	23	06	Fasilitasi Pers	Meningkatnya kerjasama pers	100	Bag. Infokom	80,000,000
1	20	xx	23	07	Penyediaan jasa pelaksanaan upacara PHBN	Meningkatnya rasa nasionalisme	100	Bag. Infokom	30,000,000
1	20	xx	23	08	Dinamika Rembang	Meningkatnya akses informasi	100	Bag. Infokom	125,000,000
1	20	xx	23	09	Dokumentasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya akses informasi	100	Bag. Infokom	40,000,000
1	20	xx	23	10	Pengkajian informasi dan pengembangan retorika pembangunan	Meningkatnya dokumentasi daerah	100	Bag. Infokom	65,000,000
1	20	xx	23	11	Pemberdayaan kehumasan daerah	Meningkatnya peran bakohumas	100	Bag. Infokom	35,000,000
1	20	xx	23	12	Pemberdayaan protokol	Meningkatkan fasilitas agenda daerah	100	Bag. Infokom	30,000,000
					JUMLAH RENJA				705,000,000
					BAG. PEMERINTAHAN				
	14	xx	16	11	Sensus angkatan kerja		80	Bag. Pemerintahan	250,000,000
1	20	xx	16	01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat (Coffee morning dan rakor)	Tertampungnya aspirasi masyarakat dan penyerapan permasalahan di Kab. Rembang serta meningkatnya koordinasi antar stakeholder pemerintahan	100	Bag. Pemerintahan	110,000,000
1	20	xx	19	04	Pembekalan Kades dan Perangkat Desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi Kades dan katdes	100	Bag. Pemerintahan	300,000,000
1	20	xx	19	05	Pemberian penghargaan kepada Kades yang purna tugas	Peningkatan kinerja Kades	100	Bag. Pemerintahan	380,000,000
1	20	xx	19	06	Pemberian tunjangan Kades dan katdes yang tidak berbengkok	Terciptanya tugas, fungsi pemerintahan desa khususnya desa tak berbengkok	100	Bag. Pemerintahan	325,000,000
1	20	xx	19	07	Pemberian tunjangan kepada Kades dan Katdes	Tercapainya tugas, fungsi pemerintahan desa	100	Bag. Pemerintahan	4,262,000,000
1	20	xx	19	08	Kunjungan DPR / DPRD luar Kab. Rembang dan Studi banding	Harmonisasi hubungan pemerintahan	100	Bag. Pemerintahan	25,000,000
1	20	xx	19	09	Pembinaan dan penguatan BPD dan LPMD	Meningkatnya pengetahuan pengurus BPD dan LPMD	100	Bag. Pemerintahan	80,000,000
1	20	xx	19	10	Penyelenggaraan pembinaan kecamatan	Meningkatnya kinerja aparat kecamatan dalam tugasnya	100	Bag. Pemerintahan	45,000,000
1	20	xx	19	11	Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa	Terwujudnya administrasi desa yang tertib	100	Bag. Pemerintahan	40,000,000
1	20	xx	19	12	Penyusunan dan konsultasi publik draft raperda tentang pemerintahan desa	Tersusunnya raperda tentang pemerintahan desa	100	Bag. Pemerintahan	50,000,000
1	20	xx	19	13	Pengadaan tanah pengganti bondo desa/bengkok yang digunakan fasilitas umum	Tersedianya tanah pengganti bondo desa	100	Bag. Pemerintahan	500,000,000
1	20	xx	19	14	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Peningkatan perayaan HUT Kemerdekaan RI	100	Bag. Pemerintahan	75,000,000
1	20	xx	19	15	Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas perhubungan	Tersedianya tanah untuk lokasi kantor Dinas Perhubungan	100	Bag. Pemerintahan	800,000,000
1	20	xx	20	10	Penyusunan LKPJ Bupati	Terpenuhinya kewajiban Pemerintah daerah dan LPJ Bupati Rembang	100	Bag. Pemerintahan	85,000,000
1	20	xx	20	11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah dalam membuat laporan kepada Mendagri	100	Bag. Pemerintahan	25,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	20	xx	30	01	Pemasangan Titik Dasar Teknik Orde IV	Tercapainya kepastian pengukuran	100	Bag. Pemerintahan	75,000,000
1	20	xx	30	02	Rehab Joglo dan Kantor Kecamatan	Tersedianya fasilitas kecamatan	100	Bag. Pemerintahan	800,000,000
1	20	xx	30	03	Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan rehab joglo dan Kantor Kecamatan	Terlaksananya rehab joglo dan kantor kecamatan	100	Bag. Pemerintahan	52,000,000
	20	xx	30	04	Pensertifikatan tanah wakaf	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan	100	Bag. Pemerintahan	50,000,000
1	20	xx	31	01	Pengisian Kepala Desa	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa	100	Bag. Pemerintahan	1,250,000,000
1	20	xx	31	02	pengisian Perangkat Desa	Mutu pelayanan masyarakat jadi baik	100	Bag. Pemerintahan	60,000,000
1	20	xx	31	03	Alokasi dana Desa (ADD)	Meningkatkan partisipasi dan pelayanan bagi masyarakat desa / kelurahan	100	Bag. Pemerintahan	17,500,000,000
1	20	xx	31	04	BOP ADD tingkat Kabupaten dan kecamatan	Tersalurkannya dana bantuan desa sesuai petunjuk	100	Bag. Pemerintahan	175,000,000
1	20	xx	31	05	Orientasi dan pemutakhiran data profil desa / kelurahan	Tersedianya data profil desa / kelurahan dengan baik	100	Bag. Pemerintahan	75,000,000
					JUMLAH RENJA				27,389,000,000
					BAG. KEMASYARAKATAN				
1	20	xx	35	01	Bantuan keuangan pembinaan , pengembangan LPTQ / MTQ			Bag. Kemasy	150,000,000
1	20	xx	35	02	Bantuan keuangan untuk pelayann ibadah haji			Bag. Kemasy	270,000,000
1	20	xx	35	03	Bantuan pembangunan gedung haji			Bag. Kemasy	300,000,000
1	20	xx	35	04	Bantuan keuangan kegiatan keagamaan			Bag. Kemasy	2,000,000,000
1	20	xx	35	05	Bantuan keuangan kepada BAZDA			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	35	06	Bantuan keuangan MUI			Bag. Kemasy	25,000,000
1	20	xx	35	07	Bantuan tunjangan kesejahteraan Guru TK/RA, BA non PNS			Bag. Kemasy	500,000,000
1	20	xx	35	08	Bantuan tunjangan kesejahteraan dan penunjang kegiatan lembaga Madin, TPO, Pengasuh Pondok Pesantren, Lembaga Iman Kristen Katolik			Bag. Kemasy	2,500,000,000
1	20	xx	36	01	Bantuan Sarana prasarana TK, RA, BA			Bag. Kemasy	300,000,000
1	20	xx	36	02	Bantuan tunjangan guru swasta murni SMP / MTs, SMA / SMK / MA			Bag. Kemasy	800,000,000
1	20	xx	36	03	Bantuan keuangan kepada Dewan pendidikan			Bag. Kemasy	25,000,000
1	20	xx	36	04	Bantuan keuangan masyarakat berprestasi			Bag. Kemasy	250,000,000
1	20	xx	36	05	Bantuan keuangan kepada BMPS Kab. Rembang			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	36	06	Bantuan keuangan kepada TP UKS Kab. Rembang			Bag. Kemasy	75,000,000
1	20	xx	36	07	Bantuan keuangan sarana kegiatan olah raga			Bag. Kemasy	100,000,000
1	20	xx	36	08	Bantuan rehab lapangan tenis Pemkab Rembang			Bag. Kemasy	300,000,000
1	20	xx	36	09	Bantuan keuangan kegiatan senam tiap akhir bulan			Bag. Kemasy	13,000,000
1	20	xx	36	10	Bantuan keuangan kegiatan olah raga semua cabang dan pengiriman atlet ke luar daerah			Bag. Kemasy	200,000,000
1	20	xx	36	11	Bantuan keuangan PSIR			Bag. Kemasy	3,000,000,000
1	20	xx	36	12	Bantuan keuangan KONI			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	36	13	Perbaikan Gedung fitness			Bag. Kemasy	25,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	20	xx	36	14	Bantuan keuangan Haornas			Bag. Kemasy	15,000,000
1	20	xx	36	15	Bantuan keuangan pelaksanaan Jambore Daerah Tingkat Jateng			Bag. Kemasy	2,000,000,000
1	20	xx	36	16	Bantuan keuangan kepemudaan			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	36	17	Bantuan keuangan kegiatan Pramuka			Bag. Kemasy	400,000,000
1	20	xx	36	18	Bantuan keuangan pengembangan seni budaya			Bag. Kemasy	100,000,000
1	20	xx	36	19	Bantuan keuangan untuk kegiatan monev eksternal PKPS BBM Bidang Pendidikan			Bag. Kemasy	360,000,000
1	20	xx	36	20	Bantuan keuangan untuk kegiatan monev program strategis 4 pilar			Bag. Kemasy	100,000,000
1	20	xx	37	01	Bantuan keuangan kepada PKBI			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	37	02	Bantuan keuangan kepada BNK, KPAD (AIDS, HAN)			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	37	03	Bantuan keuangan kepada orang yang berpenyakit langka			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	37	04	Bantuan keuangan untuk sosisal kemasyarakatan			Bag. Kemasy	1,000,000,000
1	20	xx	37	05	Bantuan keuangan korban bencana, penunjang kegiatan dan droping air bersih			Bag. Kemasy	400,000,000
1	20	xx	37	06	Bantuan keuangan kepada transmigran			Bag. Kemasy	100,000,000
1	20	xx	37	07	Bantuan keuangan kepada penyandang cacat dan orang terlantar			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	37	08	Bantuan keuangan santunan lebaran kesejahteraan sosial (Panti asuhan)			Bag. Kemasy	150,000,000
1	20	xx	37	09	Bantuan keuangan program kegiatan dan operasional GSI Kab. Rembang			Bag. Kemasy	100,000,000
1	20	xx	37	10	Bantuan keuangan kepada GOW			Bag. Kemasy	50,000,000
1	20	xx	37	11	Bantuan keuangan kepada PKK			Bag. Kemasy	1,500,000,000
1	20	xx	37	12	Bantuan Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Bag. Kemasy	75,000,000
1	20	xx	37	12	Bantuan Kepada Unit Gugus Keamanan Laut (UGK) Rembang			Bag. Kemasy	-
					JUMLAH				17,583,000,000
					BAG. HUKUM				
1	20	xx	26	07	Penyusunan Peraturan daerah Kab. Rembang	Meningkatnya mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Perda	100	Bag. Hukum	200,000,000
1	20	xx	26	08	Sosislaisasi Perda	Tersosialisasinya Perda pada 14 kecamatan	100	Bag. Hukum	81,000,000
1	20	xx	26	09	penyuluhan Hukum	Terlaksannaya penyuluhan hukum pada 10 desa	100	Bag. Hukum	118,000,000
1	20	xx	26	10	peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum	Terwujudnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum	100	Bag. Hukum	81,570,000
1	20	xx	26	11	Rakor Aparat Penegak Hukum	Terciptanya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam profesionalisme dan etika kerja	100	Bag. Hukum	30,000,000
1	20	xx	26	12	Forum Ran Ham	Terwujudnya aksi dalam menghargai dan melindungi HAM	100	Bag. Hukum	50,000,000
1	20	xx	26	13	penggalan Hukum Adat Kab. Rembang	Diketahuinya hukum adat di Kab. Rembang	100	Bag. Hukum	15,000,000
1	20	xx	26	14	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah	Terwujudnya Kepastian hukum terhadap aparat	100	Bag. Hukum	100,000,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF	
				JUMLAH RENJA				675,570,000	
				KEKAYAAN DAERAH					
1	20	xx	32	01	Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan Pemerintah Daerah	Peningkatan pengembangan SDM aparatur pengelola barang daerah	100	Bag. KD	75,000,000
1	20	xx	32	02	Penyusunan Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	Peningkatan pengembangan SDM aparatur pengelola barang daerah	100	Bag. KD	15,000,000
1	20	xx	32	03	Penyusunan standardisasi sarana dan perlengkapan Pemerintah daerah	Peningkatan pengembangan SDM aparatur pengelola barang daerah	100	Bag. KD	20,000,000
1	20	xx	33	01	Pengadaan, pemnyimpanan, penyaluran barang daerah (Mebelair)	Peningkatan pengelolaan barang daerah	100	Bag. KD	250,000,000
1	20	xx	33	02	Pengadaan, pemnyimpanan, penyaluran barang daerah (komputer)	Peningkatan pengelolaan barang daerah	100	Bag. KD	100,000,000
1	20	xx	33	03	Pengamanan barang daerah (Pensertifikatan tanah)	Peningkatan pengelolaan barang daerah	100	Bag. KD	50,000,000
1	20	xx	33	04	Pengamanan barang daerah (Pengadaan papan label tanah)	Peningkatan pengelolaan barang daerah	100	Bag. KD	40,000,000
1	20	xx	33	05	Pengadaan truk untuk operasional satpol PP	Peningkatan sarpras	100	Bag. KD	150,000,000
1	20	xx	34	01	Fasilitasi dan pembinaan administrasi pengelolaan barang daerah	Peningkatan kesejahteraan pemegang dan pengurus barang	100	Bag. KD	50,000,000
1	20	xx	34	02	Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barang daerah (Aplikasi SIMBADA)	Pengembangan aplikasi Simbada	100	Bag. KD	100,000,000
1	20	xx	34	03	Penyelenggaraan inventarisasi, pendataan dan sensus barang daerah (Penilaian Barang daerah)	Tersusunnya neraca barang daerah	100	Bag. KD	100,000,000
				JUMLAH RENJA				950,000,000	
				BAGIAN PEREKONOMIAN					
1	16	xx	15	12	Promosi Indonesia Produk Ekspor	Adanya permintaan ekspor produk yang dipamerkan	100	Bag. Perekonomian	45,000,000
				14	Promosi HUT Jateng	Meningkatkan kualitas produk	100	Bag. Perekonomian	53,500,000
				15	pembuatan Leaflet	menciptakan pemasaran produk unggulan daerah	100	Bag. Perekonomian	24,000,000
				16	Promosi Soropadan Agro Expo 2007	Adanya permintaan produk saprotan dan hasil pertanian yang dipamerkan	100	Bag. Perekonomian	40,000,000
1	16	xx	16	10	Bantuan Dekranasda Kab. Rembang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk kerajinan	100	Bag. Perekonomian	100,000,000
				11	Rakor teknis pengembangan ekonomi daerah	Identifikasi permasalahan perekonomian daerah sebagai input pengambilan kebijakan	100	Bag. Perekonomian	30,000,000
				12	Seminar / lokakarya peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya kemampuan SDM dalam usaha peningkatan ekonomi daerah	100	Bag. Perekonomian	20,000,000
				13	Rakor pengembangan BUMD	Identifikasi permasalahan dan potensi BUMD sebagai input pengambilan kebijakan	100	Bag. Perekonomian	30,000,000
				14	Evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi daerah	Pencapaian kinerja ekonomi daerah	100	Bag. Perekonomian	15,000,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
			15	Analisis perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah	Tersedianya data kondisi ekonomi eksisting dan bahan rumusan kebijakan	100	Bag. Perekonomian	15,000,000
			16	Audit Internal Perusda	Mengetahui tingkat kesehatan dan perkembangan perusda	100	Bag. Perekonomian	50,000,000
1	16	xx	18	01 Pembinaan dan pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Tanah di Kab. Rembang	Tersedianya BBMT bagi masyarakat	100	Bag. Perekonomian	57,000,000
1	16	xx	18	02 Operasional Komisi Pengawasan Pupuk Kabupaten	Tersedianya pupuk bersubsidi bagi petani	100	Bag. Perekonomian	35,000,000
2	01	xx	16	33 Operasional Program DPM - LUEP	Tercapainya harga pembelian gabah / beras petani sesuai HP	100	Bag. Perekonomian	35,000,000
2	01	xx	16	34 Pemetaan rawan pangan	Tersedianya data dan terpantaunya keadaan rawan pangan	100	Bag. Perekonomian	15,000,000
2	01	xx	16	35 Operasional dan Monitoring distribusi beras miskin (Raskin) Kabupaten Rembang	Meningkatnya arah distribusi RASKIN hanya untuk keluarga miskin	100	Bag. Perekonomian	17,500,000
2	01	xx	16	36 Operasional Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kab. Rembang	Peningkatan arah koordinasi Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kab. Rembang	100	Bag. Perekonomian	30,000,000
2	01	xx	16	37 Panel harga bahan pangan dan EWS	Deteksi dini ketersediaan bahan pangan	100	Bag. Perekonomian	20,000,000
2	01	xx	16	38 Penyelenggaraan pasar murah	Meringankan beban kebutuhan sembako	100	Bag. Perekonomian	60,000,000
				Jumlah Renja				692,000,000
				BAG. PENGENDALIAN PROGRAM				
1	20	xx	22	03 Penyusunan LAKIP di Kabupaten Rembang	Dinas/Instansi	75 buku	Bag. Dalgram	100,000,000
1	20	xx	22	04 Pelaksanaan Pengendalian Program di Kab. Rembang	Rekanan / pengguna anggaran	250 keg	Bag. Dalgram	100,000,000
1	20	xx	22	05 Pemantauan & Laporan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Rekanan / dinas/ Pengusaha	250 keg	Bag. Dalgram	20,000,000
1	20	xx	22	06 Penyelenggaraan Bintel Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	PPK / Panitia Pengadaan dan Pengguna Anggaran	450 peserta	Bag. Dalgram	180,000,000
1	20	xx	22	07 Penyelenggaraan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Pengguna Anggaran / rekanan	250 keg	Bag. Dalgram	183,138,000
1	20	xx	22	08 Penyelenggaraan pembinaan dan registrasi usaha jasa pelaksana knstruksi	Rekanan	150 rekanan	Bag. Dalgram	50,000,000
				Jumlah Renja				633,138,000
				BAG. UMUM				
1	20	xx	23	02 Penyusunan Buku Kodefikasi surat menyurat	Tersedianya buku pedoman kodefikasi surat	100	Bag. Umum	30,000,000
1	20	xx	28	01 Rehab Musium RA. Kartini di kompleks rumah dinas Bupati	Adanya musium Kartini yang penuh daya tarik pengunjung	100	Bag. Umum	100,000,000
1	20	xx	28	02 Pembuatan Biorama RA. Kartini	Tersedianya Biorama RA. Kartini yang menarik pengunjung musium	100	Bag. Umum	100,000,000
1	20	xx	38	05 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan Kordeyn 1 unit; AC 3 PK 2 unit; closet 1 unit	100	Bag. Umum	150,000,000
1	20	xx	38	06 Pengadaan Instalasi air di komplek rumah dinas Bupati	Tersedianya instalasi air yang baik di komplek Rumdin Bupati	100	Bag. Umum	100,000,000
1	20	xx	38	07 Pengadaan perlengkapan gedung Balai Kartini dan Aula Lt. 4 Setda	Sound system 1 unit; AC 5 PK 6 unit; LCD 1 unit; layar 2 buah	100	Bag. Umum	190,000,000
1	20	xx	38	08 Pengadaan alat komunikasi Repiter santel	Tersedianya alat komunikasi repiter yang baru	100	Bag. Umum	75,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	20	xx	38	10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (gedung arsip	Tersedianya kelengkapan gedung arsip yang standart	100	Bag. Umum	30,000,000
1	20	xx	38	11	Pemeliharaan rutin/berkala garasi Setda	Terselesaikannya bangunan garasi kantor Setda	100	Bag. Umum	30,000,000
					JUMLAH RENJA				805,000,000
					BAGIAN KEUANGAN				
1	20	xx	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	SKPD	100	Bag. Keu	50,000,000
1	20	xx	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (TA. 2007)	SKPD	100	Bag. Keu	48,000,000
1	20	xx	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD (TA. 2007)	SKPD	100	Bag. Keu	48,000,000
1	20	xx	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (TA. 2006)	SKPD	100	Bag. Keu	35,000,000
1	20	xx	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	SKPD	100	Bag. Keu	34,200,000
1	20	xx	38	09	Pengadaan Komputer Note Book	Peningkatan kinerja	100	Bag. Keu	23,800,000
					Jumlah Renja				239,000,000
					SETWAN				
					ADMINISTRASI KANTOR				578,456,000
1	20	xx	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah (non APBD)		100	Setwan	471,000,000
1	20	xx	15	02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama (Koordinasi, Konsultasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan)		100	Setwan	245,000,000
1	20	xx	15	05	Kegiatan Reses		100	Setwan	1,042,591,000
1	20	xx	15	06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam jawa dan luar jawa)		100	Setwan	720,827,500
1	20	xx	15	09	Fungsi pengawasan	45 orang	100	Setwan	252,000,000
1	20	xx	15	10	Pengembangan SDM (Diklat Teknis)		100	Setwan	535,000,000
1	20	xx	15	11	Pengembangan SDM (Seminar Tk. Provinsi)		100	Setwan	89,200,000
1	20	xx	15	12	Pengembangan SDM (Seminar Tk. Nasional)		100	Setwan	154,500,000
1	20	xx	15	13	Penerbitan Majalah Triwulan		100	Setwan	80,278,000
1	20	xx	15	14	Pembahasan LKPJ Bupati		100	Setwan	15,313,100
1	20	xx	15	15	Kegiatan Fungsi Anggaran		100	Setwan	267,658,600
1	20	xx	15	16	Penggantian anggota DPRD antar waktu		100	Setwan	27,891,600
1	20	xx	15	17	Pemilihan dan pelantikan wakil Ketua		100	Setwan	4,965,400
1	20	xx	15	18	Pidato Kenegaraan		100	Setwan	5,497,800
1	20	xx	15	19	Entre Dok. Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi Hukum		100	Setwan	116,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	20	xx	38	16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelaksanaan tugas	100	Setwan	45,000,000
					JUMLAH RENJA				4,072,723,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				152,132,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				4,803,311,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				686,050,000
					JUMLAH				5,489,361,000
					DISPENLOPAS				
					Program Wajib di SKPD	Dispenlopas			286,353,000
1	03	xx	16	05	Pembuatan saluran Pasar Buah Lasem	Kenyamanan pedagang	90	Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	09	Perbaikan Pasar Desa Tegaldowo Kec. Gunem (pembangunan 5 kios)	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	90,000,000
1	03	xx	30	10	Perbaikan Pasar Desa Tegaldowo Kec. Gunem (pembangunan 17 tiang pancang)	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	60,000,000
1	03	xx	30	11	Perbaikan Pasar Desa Sluke kEc. Sluke	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	100,000,000
1	03	xx	30	12	Perbaikan Pasar Desa Sale Kec. Sale	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	13	Perbaikan Pasar Desa Bulu Kec. Bulu	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	14	Perbaikan Pasar Desa Krikilan Kec. Sumber	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	100,000,000
1	03	xx	30	15	Perbaikan Pasar Desa Kepohagung Kec. Pamotan	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	100,000,000
1	03	xx	30	16	Perbaikan Pasar Desa Mrayun Kec. Sale	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	17	Perbaikan pasar Desa Tireman Kec. Rembang	Kenyaman pedagang dan pemberdayaan pasar desa		Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	18	Pemeliharaan pasar - pasar daerah Kab. Rembang	Pemeliharaan pasar se Kab. Rembang (12 pasar)	90	Dispenlopas	90,000,000
1	03	xx	30	19	Penataan pasar Hewan lasem	Kenyaman pedagang	90	Dispenlopas	75,000,000
1	03	xx	30	20	Pembuatan pagar keliling pasar Sulang	Peningkatan keamanan pasar dan kenyamanan pedagang	90	Dispenlopas	60,000,000
1	03	xx	30	21	Pembuatan pagar pasar hewan Pamotan	Peningkatan keamanan pasar dan kenyamanan pedagang	90	Dispenlopas	18,000,000
1	03	xx	30	22	Perbaikan / pengaspalan jalan pasar	Arus lalu lintas dari / ke pasar lancar	100	Dispenlopas	30,000,000
1	03	xx	30	23	Perbaikan tempat bongkar muat pasar pamotan	Aktifitas bongkar muat lancar	100	Dispenlopas	50,000,000
1	03	xx	30	24	Pembuatan kios pasar Lasem	Peningkatan keamanan pasar dan kenyamanan pedagang	90	Dispenlopas	100,000,000
1	03	xx	30	25	Perbaikan / pavingisasi halaman pasar Kragan	Kenyaman pedagang	90	Dispenlopas	90,000,000
1	03	xx	30	26	Pembangunan Pasar sarang	Kenyamanan pedagang dan peningkatan PAD		Dispenlopas	250,000,000
1	03	xx	30	27	Pembangunan los Pasar Sedan	Kenyamanan pedagang dan peningkatan PAD		Dispenlopas	100,000,000
1	03	xx	30	28	Perbaikan Pasar Lasem untuk mengalokasikan pedagang dari Pasar karangturi	Tempat penampungan pedagang		Dispenlopas	50,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	20	xx	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	Pemberian insentif terhadap desa yang telah melunasi PBB sebelum jatuh tempo	70	Dispenlopas	310,400,000
1	20	xx	17	20	Pemeliharaan Bsis data pola SISMIOP di Kecamatan sarang dan Kragan	Verifikasi data obyek dan subyek PBB di Kecamatan sarang dan Kragan	100	Dispenlopas	400,000,000
1	20	xx	38	17	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemasangan dan pengadaan instalasi listrik Pasar sarang dan Pasar Magersari)	Kenyamanan Pedagang	90	Dispenlopas	25,000,000
1	20	xx	38	18	Pengadaan alat komunikasi di pasar - pasar daerah se - Kab. Rembang	Pasar - pasar daerah	90	Dispenlopas	26,000,000
1	20	xx	38	19	Pengadaan komputer	Peningkatan kinerja aparat	90	Dispenlopas	50,000,000
1	20	xx	38	20	Pewangunan Kantor Pasar Babagan Kec, Lasem	Peningkatan kinerja aparat	90	Dispenlopas	50,000,000
1	20	xx	38	21	Penataan Tempat pembayaran	Kenyamanan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi	90	Dispenlopas	40,000,000
1	20	xx	38	22	Pembangunan gudang inventaris kantor Dispenlopas	Tersimpannya inventaris kantor dengan baik dan aman	100	Dispenlopas	75,000,000
					Jumlah Renja				2,589,400,000
					Jumlah Tenaga Kontrak				794,640,000
					Jumlah Belanja Langsung				3,670,393,000
					Jumlah Belanja Tidak Langsung				3,015,400,000
					Jumlah Total SKPD				6,685,793,000
					BAWASDA				
					BELANJA ADMINISTRASI KANTOR				284,275,000
1	20	xx	20	02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan khusus/kasus)	Terwujudnya Aparatur yang bersih		Bawasda	125,000,000
1	20	xx	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan)	Meningkatnya ketaatan aparatur terhadap peraturan perundangan		Bawasda	185,000,000
1	20	xx	20	09	Gelar Pengawasan daerah	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan		Bawasda	10,000,000
1	20	xx	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Penyeritaan Diklat /kursus BinteK dan seminar)	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan		Bawasda	30,000,000
1	20	xx	21	03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan		Bawasda	20,000,000
1	20	xx	38	01	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pengawasan		Bawasda	40,000,000
1	20	xx	38	02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (dan aula)	Meningkatnya umur ekonomi bangunan dan memelihara keindahan serta kenyamanan)		Bawasda	20,000,000
					JUMLAH RENJA				430,000,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				5,280,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				719,555,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,107,510,000
					JUMLAH				1,827,065,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					BAPPEDA				
					Program wajib SKPD			BAPPEDA	416,982,000
1	05	xx	15	16	Studi Kelayakan Kasiba dan Lisiba di Kab. Rembang	Tersedianya Kasiba dan Lisiba di Kec. Rembang, Sulang dan sarang	100	Bappeda	150,000,000
1	05	xx	16	10	Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Kab. Rembang	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang antar daerah	100	Bappeda	25,000,000
1	05	xx	16	11	Badan Kebijakan Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman (BKP4K) Kab. Rembang	Terselenggaranya koordinasi penataan perumahan dan permukiman	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data ISE,RDA,KCA,PDRB,IHK	100	Bappeda	100,000,000
1	06	xx	15	06	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Rembang	Tersedianya data dan informasi profil daerah	100	Bappeda	75,000,000
1	06	xx	16	03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga (FEDEP)	Peningkatan kewirausahaan bidang industri	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	16	06	Pendampingan Pelaksanaan Program PLAN	Tersalurnya dana bantuan ke desa Dampingan PLAN	100	Bappeda	75,000,000
1	06	xx	16	07	Advokasi kegiatan pembangunan SDM Dini oleh FPP SDM Dini	Tersalurnya bantuan keuangan ke LSM FPP SDM Dini	100	Bappeda	35,000,000
1	06	xx	16	08	Fasilitasi dan koordinasi peningkatan program pembangunan SDM Dini	Peningkatan SDM, Monev program dan kegiatan	100	Bappeda	75,000,000
1	06	xx	18	05	Studi Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2009 - 2010	Dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Perdesaan 2009 - 2010	100	Bappeda	200,000,000
1	06	xx	19	12	Pendampingan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NUSSP)	Terselenggaranya koordinasi pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman kumuh	100	Bappeda	75,000,000
1	06	xx	19	13	Penyusunan Master Plan Persampahan Kab. Rembang	Tersedianya Master Plan Persampahan	100	Bappeda	175,000,000
1	06	xx	20	01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Peningkatan SDM aparat perencana	100	Bappeda	100,000,000
1	06	xx	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Pemahaman masyarakat terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	21	02	Penyusunan rancangan RPJPD	Dokumen RPJPD Kab. Rembang Tahun 2006 - 2026	100	Bappeda	240,000,000
1	06	xx	21	03	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD	Keterpaduan perencanaan top down dan bottom up	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	21	04	Penetapan RPJPD	Perda RPJP Kab. Rembang 2006 - 2026	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	RKPD 2008 dan Ranc. Awal RKPD 2009	100	Bappeda	150,000,000
1	06	xx	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Musrenbang Kec 14 kali, Forum Gabungan dan Musrenbang Kab.	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	21	10	Penetapan RKPD	Perbuk RKPD Tahun 2008	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	21	14	Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2008	Tersusunnya KUA dan PPAS	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	21	15	Safeguarding DAK bidang prasarana wilayah, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan dan kelautan serta lingkungan hidup	Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi program DAK	100	Bappeda	25,000,000
1	06	xx	21	16	Pendampingan Program TMMD Sengkuyung I dan II	Penyuluhan dalam bidang Bela negara, Keagamaan, Ketrampilan, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.	100	Bappeda	80,000,000
1	06	xx	21	17	Penyusunan dan sosialisasi Protap PBP Penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi	Wilayah rawan bencana	100	Bappeda	150,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	06	xx	21	18	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Penyusunan LKPJ Tahun 2006	Monev program/kegiatan yangbersumber dari APBD Kab, APBD Prov dan APBN serta program / kegiatan Bappeda tahun sebelumnya	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	22	08	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPK	Peningkatan sarpras dan Simpan pinjam masyarakat penerima program	100	Bappeda	1,100,000,000
1	06	xx	22	09	Pendampingan PPK	Optimalisasi pelaksanaan PPK	100	Bappeda	310,000,000
1	06	xx	22	10	Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (Sibermas)	Peningkatan ketrampilan pengrajin	100	Bappeda	75,000,000
1	06	xx	22	11	BLM Replikasi P2KP	Peningkatan permodalan masyarakat miskin	100	Bappeda	1,125,000,000
1	06	xx	22	12	Pendampingan p2KP	Optimalisasi pelaksanaan P2KP	100	Bappeda	238,700,000
1	06	xx	22	13	Revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan (RPPK)	Peningkatan sarpras dan infrasrktur pertanian	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Peningkatan pelayanan sosial dan budaya	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	24	04	Kajian pemanfaatan sumber daya alam dalam proses pembuatan pupuk majemuk di Kab. Rembang	Penyusunan alternatif penggunaan pupuk pertanian	100	Bappeda	100,000,000
1	06	xx	24	06	Pendampingan kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP)	Terselenggaranya pengelolaan SDA dan irigasi dengan baik di Kab. Rembang	100	Bappeda	60,000,000
1	06	xx	24	07	Studi Potensi Gas Biogenetik (Shallow Gas) Perairan Kab. Rembang	Teridentifikasinya potensi gas Biogenetik (Shallow Gas) Perairan Kab. Rembang	100	Bappeda	298,825,000
1	06	xx	24	08	Studi potensi Air permukaan di Kab. Rembang	Teridentifikasinya potensi air permukaan di wilayah Kab. Rembang	100	Bappeda	300,000,000
1	06	xx	24	09	BOP PAMSIMAS	Tercukupinya pemenuhan pelayann air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	100	Bappeda	50,000,000
1	06	xx	24	10	BOP Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)		100	Bappeda	25,000,000
					JUMLAH RENJA				5,812,525,000
					TENAGA KONTRAK				67,432,000
					BELANJA LANGSUNG				6,296,939,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,121,590,000
					JUMLAH				7,418,529,000
					KESBANGLINMAS				
					ADMINISTRASI KANTOR				SEMULA
									152,694,000
1	19	xx	16	06	Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait	Kamtobmas	80	Kesbang Linmas	55,000,000
1	19	xx	16	07	Monitoring / pengawasan kegiatan penelitian / survey	Penel:iti/petugas survey	80	Kesbang Linmas	30,000,000
1	19	xx	16	08	Pendataan ulang dan pemantauan orang asing	orang asing	90	Kesbang Linmas	20,000,000
1	19	xx	16	09	Pengawasan dan pencegahan Paham komunis dan paham lain	Masyarakat	90	Kesbang Linmas	25,000,000
1	19	xx	17	04	Forkomkon	Toma Tomas	100	Kesbang Linmas	50,000,000
1	19	xx	17	05	Dialog fungsi dan peran Ormas	Ormas	100	Kesbang Linmas	40,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	19	xx	17	06	Temu muka generasi muda dengan pejuang 1045	Pemuda / pelajar	100	Kesbang Linmas	40,000,000
1	19	xx	17	07	Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama (FKUB)	Tokoh agama	100	Kesbang Linmas	25,000,000
1	19	xx	17	08	Ceramah Kewaspadaan Nasional (CERPADNAS)	Toma,Tomas, Pelajar	100	Kesbang Linmas	50,000,000
1	19	xx	17	09	Peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Toma , Tomas, parpol	100	Kesbang Linmas	30,000,000
1	19	xx	17	10	Peningkatan kemampuan dan kesadaran Bela Negara	Toma, Tomas Pemuda	100	Kesbang Linmas	30,000,000
1	19	xx	19	02	Pengiriman anggota Hansip / Linmas ke Diklat ketrampilan di Provinsi	Anggota Hansip/Linmas	100	Kesbang Linmas	50,000,000
1	19	xx	19	03	Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan	Anggota Hansip/Linmas Dinas, Instansi Matrik Kec/Kab.	100	Kesbang Linmas	44,000,000
1	19	xx	19	04	Kegiatan pembinaan anggota Hansip/Linmas	Anggota Hansip/Linmas di 14 Kec.	100	Kesbang Linmas	30,000,000
1	19	xx	19	05	Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam rangka HUT Hansip/Linmas dan TMMD Sengkuyung	Tertindaknya HUT Hansip / Linmas	100	Kesbang Linmas	44,000,000
1	19	xx	20	09	Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat	Masyarakat	100	Kesbang Linmas	40,000,000
1	19	xx	20	10	Monitoring dan evaluasi bahaya penyakit masyarakat	Masyarakat/generasi muda	85	Kesbang Linmas	30,000,000
1	19	xx	21	06	Penelitian persyaratan permohonan bantuan Partai Politik	Parpol yang memiliki perwakilan legeslatif	100	Kesbang Linmas	15,000,000
1	19	xx	21	07	bantuan Parpol	Parpol yang memiliki perwakilan legeslatif	100	Kesbang Linmas	675,000,000
1	19	xx	21	08	pendidikan Budaya Politik	Masyarakat / generasi muda	100	Kesbang Linmas	50,000,000
1	19	xx	22	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tertindaknya pengadaan sarana Satlak PBP	100	Kesbang Linmas	90,000,000
1	19	xx	22	05	Penanganan / penanggulangan bencana di Kab. Rembang	masyarakat, anggota Satlak PBP	100	Kesbang Linmas	60,000,000
1	19	xx	22	06	Bantuan sarana Poskamling pemenang lomba Desa / kelurahan se-Kab. Rembang	pemenang lomba Desa / Kelurahan	100	Kesbang Linmas	25,000,000
					JUMLAH RENJA				1,548,000,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				19,886,000
					BELANJA LANGSUNG				1,720,580,000
					BELANJA TDK LANGSUNG				738,500,000
					JUMLAH				2,459,080,000
KANTOR PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN PDE									
					Program wajib di SKPD (14 program)	Parsip PDE			401,255,000
1	01	xx	21	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Peningkatan kualitas perpustakaan desa / kelurahan di 14 Kecamatan	100	Parsip PDE	50,000,000
1	01	xx	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca	Peningkatan minat baca masyarakat	100	Parsip PDE	25,000,000
1	24	xx	15	01	Pembangunan data base informasi kearsipan	Pembangunan SIM informasi kearsipan; Penyusunan database arsip statis (15.000 berkas); Alihmedia arsip dalam bentuk digital	100	Parsip PDE	80,000,000
1	24	xx	15	08	Pendataan dan penataan dokumen / arsip daerah	Pengelolaan arsip in aktif di Kab. Rembang hasil akuisisi (16.000 berkas)	100	Parsip PDE	120,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	25	xx	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Rekaman data pokok dari SKPD di jajaran Pemda kedalam 100 buah buku dan CD	100	Parsip PDE	25,000,000
1	25	xx	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Penambahan dan penyempurnaan infrastruktur jaringan wireless LAN di SKPD ; Operasionalisasi di maintenance Wave LAN Kab. Rembang	100	Parsip PDE	450,000,000
1	25	xx	15	06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	SIM jaringan data ; SIM pelayanan perpustakaan	100	Parsip PDE	50,000,000
1	25	xx	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	100 pembantu pemegang kas gaji dan 50 opeartor komputer	100	Parsip PDE	50,000,000
1	25	xx	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (melalui website)	Pembuatan konten 5 sub domain web site (SKPD)	100	Parsip PDE	50,000,000
					JUMLAH RENJA				900,000,000
					TENAGA KONTRAK				68,063,000
					BELANJA LANGSUNG				1,369,318,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,008,090,000
					JUMLAH				2,377,408,000
					BKBPM				
					Program wajib di SKPD (14 program)	BKBPM			173,752,750
1	11	xx	16	10	Penguatan Pkjanal Posyandu	Pokjanal	100	BKBPM	250,000,000
1	11	xx	16	11	PMT-AS	murid TK/RA	100	BKBPM	313,000,000
1	11	xx	16	12	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	Anak	100	BKBPM	40,000,000
1	11	xx	16	13	P2MBG	Kelompok kerja	100	BKBPM	75,000,000
1	11	xx	16	14	Penguatan Forum PUG	Kader	100	BKBPM	25,000,000
1	11	xx	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Korban kekerasan	100	BKBPM	60,000,000
1	11	xx	17	10	Olah kerja manajemen KHPPA	Masyarakat	100	BKBPM	50,000,000
1	11	xx	18	02	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	70 KK desa binaan PKK	100	BKBPM	85,000,000
1	11	xx	18	03	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Pokjanal Tribina	100	BKBPM	80,000,000
1	11	xx	18	04	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Masyarakat mitra	100	BKBPM	70,000,000
1	12	xx	15	02	Pelayanan KIE	Masyarakat	100	BKBPM	33,000,000
1	12	xx	15	03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Pengelola Program KB	100	BKBPM	15,000,000
1	12	xx	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Institusi Masyarakat Pedesaan (294 PPKBD dan 1000 sub PPKBD	100	BKBPM	100,000,000
1	12	xx	15	07	KB Integrasi Bhayangkara, TNI, KB	PUS dan peserta KB	100	BKBPM	30,000,000
1	12	xx	15	08	Operasional Petugas Lapangan KB	Pengelola Program KB	100	BKBPM	66,000,000
1	12	xx	15	09	Pengelolaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi	Pengelola gudang	100	BKBPM	12,000,000
1	12	xx	15	10	Pendataan Keluarga dan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga)	Keluarga (162.000 KK)	100	BKBPM	294,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	12	xx	16	02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Anggola Saka Kencana (150 anggota)	100	BKBPM	15,000,000
1	12	xx	17	01	Pelayanan konseling KB	PPM KB Baru 11.989; PPM KB Aktif 106.407	100	BKBPM	50,000,000
1	12	xx	17	03	Pengadaan alat kontrasepsi	24.000 pil KB	100	BKBPM	65,000,000
1	12	xx	17	04	Pelayanan KB medis operasi	50 calon KB Baru MO	100	BKBPM	15,000,000
1	12	xx	17	05	Pelayan Pencabutan implant	600 peserta KB implant	100	BKBPM	45,000,000
1	12	xx	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Kelompok Prio Utomo	100	BKBPM	10,000,000
1	12	xx	20	02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	PIK	100	BKBPM	60,000,000
1	22	xx	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pengurus LPMD dan Kader KB	100	BKBPM	24,000,000
1	22	xx	15	04	Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan	Desa / Kelurahan unggulan	100	BKBPM	58,000,000
1	22	xx	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	14 kelompok	100	BKBPM	55,000,000
1	22	xx	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	294 Desa	100	BKBPM	30,000,000
1	22	xx	16	08	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	14 kelompok	100	BKBPM	65,000,000
1	22	xx	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Masyarakat	100	BKBPM	20,000,000
1	22	xx	17	05	Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (TMMD)	Desa	100	BKBPM	480,000,000
1	22	xx	17	06	Pembinaan Kelompok Bina Lingkungan Keluarga Sejahtera (BLKS)	70 KK	100	BKBPM	85,000,000
1	22	xx	17	07	Pemberian stimulan pembangunan desa (Desa kritis)	1 desa kritis	100	BKBPM	25,000,000
					JUMLAH				2,700,000,000
					TENAGA KONTRAK				17,258,000
					BELANJA LANGSUNG				2,891,010,750
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,717,515,000
					JUMLAH				6,608,525,750
					BKD				
					Program wajib di SKPD (14 program)				294,558,000
1	21	xx	15	06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Aparatur dan non aparatur (publik)	250 orang	BKD	35,500,000
1	21	xx	16	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah (Gol I,II,III)	CPNSD formasi Tahun 2005 Gol. I,II,III	CPNS Gol I 76; II 302; III 246	BKD	400,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	21	xx	16	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	PNS pejabat Eselon IV,III dan II	Diklatpim IV 40 ; Diklatpim III 10 ; Diklatpim II 5	BKD	300,000,000
1	21	xx	17	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Pelamar umum dan tenaga kontrak yang memenuhi persyaratan	10.000 orang	BKD	300,000,000
	21	xx	17	03	Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar	Banyaknya PNS yang memenuhi persyaratan	20 orang	BKD	3,000,000
1	21	xx	17	05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Data kepegawaian PNS se-Kab. Rembang		BKD	45,000,000
1	21	xx	17	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Praja IPDN; PNS dilingkungan Pemkab Rembang yang memenuhi persyaratan	29 orang	BKD	100,000,000
1	21	xx	17	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Lulusan SMA yang memenuhi persyaratan	90 orang	BKD	5,000,000
1	21	xx	17	17	Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS	PNS di lingkungan Pemkab Rembang	Ujian dinas 50 orang; Ujian PI 50 orang	BKD	13,500,000
1	21	xx	17	18	Pemberian tali asih bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun	PNS yang pensiun pada batas usia pensiun	200 orang	BKD	765,000,000
1	21	xx	17	19	Penerbitan SK pengangkatan CPNS menjadi PNS	CPNS dilingkungan Pemkab Rembang	1200 orang	BKD	30,000,000
1	21	xx	17	20	Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah janji PNS	PNS yang belum diambil sumpah janji	1200 orang	BKD	22,500,000
1	21	xx	17	21	Penataan administrasi tenaga kontrak	Tenaga kontrak Kab. Rembang	1407 orang	BKD	10,000,000
1	21	xx	17	22	Pengurusan SK pensiun PNS Pemkab Rembang	PNS Pemkab Rembang yang usul pensiun	200 orang	BKD	45,000,000
1	21	xx	17	23	Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pemkab Rembang	PNS pejabat struktural dan fungsional Pemkab Rembang	4 kali	BKD	40,000,000
1	21	xx	17	24	Penyelenggaraan sidang baperjakat	Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan KP PNS Pemkab Rembang	12 kali	BKD	49,000,000
1	21	xx	17	25	Inventarisasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Rembang	Data PNS Pemkab Rembang	15 buku	BKD	7,500,000
1	21	xx	17	26	Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya	PNS yang telah mengabdikan selama 10, 20 dan 30 tahun	190 orang	BKD	65,000,000
1	21	xx	17	27	Pemeriksaan kesehatan PNS	Pati dan Semarang	5 orang	BKD	7,500,000
1	21	xx	17	28	Bimbingan Konseling	PNS dan keluarganya	50 orang	BKD	25,000,000
1	21	xx	17	29	Penyusunan formasi	PNS Kab. Rembang	50 SKPD	BKD	12,000,000
1	21	xx	17	30	Pengurusam Kenaikan Pangkat dan gaji berkala PNS di lingkungan Pemkab Rembang	PNS se Kab. Rembang	3046 orang	BKD	105,000,000
1	21	xx	17	31	Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu taspen	PNS yang belum mempunyai Karis / Karsu, Karpeg dan kartu taspen	700 orang	BKD	12,500,000
1	21	xx	17	32	Penyelesaian kasus dan pembinaan apel	PNS yang bermasalah	30 orang	BKD	30,000,000
1	21	xx	17	33	Bantuan Perumahan PNS di lingkungan Pemkab Rembang	PNS Kab. Rembang	150 orang	BKD	485,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
	21	xx	17	34	Rakor BKD dengan SKPD se Kab. Rembang tentang pelaksanaan aturan kepegawaian dan tertib administrasi kepeg	koordinas dengan SKPD se Kab. Rembang	720	BKD	35,000,000
	21	xx	18	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan	1 unit	BKD	29,800,000
					JUMLAH RENJA				2,977,800,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				71,268,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				3,343,626,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,464,335,000
					JUMLAH				6,807,961,000
					SATPOL PP	selesai			
					Program wajib di SKPD (14 program)				347,752,000
1	19	xx	19	06	Patroli Kamtibmas	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	45,000,000
1	19	xx	19	07	Peningkatan Pengamanan Daerah dan pembinaan desa rawan konflik	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	21,000,000
1	19	xx	19	08	Pengamanan kunjungan tamu	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	10,000,000
1	19	xx	19	09	Penyuluhan / Sosialisasi PKL	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	3,000,000
1	19	xx	19	10	Penertiban penambangan galian C	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	13,000,000
1	19	xx	19	11	Pengawasan dan penertiban ternak potong	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	10,000,000
1	19	xx	19	12	Pengamanan Pilkada Provinsi , Pilkadaes Kabupaten Rembang dirubah menjadi Pam Pilkadaes Kab Rembang	Masyarakat seluruh wilayah Kab. Rembang		Satpol PP	35,000,000
1	19	xx	23	01	Operasi Penegakan Perda	Badan hukum/ Instansi / perorangan yang melanggar Perda		Satpol PP	44,000,000
1	19	xx	23	02	Sosialisasi Penegakan Perda	Masyarakat pengguna / yang terkena obyek Perda		Satpol PP	30,000,000
1	19	xx	23	03	Operasi Penegakan disiplin PNS dan Siswa	PNS dan siswa se Kab. Rembang yang melanggar disiplin		Satpol PP	50,000,000
1	19	xx	23	04	Pengawasan aset - aset tidak bergerak milik Pemda yang dikuasai pihak ketiga	Barang - barang tidak bergerak milik Pemda yang dikuasai/ditempati pihak Ketiga		Satpol PP	7,000,000
1	19	xx	23	05	Pembongkaran reklame	Reklame yang tidak berijin/reklame yang sudah habis masa berlakunya		Satpol PP	13,000,000
1	19	xx	23	06	Penertiban PGOT dan razia pelacuran	Tuna wisma, orang gila, pelacur, pengemis yang berada di perkotaan		Satpol PP	30,000,000
1	19	xx	23	07	Pembinaan Penegakan Perda dan keamanan, ketertiban melalui media elektronik (radio)	Masyarakat / warga yang berada di kab. Rembang		Satpol PP	5,000,000
1	19	xx	23	08	Pengawasan dan penegakan hukum peredaran miras dan ijin HO	Kegiatan usaha yang tidak mempunyai perijinan / habis masa berlakunya dan pengendalian peredaran miras		Satpol PP	20,000,000
1	19	xx	23	09	Peningkatan dan pemberdayaan aparat hukum dalam penegakan Perda	Aparat penegak Peraturan daerah (PPNS)		Satpol PP	15,000,000
1	19	xx	24	01	Pengadaan mebeleur	Peningkatan sarpras kantor		Satpol PP	25,000,000
1	19	xx	24	02	Pengadaan Sarpras Operasi Yustisi	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas		Satpol PP	35,000,000
1	19	xx	24	03	Pengadaan komputer	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas		Satpol PP	33,000,000
1	19	xx	24	04	Pengadaan Repiter (alat komunikasi penguat sinyal)	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas		Satpol PP	60,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	19	xx	24	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)	Peningkatan sarpras kantor		Satpol PP	22,500,000
1	19	xx	24	06	Pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL)	Peningkatan sarpras kantor		Satpol PP	24,500,000
1	19	xx	24	07	Bimbingan dan latihan Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	80,000,000
1	19	xx	24	08	Diklat PPNS	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	60,000,000
1	19	xx	24	09	Diklat Gak Kum	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	6,000,000
1	19	xx	24	10	Diklat Beracara	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	6,000,000
1	19	xx	24	11	Diklat Bendaharawan	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	6,000,000
1	19	xx	24	12	Studi banding Satpol PP di Kab. Jembrana Prov. Bali	Peningkatan kualitas SDM Satpol PP yang trampil		Satpol PP	25,000,000
					JUMLAH RENJA				734,000,000
					TENAGA KONTRAK				47,439,000
					BELANJA LANGSUNG				1,129,191,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				768,270,000
					JUMLAH				1,897,461,000
					DISTANAK				
					Program Wajib di SKPD			Distanak	265,154,000
2	01	xx	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terwujudnya pemberdayaan kelompok petani nelayan kecil (P4K)		Distanak	50,000,000
2	01	xx	15	06	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terpilihnya kelompok tani, KTNA dan kelompok P4K percontohan		Distanak	50,000,000
2	01	xx	16	39	Pengelolaan lahan dan air	Meningkatnya saran prasarana pengelolaan lahan dan air	30	Distanak	100,000,000
2	01	xx	16	41	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian	20	Distanak	50,000,000
2	02	xx	17	15	Pembangunan pusat - pusat etalase / promosi hasil pertanian	Terbangunnya pusat - pusat etalase / promosi hasil pertanian		Distanak	15,000,000
2	01	xx	18	06	Peyuluhan penerapan teknologi pertanian	Tersosialisasikannya teknologi nuklir bid. Pertanian dan peternakan		Distanak	20,000,000
2	01	xx	18	07	Prima tani (program rintisan dan akselerasi pasyarakatatan inovasi teknologi pertanian)			Distanak	65,000,000
5	01	xx	18	08	Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian tepat guna			Distanak	1,100,000,000
2	01	xx	19	07	Penyediaan sarana prasarana balai benih	Berkembangnya tanamn buah - buahan duku, sawo, durian, dondong, rambutan		Distanak	806,000,000
2	01	xx	19	08	Pengembangan agribisnis pertanian (baru)	meningkatnya usaha mangga , jagung, kacang tanah dan agribisnis pertanian lainnya	90	Distanak	50,000,000
2	01	xx	19	09	Pengem,bangan budidaya tanaman hortikultura buah - buahan	Berkembangnya budidaya budidaya mangga, dondong		Distanak	25,000,000
2	01	xx	19	10	Pengembangan bibit unggul pertanian	Berkembangnya tanaman jagung unggul	10	Distanak	15,000,000
2	01	xx	19	11	Pengem,bangan budidaya tanaman hortikultura sayur - sayuran	Berkembangnya agribisnis cabe dan bawang merah	80	Distanak	100,000,000
2	01	xx	19	12	Pengembangan budidaya tanaman palawija	Berkembangnya agribisnis jagung dan ketela pohon	80	Distanak	30,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
2	01	xx	20	06	Pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian (baru)	Terbangu dan terrehabilitasinya kondisi fisik sarana prasarana penyuluhan	100	Distanak	2,200,000,000
2	01	xx	20	07	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Meningkatnya kapasitas kelompok tani	70	Distanak	100,000,000
2	01	xx	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Meningkatnya daya antisipasi terhadap serangan penyakit hewan	85	Distanak	50,000,000
2	01	xx	22	01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Meningkatnya sumber bibit sapi potong	10	Distanak	859,000,000
2	01	xx	22	08	Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan manajemen agribisnis	10	Distanak	25,000,000
2	01	xx	22	10	Pengembangan agribisnis peternakan	Berkembangnya agribisnis ayam buras		Distanak	50,000,000
2	01	xx	22	11	Pengembangan agribisnis peternakan	Berkembangnya agribisnis itik		Distanak	70,000,000
2	01	xx	26	01	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman	Meningkatnya daya antisipasi terhadap serangan hama penyakit	80	Distanak	50,000,000
2	01	xx	27	01	Penyusunan statistik pertanian dan peternakan	Terpenuhinya data pertanian dan peternakan	100	Distanak	50,000,000
2	01	xx	27	02	Pendampingan DAK (Safeguarding)	Terselenggarakannya kegiatan DAK dengan baik	100	Distanak	150,000,000
					Jumlah Renja				6,080,000,000
					Jumlah Tenaga Kontrak				187,875,000
					Jumlah Belanja Langsung				6,533,029,000
					Jumlah Belanja Tidak Langsung				3,238,775,000
					Jumlah Total SKPD				9,771,804,000
					DISKANLUT				
					Program Wajib di SKPD	Dinas Perikanan dan Kelautan			163,180,000
2	05	xx	19	02	Promosi Perikanan dan Kelautan	Bertambahnya investasi di daerah		Diskanlut	50,000,000
2	05	xx	20	04	Budidaya rumput laut dan kerang hijau	Terbukanya lapangan kerja alternatif bagi nelayan		Diskanlut	50,000,000
2	05	xx	20	05	Demplot budidaya udang Vanamei	Berkembangnya pembudidaya udang komoditas ekspor		Diskanlut	90,000,000
2	05	xx	20	06	Demplot budidaya rajungan	Penyediaan bahan baku untuk pengolah rajungan		Diskanlut	75,700,000
2	05	xx	20	07	Demplot budidaya belut	Membuka lapangan kerja bagi pembudidaya ikan		Diskanlut	40,000,000
2	05	xx	20	08	Budidaya ikan lele dan nila	Meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan		Diskanlut	55,000,000
2	05	xx	20	09	Demplot pengembangan budidaya artemia	Membuka peluang usaha pembudidaya ikan dengan diversifikasi		Diskanlut	50,000,000
2	05	xx	20	10	Normalisasi saluran tambak	Meningkatkan produksi ikan dan garam		Diskanlut	1,100,000,000
2	05	xx	20	11	Pengerukan Sungai Karang Mangu	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku air tambak dan meningkatkan pengamanan kapal nelayan		Diskanlut	200,000,000
2	05	xx	20	12	Pengerukan Sungai Punjulharjo	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan baku air tambak dan meningkatkan pengamanan kapal nelayan		Diskanlut	150,000,000
2	05	xx	21	06	Pengerukan jalur kapal nelayan	Meningkatkan pengaman kapal nelayan		Diskanlut	100,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
2	05	xx	21	07	Pengerasan lahan dan reklamasi lahan TPI Sarang	Mempermudah akses produksi ikan di TPI		Diskanlut	385,000,000
2	05	xx	21	08	Rehabilitasi TPI Tanjungsari dan perbaikan akses jalan	Mempermudah akses produksi ikan di TPI		Diskanlut	220,000,000
2	05	xx	21	09	Pengerasan lahan TPI Karanganyar	Mempermudah akses produksi ikan di TPI		Diskanlut	330,000,000
2	05	xx	21	10	Pembangunan depo ikan (TPI darurat	Meningkatkan sarana pemasaran hasil tangkapan		Diskanlut	75,000,000
2	05	xx	21	11	Pembangunan gudang basket TPI Tasik Agung	Meningkatkan sarana prasarana pelabuhan perikanan		Diskanlut	330,000,000
2	05	xx	21	12	Rehabilitasi bangunan pengeringan ikan	Berfungsinya bangunan yang telah ada di Pasar banggi		Diskanlut	100,000,000
2	05	xx	21	13	Pemasangan lampu penenrangan pantai	Meningkatkan pengamanan kapal ikan		Diskanlut	200,000,000
2	05	xx	21	14	Pengadaan mebelair dan peralatan TPI Lasem	Meningkatkan operasional TPI		Diskanlut	50,000,000
2	05	xx	21	15	Bantuan rumpon untuk nelayan purse seine di Sarang	Meningkatkan produksi ikan dan pendapatan nelayan		Diskanlut	137,500,000
2	05	xx	21	16	Pelatihan sertifikasi nahkoda kapal	Meningkatkan ketrampilan nelayan		Diskanlut	75,000,000
2	05	xx	21	17	Penanganan konflik nelayan dan penetiban alat tangkap	Menurunnya konflik pemanfaatan di laut		Diskanlut	40,000,000
2	05	xx	21	18	bantuan alat tangkap ikan	Mengurangi penggunaan alat tangkap terlarang		Diskanlut	137,500,000
2	05	xx	22	02	Demplot pemberdayaan penyuluh perikanan	Tertaksannya percontohan dimasing - masing wilayah kerja		Diskanlut	40,000,000
2	05	xx	23	02	Pengembangan diversifikasi produk olahan	Berkembangnya produk olahan sesuai permintaan pasar		Diskanlut	124,300,000
2	05	xx	23	03	Penertiban TPI dan pengelolaan usaha perikanan	Peningkatan produksi di TPI		Diskanlut	75,000,000
2	05	xx	23	04	Bantuan benih ikan di perairan umum	meningkatkan dan pemerataan konsumsi ikan di masyarakat		Diskanlut	40,000,000
2	05	xx	23	05	Pelatihan dan peningkatan ketrampilan pasca panen	Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan wanita nelayan		Diskanlut	90,000,000
2	05	xx	25	01	Pengembangan informasi, statistik dan perencanaan perikanan dan kelautan	Tersedianya data dan informasi potensi perikanan		Diskanlut	50,000,000
2	05	xx	25	02	Konsultan perencana dan pengawas fisik	Tertaksannya perencanaan kegiatan fisik		Diskanlut	225,000,000
2	05	xx	25	03	Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan	Tersedianya dan terlaksananya data kegiatan untuk bahan pengambilan kebijakan		Diskanlut	75,000,000
2	05	xx	25	04	Rancang Bangun Riset Senter Budidaya	Mempercepaty alih teknologi budidaya bagi petani		Diskanlut	200,000,000
2	05	xx	25	05	DED Docking	Adanya perencanaan pembangunan Docking Kapal Nelayan		Diskanlut	400,000,000
					Jumlah Renja				5,360,000,000
					Jumlah Tenaga Kontrak				36,009,000
					Jumlah Belanja Langsung				5,559,189,000
					Jumlah Belanja Tidak Langsung				1,499,935,000
					Jumlah Total SKPD				7,059,124,000
					DINAS PERTAMBANGAN DAN LH	selesai			
					Program Wajib di SKPD				148,395,000
1	08	xx	16	10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Tertaksannya program kali bersih di Randugunting, Karanggeneng, Babagan, Karangmangu dan Kalipang	100	Distamben LH	60,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	08	xx	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terseleenggaranya Hari LH dan penataan lingkungan	100	Distamben LH	50,000,000
1	08	xx	16	17	Pemantauan UKL - UPL dan AMDAL	Menurunnya tingkat kerusakan LH	100	Distamben LH	10,000,000
1	08	xx	17	08	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA	Terlaksannanya wasdal ABT	100	Distamben LH	50,000,000
1	08	xx	17	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Penanaman, penghijauan dan sarasehan	100	Distamben LH	50,000,000
1	08	xx	17	17	Survei Geolistrik dan pengeboran ABT	Tercukupinya air bersih	100	Distamben LH	300,000,000
1	08	xx	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya data kualitas lingkungan (air, udara, tanah)	100	Distamben LH	50,000,000
1	08	xx	19	06	Pengadaan Peta LH	Peta kawasan lindung	100	Distamben LH	75,000,000
2	03	xx	15	05	Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan	Terkendalinya usaha pertambangan	100	Distamben LH	50,000,000
2	03	xx	15	07	Studi Penataan Kawasan Pertambangan	Data tentang Penataan Kawasan pertambangan	100	Distamben LH	200,000,000
2	03	xx	15	08	Identifikasi dan pengembangan potensi kawasan karst	Identifikasi potensi kawasan karst dan pengembangannya	100	Distamben LH	250,000,000
2	03	xx	15	11	Penyusunan Raperda Energi, ABT dan LH	Dimilikinya regulasi bidang energi, ABT dan LH sebagai pedoman pelaksanaan tugas	100	Distamben LH	25,000,000
2	03	xx	17	01	Koordinasi pengembangan ketenaga lisbikan	Pendampingan Bantuan PLTS 50 WP dari Kementrian PDT	100	Distamben LH	67,500,000
2	03	xx	17	02	Perluasan Jaringan Listrik	Terwujudnya pemasangan jaringan listrik Dk. Kesambi Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang	100	Distamben LH	115,000,000
2	03	xx	17	03	Perluasan Jaringan Listrik	Terwujudnya pemasangan jaringan listrik Desa Warugunung Kecamatan Pancur	100	Distamben LH	175,000,000
2	03	xx	17	04	Perluasan Jaringan Listrik	Terwujudnya pemasangan jaringan listrik Desa Gondan Kecamatan sarang	100	Distamben LH	100,000,000
2	03	xx	17	05	Perluasan Jaringan Listrik	Terwujudnya pemasangan jaringan listrik Dk. Ngelukwaru, Karasgeneng, Karas, Gesikan, DK. Gondosari dan kajoran Kecamatan Sedan	100	Distamben LH	625,000,000
2	03	xx	18	01	Peningkatan pelayanan perijinan pertambangan	Peningkatan usaha pertambangan	100	Distamben LH	30,000,000
2	03	xx	18	02	Pemberian ijin pertambangan secara massal kepada pengusaha bong gamping dan pencucian pasir kuarsa	Ketertiban perijinan pengolahan pertambangan	100	Distamben LH	20,000,000
2	03	xx	19	01	Evaluasi dan proyeksi produksi pertambangan	Terevaluasinya dan terproyeksinya produksi pertambangan	100	Distamben LH	15,000,000
2	03	xx	20	01	Pengadaan sarana prasarana pertambangan	Kelancaran pelaksanaan tugas	100	Distamben LH	100,000,000
2	03	xx	20	02	Pengadaan Portal Pertambangan	Kelancaran pelaksanaan tugas	100	Distamben LH	50,000,000
					JUMLAH RENJA				2,467,500,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				79,909,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				2,695,804,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				917,350,000
					JUMLAH				3,613,154,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					HUTBUN				
					Program Wajib di SKPD				120,347,000
2	01	xx	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah (Pengembangan Hutan cadangan Pangan)	Terwujudnya hutan lestari dan mampu memberikan sumbangan sumber pangan bagi masyarakat sekitar hutan	100	Dishutbun	45,000,000
2	01	xx	16	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan (produk pertanian)	Terwujudnya sentra - sentra produksi komoditas perkebunan	100	Dishutbun	145,000,000
2	01	xx	16	32	Budidaya tanaman mrica/lada (Pengembangan diversifikasi tanaman)	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan lahan bawah tegakan	100	Dishutbun	112,500,000
2	01	xx	20	03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terwujudnya penyuluhan hutan yang kredibel danm tumbuhnya motivasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan	100	Dishutbun	125,000,000
2	01	xx	20	08	Pemberdayaan LMDH		100	Dishutbun	75,000,000
2	01	xx	25	01	Pengembanganm kawasan sentra produksi perkebunan tebu	Terwujudnya pengembangan agribisnis komoditas tanaman tebu	100	Dishutbun	514,000,000
2	01	xx	25	02	Pengembangan kawasan sentra komoditas kelapa	Terwujudnya kawasan sentra produksi tanaman kelapa	100	Dishutbun	137,000,000
2	02	xx	15	03	Pengembangan hasil hutan non-kayu (Budidaya Lebah Madu)	Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu berupa budidaya lebah madu	100	Dishutbun	50,000,000
2	02	xx	15	08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Terwujudnya keamanan hutan dan tertibnya perijinan kayu rakyat	100	Dishutbun	70,000,000
2	02	xx	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Terpenuhinya kebutuhan bibit kehutanan dan perkebunan	100	Dishutbun	130,000,000
2	02	xx	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Terwujudnya pelaksanaan penanganan RHL yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat	100	Dishutbun	320,000,000
2	02	xx	16	06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terwujudnya peningkatan peran dan kepedulian anak sekolah pada kelestarian lingkungan	100	Dishutbun	50,000,000
2	02	xx	16	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Evaluasi tanman hutan rakyat GNRHL Tahun 2005 seluas 1.380 Ha	Terwujudnya data prosentase tumbuh tanaman untuk kegiatan pemeliharaan	100	Dishutbun	60,000,000
2	02	xx	17	01	Pembangunan gaeasi dan gudang traktor	Terbanggunnya garasi untuk keamanan traktor dan peralatannya	100	Dishutbun	100,000,000
					Jumlah Renja				1,933,500,000
					Jumlah Tenaga Kontrak				41,750,000
					Jumlah Belanja Langsung				2,095,597,000
					Jumlah Belanja Tidak Langsung				2,382,225,000
					Jumlah Total SKPD				4,477,822,000
					INDAKOP				
					Program Wajib di SKPD				422,170,000
1	15	xx	16	08	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Pelaku IKM	100	Indagkop	50,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	15	xx	16	11	Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training) bagi pengusaha IKM	35 pelaku usaha IKM	100	Indagkop	75,000,000
1	15	xx	16	12	Peningkatan manajemen industri berbasis agro	Manajemen industri berbasis agro	100	Indagkop	30,000,000
1	15	xx	18	10	Pembinaan UPK - PPK	Pengelola UPK - PPK	100	Indagkop	200,000,000
1	15	xx	18	11	Pemberdayaan koperasi Pondok Pesantren	Pengelola kopontren	100	Indagkop	75,000,000
1	15	xx	18	12	Kegiatan revitalisasi KUD	3 KUD	100	Indagkop	150,000,000
1	15	xx	18	13	Penilaian kesehatan koperasi	200 koperasi	100	Indagkop	15,000,000
1	15	xx	18	14	Bantuan kegiatan DEKOPINDA	Dekopinda	100	Indagkop	25,000,000
1	15	xx	18	15	Diklat perkoperasian	Pengelola koperasi	100	Indagkop	100,000,000
1	15	xx	19	1	Perkuatan modal Koperasi Garam	2 koperasi	100	Indagkop	50,000,000
1	15	xx	19	2	Perkuatan modal koperasi petani tebu	1 koperasi	100	Indagkop	50,000,000
1	15	xx	19	3	perkuatan modal batik tulis	1 koperasi	100	Indagkop	50,000,000
1	15	xx	20	1	Perkuatan modal Usaha Koperasi Pramuka	1 koperasi	100	Indagkop	50,000,000
1	15	xx	20	18	Penyelenggaraan Gebyar Syawalan Rembang 2007	Pengusaha IKM	100	Indagkop	160,000,000
1	15	xx	20	19	Promosi Investasi dan produk unggulan daerah	Pengusaha di Rembang	100	Indagkop	400,000,000
1	15	xx	20	17	Operasional pelayanan perijinan dan non perijinan	Pengusaha di Rembang	100	Indagkop	200,000,000
1	16	xx	17	02	Penyusunan Profil Investasi	Dunia usaha	100	Indagkop	20,000,000
2	06	xx	15	01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Dunia usaha	100	Indagkop	15,000,000
2	06	xx	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Dunia usaha	100	Indagkop	20,000,000
2	06	xx	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Dunia usaha	100	Indagkop	7,500,000
2	06	xx	15	04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah		100	Indagkop	7,500,000
2	06	xx	15	05	Pengawasan peredaran garam sesuai standart SNI	Pengusaha garam	100	Indagkop	50,000,000
2	06	xx	16	06	Penyusunan Data Base industri, perdagangan dan koperasi	Data industri, dagang dan koperasi	100	Indagkop	75,000,000
2	06	xx	17	13	Penerbitan profil perusahaan dan business Directory	Dunia Usaha	100	Indagkop	35,000,000
2	06	xx	18	08	Riset pasar dan pemasaran	3 kota pembanding	100	Indagkop	25,000,000
2	06	xx	20	1	Pembangunan Kios cinderamata khas Rembang	Adanya kios cinderamata	100	Indagkop	200,000,000
2	06	xx	20	2	Pembangunan show room dan pusat penjualan	Adanya show room pusat penjualan	100	Indagkop	300,000,000
2	06	xx	20	3	Pembuatan show room untuk produk kerajinan dan batik	Pengusaha	100	Indagkop	250,000,000
2	06	xx	20	4	Pembuatan show room, pusat penjualan bordir dan hasil kerajinan Rembang	Pengusaha bordir	100	Indagkop	300,000,000
2	07	xx	16	07	Penumbuhan industri di Desa P2MBG	Masyarakat P2MBG	100	Indagkop	50,000,000
2	07	xx	16	08	Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri genteng dan garam	Pengusaha genteng dan garam	100	Indagkop	50,000,000
2	07	xx	16	09	Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan IDK	UMKM	100	Indagkop	25,000,000
2	07	xx	17	05	Pengembangan industri ceriping ketela dan gadung	Pengusaha ceriping ketela dan gadung	100	Indagkop	20,000,000
2	07	xx	17	06	Pengembangan industri ukir kayu	Pengusaha ukir kayu	100	Indagkop	20,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
2	07	xx	19	02	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat (PIPP)	Tersedianay informais yang akurat	100	Indagkop	150,000,000
2	07	xx	20	01	Pelatihan dan bantuan peralatan industri kecap	Pengusaha kecap	100	Indagkop	50,000,000
2	07	xx	20	02	Pelatihan dan bantuan peralatan industri VCO	20 org pengusaha VCO	100	Indagkop	50,000,000
2	07	xx	20	03	Pelatihan desain dan bantuan peralatan bordir	Pengusaha bordir	100	Indagkop	105,000,000
2	07	xx	20	04	Pelatihan Bantuan peralatan pengolahan minyak jarak	Pengusaha minyak jarak	100	Indagkop	35,000,000
2	07	xx	20	05	Pelatihan dan bantuan peralatan (beserta pengemasan) bagi pengrajin tahu tempe	Pengusaha tempe	100	Indagkop	45,000,000
2	07	xx	20	06	Pelatihan dan bantuan peralatan (beserta pengemasan) bagi pengrajin keripik ketela	Terlatih dan meningkatnya pelaytan pelaku usaha kripik	100	Indagkop	105,000,000
2	07	xx	20	07	Pelatihan dan bantuan alat industri gamping dengan BB batubara	Terlatihnya pelaku usaha gamping	100	Indagkop	35,000,000
2	07	xx	20	08	Pelatihan pengolahan ikan kering	Pengusaha ikan	100	Indagkop	20,000,000
2	07	xx	20	09	Pelatihan dan Bantuan alat (beserta pengemasan) bandeng presto	Terlatih pengusaha presto	100	Indagkop	15,000,000
2	07	xx	20	10	Pelatihan dan Bantuan alat pembuatan genteng dan bata merah	Terlatihnya 2 pengusaha genteng	100	Indagkop	150,000,000
2	07	xx	20	11	Pelatihan dan Bantuan alat (beserta pengemasan) dodol	Terlatihnya pengusaha dodol	100	Indagkop	20,000,000
2	07	xx	20	13	Pelatihan dan bantuan peralatan pengrajin sepatu	Terlatihnya pengusaha sepatu	100	Indagkop	25,000,000
2	07	xx	20	14	Pelatihan peningkatan mutu dan bantuan peralatan serta bahan baku batik tulis	Pengusaha batik	100	Indagkop	100,000,000
2	07	xx	20	15	Pelatihan dan bantuan peralatan (beserta pengemasan) usaha krupuk rambak	Terlatihnya pengusah krupuk	100	Indagkop	10,000,000
2	07	xx	20	17	Pelatihan dan bantuan peralatan industri kayu olahan	Pengusaha meubel	100	Indagkop	200,000,000
2	07	xx	20	18	Bantuan peralatan produksi krupuk Bandung	Meningkatnya permodalan	100	Indagkop	15,000,000
2	07	xx	20	19	Pelatihan pembuatan makanan khas	2 klp pengusaha	100	Indagkop	7,000,000
2	07	xx	20	20	Pelatihan dan bantuan peralatan (beserta pengemasa) trasi	Mingkatnya produk terasi	100	Indagkop	20,000,000
2	07	xx	20	21	Bantuan alat mesin giling tebu 30 PK	Pengusaha gula merah	100	Indagkop	60,000,000
2	07	xx	20	22	Bantuan pelatihan peralatan kemasan emping jagung	Pengusaha emping jagung	100	Indagkop	25,000,000
					JUMLAH RENJA				4,392,000,000
					Jumlah Tenaga Kontrak				89,543,000
					Jumlah Belanja Langsung				4,903,713,000
					Jumlah Belanja Tidak Langsung				1,573,280,000
					Jumlah Total SKPD				6,476,993,000
					DISOSNAKERTRANS				
					Program wajib di SKPD (14 program)	Dinkesosnakertrans			208,881,000
1	13	xx	15	07	Fasilitasi manajemen P2FM (Perencanaan dan Penjajagan lokasi	Keluarga miskin	80	Diskesosnakertrans	20,000,000
	13	xx	15	08	Pelestarian Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM)	KK miskin	100	Diskesosnakertrans	90,400,000
1	13	xx	16	03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PMKS dan orang terlantar	80	Diskesosnakertrans	45,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	13	xx	16	04	Pelayanan fasilitas bantuan sosial bagi PMKS	PMKS dan orang terlantar	80	Diskesosnakertrans	36,000,000
1	13	xx	16	12	Pelatihan bagi tenaga pelayan kesejahteraan sosial untuk memenuhi standart kompetensi	Tenaga Pelayanan kessos	80	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	13	xx	16	13	Sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosial / Linsos	Stakeholders	80	Diskesosnakertrans	12,500,000
1	13	xx	16	14	Pendataan dan pemutakhiran database	PMKS	80	Diskesosnakertrans	40,000,000
1	13	xx	16	15	Standardisasi pelayanan kesejahteraan sosial	Pelaku Pelayanan kessos	100	Diskesosnakertrans	7,500,000
1	13	xx	16	16	Monitoring, evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial	Pelaku Pelayanan kessos	80	Diskesosnakertrans	12,500,000
1	13	xx	16	17	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar	Lansia terlantar	80	Diskesosnakertrans	20,000,000
1	13	xx	16	18	Kebutuhan tindak darurat bantuan permakanaan dan penanggulangan korban bencana		80	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	13	xx	18	03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Penca	80	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	13	xx	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Penca	80	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	13	xx	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (eks tuna susila, gelandangan pengemis, eks napi	PGOT, eks napi	80	Diskesosnakertrans	55,000,000
1	13	xx	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Pengurus KTI, PPSM, Orsosdes, WPKS	80	Diskesosnakertrans	68,000,000
1	13	xx	21	02	Kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		80	Diskesosnakertrans	39,500,000
	13	xx	21	05	Operasional perawatan dan pemeliharaan TMP		80	Diskesosnakertrans	30,000,000
	13	xx	21	06	Konsolidasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)		80	Diskesosnakertrans	8,000,000
	13	xx	21	07	Peningkatan fungsi LBK (pelayanan sosial di (LBK)		80	Diskesosnakertrans	30,000,000
	13	xx	21	08	Bantuan subsidi kemitraan bagi panti sosial pemerintah / swasta	8 Panti pemerintah / swasta	100	Diskesosnakertrans	40,000,000
	13	xx	21	09	Fasilitasi pengembangan SDM PSKS		100	Diskesosnakertrans	5,000,000
1	14	xx	15	01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah (Pendataan dan pemutakhiran)	Tenaga kerja / DU LPK	80	Diskesosnakertrans	50,000,000
1	14	xx	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (Ragum, Kower, komputer)	Sarpras KLK	100	Diskesosnakertrans	198,000,000
1	14	xx	15	10	Pelatihan bagi tenaga pelayan ketenagakerjaan untuk memnuhi standart kompetensi	Tenaga pelayanan TK	80	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	14	xx	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Pencaker, korban PHK, UKM dan calon trans	70	Diskesosnakertrans	15,000,000
1	14	xx	16	08	Peningkatan pelatihan dan produktifitas dan tenaga kerja melalui penyelenggaraan latihan kerja melalui LLK dan mekanisme MTU untuk kejuruan las karbit, prosesing, menjahit dll	Pencaker, korban PHK, UKM dan calon trans	80	Diskesosnakertrans	67,560,000
	14	xx	16	09	Penyelenggaraan pelatihan kerja mekanisme MTU	Pencaker, korban PHK, UKM dan calon trans	80	Diskesosnakertrans	66,040,000
	14	xx	16	10	Sinkronisasi program kegiatan ketenagakerjaan	Stakeholder	80	Diskesosnakertrans	12,500,000
	14	xx	16	12	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		80	Diskesosnakertrans	20,000,000
	14	xx	16	13	Perlindungan TKI		80	Diskesosnakertrans	12,500,000
	14	xx	16	14	Penyiapan tenaga kerja siap pakai		80	Diskesosnakertrans	90,000,000
	14	xx	16	15	Pemberian bantuan peralatan untuk mendukung akselerasi pembangunan kawasan perdesaan	Pencaker	80	Diskesosnakertrans	165,260,000
	14	xx	16	16	Penyelenggaraan pelatihan kerja mekanisme MTU untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan	Kelompok pekerja	80	Diskesosnakertrans	185,780,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	14	xx	17	03	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Anak / wanita, penca, PHK, pekerja wanita	80	Diskesosnakertrans	70,000,000
1	14	xx	17	09	Standardisasi pelayanan ketenagakerjaan	Pelaku yan Ketenagakerjaan	100	Diskesosnakertrans	7,500,000
	14	xx	17	09	Monev pelayanan ketenagakerjaan	Pelaku yan Ketenagakerjaan	80	Diskesosnakertrans	12,500,000
1	14	xx	17	10	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3		80	Diskesosnakertrans	110,000,000
x	xx	xx	18	01	Penambahan, peningkatan & optimalisasi sarana & prasarana Dinas melalui penambahan sarana perpustakaan	Kantor Diskesosnakertrans	80	Diskesosnakertrans	15,000,000
2	08	xx	18	01	Pengiriman Keluarga Transmigran ke Luar P. Jawa	Masyarakat Rembang	80	Diskesosnakertrans	80,000,000
					JUMLAH RENJA				1,812,040,000
					TENAGA KONTRAK				77,841,000
					BELANJA LANGSUNG				2,098,762,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,123,415,000
					JUMLAH				4,222,177,000
					DINAS KESEHATAN KABUPATEN				
					Program wajib di SKPD (14 program)	Dinas Kesehatan			306,708,050
1	02	xx	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Panitia Pengadaan dan rekanan	100	DKK	1,267,800,000
1	02	xx	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Pengelola obat, Puskesmas, P4K, Pustu/Puskesmas, Dokter Puskesmas dan 14 Kecamatan	100	DKK	32,300,000
1	02	xx	15	04	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengelola obat, Puskesmas, P4K, Pustu/Puskesmas	100	DKK	4,900,000
1	02	xx	15	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Puskesmas dan Pustu/Puskesmas	100	DKK	8,800,000
1	02	xx	15	06	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit			DKK	14,000,000
1	02	xx	16	03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Alkes Puskesmas; Terpeliharanya kepekaan, mutu dan fungsi peralatan kesehatan	100	DKK	16,000,000
1	02	xx	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Dokter dan dokter gigi; Terciptanya sarkes swasta yang bermutu dan sesuai peraturan yang berlaku	100	DKK	2,500,000
1	02	xx	16	10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Petugas kesehatan dan masyarakat; Terwujudnya kesiapan jajaran kesehatan di semua tingkatan administrasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana	100	DKK	30,000,000
1	02	xx	16	11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan siswa Klas 1 TK/RA,SD/MI	100	DKK	25,000,000
1	02	xx	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	16 Puskesmas; Untuk mencapai manajemen mutu yang diakui nasional	100	DKK	298,500,000
1	02	xx	16	13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	UPT P4K dan Pustu/Puskesmas; Meningkatkan pelaksanaan program di P4K dan Pustu	100	DKK	100,000,000
1	02	xx	16	14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Institusi pelayanan masyarakat, TTU, P4K dan Puskesmas	100	DKK	105,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	02	xx	16	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Puskesmas dan P4K; Terlaksananya rakor untuk mengetahui kinerja di Puskesmas dan P4K; Terlaksananya bintek untuk mengetahui pelaksanaan program di Puskesmas; Tersedianya data hasil kegiatan program kesehatan; Menggambarkan prestasi kerja di Puskesmas dan P4K	100	DKK	38,500,000
1	02	xx	16	16	Penyediaan Pembiayaan dan jaminan Kesehatan (JKRS)	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak terlayani Askeskin dan Askes	100	DKK	7,500,000,000
1	02	xx	17	01	Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan	100	DKK	34,000,000
1	02	xx	17	02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	IRTP; Meningkatkan prosentase IRTP yang memperoleh sertifikat IRTP; Meningkatkan produk pangan yang memenuhi syarat	100	DKK	15,000,000
1	02	xx	17	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			DKK	10,000,000
1	02	xx	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Penyebarluasan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan	100	DKK	42,000,000
1	02	xx	19	02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Masyarakat; HKN	100	DKK	5,000,000
				03	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pembinaan dan pengembangan PHBS RT; Lomba dokter kecil; Penggerakkan masyarakat dalam PSN-DB	100	DKK	339,545,000
1	02	xx	19	04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelajar akan pentingnya hidup bersih dan sehat melalui SBH; Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja	100	DKK	64,500,000
1	02	xx	20	03	Peangulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Menurunkan prevalensi balita gizi buruk; Menurunkan prevalensi total goiter rate (TGR); Menurunkan prevalensi anemia gizi pada remaja putri	100	DKK	405,227,000
1	02	xx	20	04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Meningkatkan peranserta masyarakat melalui keluarga sadar gizi dan meningkatkan cakupan pelayanan gizi masyarakat	100	DKK	33,365,000
1	02	xx	20	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan pembinaan petugas gizi P4K dan Puskesmas.	100	DKK	1,500,000
1	02	xx	21	01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan petugas kesling, kader kesling dan petugas laborat; Meningkatnya pengetahuan pengusaha makanan jajanan tentang higiene dan sanitasi	100	DKK	30,000,000
1	02	xx	21	02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Meningkatnya masyarakat yang terpenuhi air bersih yang memenuhi syarat	100	DKK	40,000,000
1	02	xx	21	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantau dan terkendalinya pelaksanaan program pengembangan lingkungan sehat	100	DKK	5,000,000
1	02	xx	22	01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Petugas mendapat ketrampilan teknis fogging sesuai ketentuan; Tertanganinya 80 % kasus DBD di lapangan; Tercapainya target kematian kurang dari 2 %	100	DKK	112,323,000
1	02	xx	22	04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Balita dan anak sekolah; Tercapainya desa UCI 85 %	100	DKK	100,145,000
1	02	xx	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penemuan kasus TB 70 %; Tercapainya eliminasi penyakit kusta dengan prevalensi < 1/10.000 pddk; Terlindunginya jamaah haji dari penularan penyakit dari luar negeri; Terlayannya penanganan kasus Ispa pada balita; Tercainya target angka bebas jentik (ABJ) . 95 %; Tidak terjadinya penularan setempat penderita malaria; Tertanganinya 80 % penderita DBD.	100	DKK	136,493,400

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	02	xx	22	08	Peningkatan Imunisasi	Bayi dan spuit; Tercapainya desa UCI 85 %	100	DKK	45,576,000
1	02	xx	22	09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	Masyarakat terpapar; Penyakit filariasis tidak menjadi penyakit endemi; Dapat ditemukannya kasus AFP; Tertanganinya kasus KLB 100 %	100	DKK	24,000,000
1	02	xx	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Masyarakat terpapar; Mengurangi kelompok resiko HIV/AIDS ; Petugas kesehatan dan masyarakat mendapat informasi flu burung	100	DKK	40,000,000
1	02	xx	22	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terantau dan terkendalinya pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	DKK	7,500,000
1	02	xx	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan	Puskesmas, P4K, Pustu/Puskesmas; Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM bidang kesehatan : Kepmenkes No. 14567/Menkes/SK/2003	100	DKK	4,575,000
1	02	xx	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Puskesmas, P4K, Pustu/Puskesmas; Memantapkan sistem manajemen data kesehatan yang dinamis dan akuntable	100	DKK	45,000,000
1	02	xx	23	05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Puskesmas, P4k, Kecamatan dan desa; Terlaksananya penyusunan anggaran kesehatan berdasarkan perencanaan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT); Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui kaji banding	100	DKK	45,000,000
1	02	xx	23	06	Studi kelayakan pengembangan Puskesmas Kragan II menjadi Rumah Sakit	Terlaksananya perhitungan pembiayaan, dampak sosial dan pemanfaatan oleh masyarakat	100	DKK	40,000,000
1	02	xx	23	07	Penyusunan DED Puskesmas Kragan II				
1	02	xx	25	02	Pembangunan puskesmas pembantu (6 unit)	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	1,122,000,000
1	02	xx	25	21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Puskesmas)	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	145,000,000
1	02	xx	25	22	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (8 unit)	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	340,000,000
1	02	xx	25	23	Rehabilitasi/pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis	18 unit rehab / Pemb rumdin dokter / dikter gigi, nakes	100	DKK	1,108,000,000
1	02	xx	25	24	Perencanaan, Monev dan pelaporan	Konsultan perencana	100	DKK	189,850,600
1	02	xx	25	25	Pengadaan tanah untuk Pustu	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	55,000,000
1	02	xx	25	26	Pengadaan kendaraan roda 2 untuk Puskesmas dan puskesmas Pembantu	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	1,140,000,000
1	02	xx	25	27	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas daban Puskesmas Pembantu	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	100	DKK	4,266,830,000
1	02	xx	25	28	Perluasan gedung Puskesmas		100	DKK	1,846,370,000
1	02	xx	28	09	Kemitraan peningkatan kualitas manajemen kesehatan	Petugas kesehatan dan masyarakat; Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan profesionalisme petugas kesehatan	100	DKK	10,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	02	xx	28	10	Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Masyarakat; Pembentukan Desa Siaga Sehat; Pembentukan Dewan Kesehatan; TMMD dan Bhayangkara	100	DKK	463,600,000
1	02	xx	29	01	Penyuluhan kesehatan anak balita	Memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita; Meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu dan anak	100	DKK	25,000,000
1	02	xx	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	Memantau pertumbuhan dan perkembangan Balita melalui lomba Balita Sehat	100	DKK	21,250,000
1	02	xx	29	07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatkan sistem pencatatan pelayanan ibu dan anak dan cakupan program KIA	100	DKK	8,000,000
1	02	xx	30	06	Pelayanan kesehatan	Meningkatkan pengetahuan kesadaran dan peran serta lansia dalam menjaga kesehatan dan pembinaan Posyandu lansia	100	DKK	30,000,000
1	02	xx	32	01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Meningkatkan status kesehatan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak; menurunkan angka kesakitan neonatal dan bayi; Meningkatkan status kesehatan neonatal dan bayi; Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI eksklusif	100	DKK	123,300,000
1	02	xx	32	03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Adanya pembahasan analitik kasus kebidanan dan perinatal yang berkesinambungan;	100	DKK	36,750,000
					Jumlah Renja				22,000,000,000
					TENAGA KONTRAK				149,039,000
					BELANJA LANGSUNG				22,455,747,050
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				14,978,176,500
					JUMLAH				37,433,923,550
					RSU				
					Program wajib di SKPD (14 program)	Adm. Kantor RSU dr. R. Soetrasno			114,576,000
1	02	xx	26	21	Pengadaan mebeleur rumah sakit (Bangsal JKRS)	Terpenuhinya meubelair bangsal JKRS	26 unit	RSU	57,852,000
1	02	xx	26	27	Pembangunan garasi Ambulance	Terpenuhinya garasi Ambulance yang representatif	108 M2	RSU	100,000,000
1	02	xx	26	28	Pengadaan stabilizer 350 KVA dan Kapasitor	Mengantisipasi perubahan tegangan listrik	1 unit	RSU	300,000,000
1	02	xx	26	29	Pengadaan Instalasi pengolahan air	Pemenuhan air bersih di RSU	100	RSU	20,000,000
1	02	xx	26	30	pengadaan komputer	penyempurnaan program SIM-RS	14 unit	RSU	98,000,000
1	02	xx	26	31	Penataan lingkungan RS (Pembuatan talud depan Pav. Anyelir)	Penyempurnaan Paviliun Anyelir	210 m2	RSU	71,400,000
1	02	xx	26	32	Kalibrasi alat elektromedik dan elektrimedik	Perawatan alat-alat elektromedik dan elektrimedik di RSU agar selalu dalam kondisi standar	50 alat	RSU	66,000,000
1	02	xx	26	33	Rehabilitasi Kamar mayat	Penyempurnaan kamar mayat	204 M2	RSU	100,000,000
1	02	xx	28	11	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP internal Rumah sakit)	Presentant yang mempunyai kasus kesakitan dan kematian ibu dan bayi (Kasus yang perlu di Audit)		RSU	18,000,000
1	02	xx	28	12	Operasional Bank Darah Rumah Sakit	Honor Petugas Bank darah	8 orang	RSU	22,000,000
1	02	xx	28	13	Pertemuan koordinasi PMI dan RSU	PMI 3 orang RSU 10 orang		RSU	4,000,000
1	02	xx	33	01	Pelatihan Service Excellent dan one stop service	Tenaga kesehatan 72 orang	72 orang	RSU	36,000,000
1	02	xx	33	02	Pelatihan Sanitasi	Tenaga non kesehatan 60 orang	60 orang	RSU	7,500,000
1	02	xx	33	03	Pelatihan SIM_RS	Petugas SIM-RS	80 orang	RSU	42,450,000
1	02	xx	33	04	Pelatihan Penggunaan elektromedik	Petugas IPSRS	2 orang	RSU	7,500,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	02	xx	33	05	Pelatihan manajemen kepala bangsal	Kepala bangsal 18 orang	18 orang	RSU	40,000,000
1	02	xx	33	06	Pelatihan Perawat ICU	Perawat diruang ICU 2 orang	2 orang	RSU	20,000,000
1	02	xx	33	07	Pelatihan perawat anesthesi	Perawat anesthesi di ruang operasi 1 orang	1 orang	RSU	20,000,000
1	02	xx	33	08	Pelatihan perawat PICU/NICU	Perawat diruang PICU/NICU 2 orang	2 orang	RSU	20,000,000
1	02	xx	33	09	Pelatihan EKG	Perawat 10 orang	10 orang	RSU	19,000,000
1	02	xx	33	10	Pelatihan perawat mahir mata	Perawat 1 orang	1 orang	RSU	10,000,000
1	02	xx	33	11	Pelatihan USG Mata	Dokter spesialis mata 1 orang	1 orang	RSU	10,000,000
1	02	xx	34	01	Pelatihan KDRT bagi petugas kesehatan	Petugas kesehatan RS	20 orang	RSU	8,000,000
1	02	xx	34	02	Pertemuan Tim KDRT	Tim KDRT Kab. Rembang	20 orang	RSU	1,500,000
1	02	xx	34	03	Operasional Klinik KDRT	Tim KDRT Kab. Rembang	1 orang	RSU	4,600,000
1	02	xx	34	04	Biaya visum et Repertum KDRT dan anak	Pasien korban KDRT	25 kasus	RSU	125,000
1	02	xx	34	05	Biaya visum et Repertum kecelakaan lalu lintas	Pasien korban kecelakaan dan KLB	47 kasus	RSU	2,375,000
1	02	xx	34	06	Perawatan dan pengobatan korban KDRT	Pasien korban KDRT	25 kasus	RSU	12,500,000
1	02	xx	34	07	Pengadaan meubelair	Penunjang sarana dan prasarana KDRT	2 set meubelair	RSU	11,498,000
					JUMLAH RENJA				1,130,300,000
					TENAGA KONTRAK				1,200,438,000
					BELANJA LANGSUNG				2,445,314,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				9,540,634,000
					JUMLAH				11,985,948,000
					DINAS PENDIDIKAN				
					Program wajib di SKPD (14 program)	Dinas Pendidikan			348,587,500
1	01	xx	15	01	Rehap gedung sekolah TK	10 TK	25	Disdik	250,000,000
1	01	xx	15	67	Pembinaan PAUD	1 Keg	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	15	68	Penyelenggaraan Olahraga Usia Dini	1 Keg	100	Disdik	20,000,000
1	01	xx	15	69	Bantuan bagi penyelenggara kelompok bermain OR	1 Keg	50	Disdik	20,000,000
1	01	xx	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah Di SMP / MTs	15 SMP / MTs	50	Disdik	70,000,000
1	01	xx	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah (Pengganti) untuk SD/MI/SMP/MTs	15 Sd - SMP	50	Disdik	120,000,000
1	01	xx	16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI (non DAK)	191 SD/MI	50	Disdik	805,000,000
1	01	xx	16	79	DAK dan Pendampingan untuk SD / MI	70 SD/MI	75	Disdik	15,750,000,000
1	01	xx	16	80	Rehabilitasi gedung SMP / MTs (non DAK)	111 SMP / MTs	50	Disdik	300,000,000
1	01	xx	16	81	Bantuan operasional SMP satu atap	2 SMP	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	16	82	Pemberdayaan SMP Terbuka	1497 siswa	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	16	83	Program Penuntasan wajar Dikdas 9 tahun	1 keg	84	Disdik	70,000,000
1	01	xx	16	84	Bantuan SMP/PLB	1 keg	50	Disdik	50,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	01	xx	16	85	Bantuan untuk 3 SMP / MTs bukan pelaksana sekolah gratis	3 SMP/MTs	100	Disdik	15,000,000
1	01	xx	16	86	Bantuan Program Kejar Paket B Setara SMP	35 TKB	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	16	87	Pemberantasan Buta Aksara	14 Kec	100	Disdik	200,000,000
1	01	xx	16	88	Tes Pengendali Mutu siswa SD	1 Keg	100	Disdik	75,000,000
1	01	xx	16	89	Tes Pengendali Mutu siswa SMP	1 Keg	100	Disdik	75,000,000
1	01	xx	16	90	Bantuan ujian sekolah bagi SD/MI	10300 siswa	100	Disdik	130,000,000
1	01	xx	16	91	Kegiatan REDIP di Kecamatan	4 kec	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	16	92	Beasiswa Prestasi siswa SD / SMP	400 siswa	75	Disdik	120,000,000
1	01	xx	16	93	Bantuan SEQIP dan SD Inti di Kecamatan	374 SD	100	Disdik	185,000,000
1	01	xx	16	94	Lomba Mapel SD / MI	10 Keg	100	Disdik	65,000,000
1	01	xx	16	95	Lomba sekolah sehat	1 keg	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	16	96	Lomba Perpustakaan SD/SMP	2 Keg	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	16	97	Pembangunan ruang Laboratorium di SMP	5 SMP	100	Disdik	500,000,000
1	01	xx	16	98	Pembangunan Ruang Media di SMP	4 SMP	100	Disdik	200,000,000
1	01	xx	16	99	Pengadaan komputer untuk Mapel TIK SMP	80 SMP	100	Disdik	250,000,000
1	01	xx	16	100	Bantuan alat penunjang pendidikan di SMP	30 SMP	100	Disdik	150,000,000
1	01	xx	16	101	Program Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMP	4 SMP	100	Disdik	200,000,000
1	01	xx	16	102	Program Sekolah Potensial di SMP	4 SMP	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	16	103	Program kelas Emersi di SMP 2 Rembang dan SMP 1 Lasem	2 kelas	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	16	104	Bantuan Kegiatan BBE SMP	20 SMP	50	Disdik	70,000,000
1	01	xx	16	105	Bantuan dana ujian nasional SMP / MTs	9888 siswa	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	16	106	Peningkatan Mutu Siswa SMP	1 keg	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	16	107	Lomba uKS SMP	1 keg	100	Disdik	40,000,000
1	01	xx	16	109	Bantuan Program Sekolah Gratis (Sekolah Negeri dan Swasta)	24175 sek potensial/rintisan dan 3277 sek SSN	100	Disdik	5,563,550,000
1	01	xx	16	110	Akreditasi TK/SD/SMP	70 sekolah	20	Disdik	70,000,000
1	01	xx	16	111	Belanja modal Investasi SMP Negeri (sekolah gratis)	35 SMPN	100	Disdik	500,000,000
1	01	xx	16	112	Pembangunan Aula SMPN2 Rembang	1SMPN	100	Disdik	500,000,000
1	01	xx	16	113	bantuan MBS SD di kecamatan	20 SD	25	Disdik	150,000,000
1	01	xx	16	114	Lomba Wawasan Wiyata Mandala	1 keg	100	Disdik	30,000,000
1	01	xx	16	115	Pengawasan Terpadu	1 keg	100	Disdik	40,000,000
1	01	xx	16	116	Bantuan Rintisan SBI di SMP 2 Rembang			Disdik	
1	01	xx	16	117	Bantuan Operasional dan perawatan SMP/MTs Swasta			Disdik	
1	01	xx	17	01	Pembangunan gedung sekolah (Pendampingan - USB SMK)	2 sekolah	30	Disdik	1,000,000,000
1	01	xx	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah (RKB) di SMKN 1 Sedan	2 SMK	75	Disdik	150,000,000
1	01	xx	17	19	Pengadaan mebeluer sekolah untuk SMA/SMK	10 SMA/SMK	75	Disdik	75,000,000
1	01	xx	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMA / SMK (non DAK)	5 SMA/SMK	90	Disdik	100,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	01	xx	17	70	Bantuan ujian Kejar Paket C Setara SMA	855 TKB	25	Disdik	50,000,000
1	01	xx	17	71	Bantuan Operasional dan perawatan SMA/MA/SMK	25 SLTA Swasta	100	Disdik	150,000,000
1	01	xx	17	72	Bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMA	2 SMA	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	17	73	Program Community Collage (CC) di SMK	1 SMKN	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	17	74	Pendampingan Pembangunan di SMK kecil Sale	SMK Sale	25	Disdik	250,000,000
1	01	xx	17	75	Belanja modal investasi SMA / SMK Negeri	12 SMA / SMK	100	Disdik	350,000,000
1	01	xx	17	76	Bantuan alat penunjang Pendidikan di SMA / SMK	20 SMA/SMK	100	Disdik	150,000,000
1	01	xx	17	77	Pembangunan ruang laboratorium di SMA	2 SMA	75	Disdik	250,000,000
1	01	xx	17	78	Pembangunan Ruang Media di SMA	2 SMA	75	Disdik	200,000,000
1	01	xx	17	79	Pengadaan komputer untuk Mapel TIK SMA	70 buah - SMA	75	Disdik	200,000,000
1	01	xx	17	80	Beasiswa Prestasi Siswa SMA/SMK	175 Siswa	100	Disdik	105,000,000
1	01	xx	17	81	Program kelas Emersi di SMA 1 Rembang	2 kelas	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	17	82	Bantuan Kegiatan BBE SMA/SMK	8 SMA/SMK	100	Disdik	40,000,000
1	01	xx	17	83	Bantuan dana ujian nasional SMA /MA/SMK	4377 Siswa	100	Disdik	75,000,000
1	01	xx	17	84	Peningkatan mutu siswa SMA/SMK	1 keg	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	17	85	Bantuan Pengadaan Tanah SMAN Sumber			Disdik	
1	01	xx	18	14	Program kursus komputer,menjahit,sablon dan konfeksi bagi warga belajar di SKB	1 keg	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	18	15	Bantuan Penyelenggara kursus Diklusemas	5 lembaga	50	Disdik	50,000,000
1	01	xx	18	16	Pengembangan Kebudayaan / kebahasaan	1 keg	100	Disdik	20,000,000
1	01	xx	20	13	Bantuan pendidikan Penyetaraan D-II/S1 guru SD	135 guru SD	100	Disdik	150,000,000
1	01	xx	20	14	Peningkatan manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK	410 Kepala Sekolah	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	20	15	Peningkatan kompetensi penilik dan pengawas sekolah	84 penilik / pengawas	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	20	16	Penilaian Angka Kredit guru /pamong Belajar /was	1 Keg	100	Disdik	40,000,000
1	01	xx	20	17	Peningkatan mutu/profesionalisme guru SMP/SM	517 guru	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	20	18	Kegiatan Penilaian Kinerja Sekolah (PKS)	245 SD/SMP/SM	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	20	19	Pelatihan Pelatih Olahraga	45 pelatih	75	Disdik	50,000,000
1	01	xx	22	10	Pendataan dan Informasi Pendidikan Berbasis WEB	1 Keg	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	22	11	Program Information Comunication Teknology (ICT) di sekolah (Sarpras IT)	1 Keg	50	Disdik	100,000,000
1	01	xx	23	01	Kegiatan HarDisdik 2 Mei 2007	1 Keg	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	23	02	Bola voli Kartini Cup	1 Keg	100	Disdik	30,000,000
1	01	xx	23	03	Lomba lari 10 Km	1 Keg	100	Disdik	30,000,000
1	01	xx	23	04	Tri Lomba Juang	1 Keg	100	Disdik	50,000,000
1	01	xx	23	05	Lomba TUS - PBB	1 Keg	100	Disdik	40,000,000
1	01	xx	23	06	Kegiatan Paskibraka 17 Agustus 2007	1 Keg	100	Disdik	80,000,000
1	01	xx	23	07	Kegiatan PORSENI SD	1 Keg	100	Disdik	150,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	01	xx	23	08	PORSENI SMP/SM	1 Keg	100	Disdik	200,000,000
1	01	xx	24	01	Pembangunan gedung kantor UPT PNF TK / SD Kecamatan	2 UPT Kec	75	Disdik	200,000,000
1	01	xx	24	02	Pengadaan mebeleur Dinas Pendidikan	15 - Disdik	90	Disdik	75,000,000
1	01	xx	24	03	Pengadaan komputer untuk UPT Kecamatan	14 UPT Kec	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	24	04	Pengadaan sampul raport klas I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Swasta	34500 buah (Sekolah)	100	Disdik	100,000,000
1	01	xx	24	05	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Gedung Dinas Pendidikan)	Gedung Disdik	75	Disdik	50,000,000
1	01	xx	24	06	Rehabilitasi Gedung UPT Dinas Kecamatan (Bantuan)	2 UPT Kec	50	Disdik	200,000,000
					JUMLAH RENJA				33,093,550,000
					TENAGA KONTRAK				96,650,000
					BELANJA LANGSUNG				33,538,787,500
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				156,358,742,000
					JUMLAH				189,897,529,500
					DINAS PEKERJAAN UMUM				
					Program wajib SKPD			DPU	686,340,000
1	03	xx	15	07	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Rembang	Kab. Rembang	100	DPU	4,000,000,000
1	03	xx	15	08	Dana Safe Guarding		100	DPU	375,000,000
1	03	xx	15	09	Peningkatan Jembatan Kaligenting/HA 11 (DAK)	Sumber	100	DPU	885,000,000
1	03	xx	15	10	Pemeliharaan Jalan Bangunrejo - Rendeng (APBD)	Pamotan	100	DPU	400,000,000
1	03	xx	15	11	Peningkatan Jalan Japerejo - Banyuurip (Lapis Hotmix) (DAK)	Pamotan	100	DPU	3,570,000,000
1	03	xx	15	12	Peningkatan Jalan Pamotan - Trembes (Lapis Hotmix) (DAK)	Pamotan	100	DPU	2,207,000,000
1	03	xx	15	13	Peningkatan Jalan Kaliore - Wiroto (Lapis Hotmix) (APBD)	Kaliore	100	DPU	2,562,000,000
1	03	xx	15	14	Peningkatan Jalan Gunem - Trembes (Lapis Hotmix) (APBD)	Gunem	100	DPU	1,251,000,000
				15	Pembangunan Jalan Tembus RSU - Perum PNS (APBD)	Rembang	100	DPU	150,000,000
1	03	xx	30	29	Penataan Lingkungan PermukimanDesa Mojowarno Kec. Kaliore	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman		DPU	100,000,000
1	03	xx	30	30	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tungulsari Kec. Kaliore	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	31	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Dresi Wetan Kec. Kaliore	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	32	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pacar	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman		DPU	60,000,000
1	03	xx	30	33	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tasikagung	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	03	xx	30	36	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tireman	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tawang Sari Gg. II Ds. Leteh Kec. Rembang	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman			
1	03	xx	30	35	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Kabongan Lor	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	37	Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjungsari	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	38	Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Magersari	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	39	Pembangunan trotoar dan saluran jalan Tuban			DPU	250,000,000
1	03	xx	30	40	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Karangturi Gg. VII Kec. Lasem	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	100,000,000
1	03	xx	30	41	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jolotundo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	42	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Babagan Kecd. Lase	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	43	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jatisari Sluke	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	44	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Plawangan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	45	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Kebloran	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Sarang Meduro Kec. Sarang	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman		DPU	
1	03	xx	30	46	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Karang Anyar	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	48	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Sedan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	49	Pembangunan sarana air bersih desa sidomulyo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	50	Pembangunan Prasarana air Bersih Desa Karang asem Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	51	Pembangunan Prasarana air Bersih Desa Gesikan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	52	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Sidorejo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	53	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Karas	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	54	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Mrayun	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	55	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Jinanten Kec. Sale	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	56	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Ketangi	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	57	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Segoro Mulyo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	03	xx	30	58	Peningkatan jalan Desa Kepoh Agung Kec Pamotan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	59	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Mlawat Kec. Pamotan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	60	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pamotan Kec. Pamotan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	61	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Sendangagung Kec. Pamotan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	62	Penataan Lingkungan Permukiman Dk. Kendil Ds. Criwik Kec. Pancur	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Penataan Lingkungan Pemukiman Dk. Tiang Ds. Pancur Kec. Pancur			DPU	
1	03	xx	30	63	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Pohlandak	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	64	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Karaskepho Kec. Pancur	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Penataan Lingkungan Permukiman RT.1 / I Ds. Bonang			DPU	
1	03	xx	30	65	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tuyuhan Kec. Pancur	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	66	Penataan Lingkungan Permukiman Dk. Nyode Ds. Sumberagung Kec. Pancur	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Pembangunan Drainase dan trotoar depan SD Soditan sanap jembatan Patihan Kec. Lasem			DPU	
1	03	xx	30	67	Pembangunan Prasarana Air Bersih Ds. Suntri	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	68	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Dowan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	69	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Trembes	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	70	Penataan Lingkungan dan Permukiman Desa Tegaldowo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	80,000,000
1	03	xx	30	71	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Sulang	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	100,000,000
1	03	xx	30	72	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Glebeg Kec. Sulang	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	73	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Kerep	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
				74	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Tegalgede	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	75	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Logede Kec. Sumber	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	76	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Pelem sari	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	77	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Ronggomulyo Kec. Sumber	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	79,547,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	03	xx	30	78	Pembangunan Trotoar depan Kecamatan Sumber	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	100,000,000
1	03	xx	30	79	Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Jukung Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	80	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Mantingan Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	81	Penataan Lingkungan Permukiman Desa Ngulakan Kec Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	82	Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Bulu Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
					Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Bancang Kec. Sale				
1	03	xx	30	34	Pembangunan bak penampung air PNS Desa Tireman Rembang	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	100,000,000
					Pembangunan Drainase Ds. Meteseh Kec Kaliori				
1	03	xx	30	47	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Bajing Jowo	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	83	Penataan Lingkungan Permukiman Ds. Pasedan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	50,000,000
1	03	xx	30	84	Safe Guarding DAK 2007	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	225,000,000
1	03	xx	30	85	Pembangunan Prasarana Air Bersih Dk. Jombok Desa Besi Kec. Rembang	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	86	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Ngadem	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	87	Pembangunan Prasarana air Bersih Desa Sriombo Kec. Lasem	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000
1	03	xx	30	88	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Jurang Jero Kec. Sluke	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	300,000,000
1	03	xx	30	89	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Sendang Mulyo Kec. Kragan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	90	Pembangunan Prasarana air Bersih Desa Karang mangu Kec. Sarang	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000
1	03	xx	30	91	Pembangunan Prasarana air Bersih Desa Panohan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000
1	03	xx	30	92	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Kemadu Kec. Sulang (dari Pondok - MTs)	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000
1	03	xx	30	93	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Randuagung Kec. Sumber	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	94	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Pasedan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	317,000,000
1	03	xx	30	94	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Kadiwono	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	300,000,000
1	03	xx	30	96	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa cabean	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000
1	03	xx	30	97	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Lambangan Wetan	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	200,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Lambangan Kulon (MTs) Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	
1	03	xx	30	98	Pembangunan Prasarana Air Bersih Desa Warugunung Kec. Bulu	Tersedianya Prasarana Air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat		DPU	150,000,000
1	03	xx	30	99	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Banyudono	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	21,505,000
1	03	xx	30	100	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Tambak Agung	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	34,666,500
1	03	xx	30	101	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Pandean	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	13,258,300
1	03	xx	30	102	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Pasar Banggi	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	132,149,200
					Penataan lingkungan Pemukiman Desa Bonang	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	30,285,200
1	03	xx	30	104	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Binangun	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	186,945,200
1	03	xx	30	105	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Sluke	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	29,758,300
1	03	xx	30	106	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Langgar Kec. Seluke	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	114,830,900
1	03	xx	30	107	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Karang Lincak	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	25,389,000
1	03	xx	30	108	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Tanjung	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	172,783,900
1	03	xx	30	109	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Bajing Meduro	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	129,945,300
1	03	xx	30	110	Penataan lingkungan Pemukiman Desa Karangmangu	Terbangun dan meningkatnya sarpras pemukiman	100	DPU	177,233,200
					BOP NUSSPH. 2007		100	DPU	100,000,000
1	05	xx	15	17	Detail Desain Penataan Blok Prioritas Wajah Kota Rembang		100	DPU	200,000,000
1	05	xx	15	18	Detail Desain Pembangunan kompleks kantor Pemda Kab. Terbang terpadu		100	DPU	400,000,000
			16	12	Pembuatan Talut dan Reklamasi Rest Stop Area BBS Desa Binangun	Memadainya infrastruktur yang ada		DPU	1,100,000,000
2	03	xx	21	01	Pembangunan Embung Ronggomulyo	Ds Ronggo Mulyo	100	DPU	300,000,000
					Pembangunan embung Dk. Kedungwatu Ds. Kedungasem Kec. Sumber				
2	03	xx	21	02	Pembangunan Chekdam Krikilan	Ds Krikilan	100	DPU	300,000,000
2	03	xx	21	03	Pembangunan Embung dan Chekdam Mojorembun	Ds. Mojorembun	100	DPU	700,000,000
2	03	xx	21	04	Rehabilitasi Embung & Chekdam Ngadem	Ds. Ngadem	100	DPU	745,000,000
2	03	xx	22	01	FS & Basic Desain Check Dam Selogajah	Kragan	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	02	Penyelidikan Mekanika Tanah dan Geologi Teknik Embung Trenggulun	Pancur	100	DPU	175,000,000
2	03	xx	22	03	Penyusunan Desain Engineering dan Pengukuran Topografi Embung Trenggulun	Pancur	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	04	Penyelidikan Mekanika Tanah dan Geologi Teknik Embung Siwalan Sukun	Sedan	100	DPU	175,000,000
2	03	xx	22	05	Penyusunan Desain Engineering dan Pengukuran Topografi Embung Siwalan Sukun	Sedan	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	06	FS & Basic Desain Embung Bolodewo	Kab. Rembang	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	07	DE PPST Sungai Babagan kec. Lasem	Lasem	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	08	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Rutin)	Kab. Rembang	100	DPU	1,500,000,000
2	03	xx	22	09	Pemberdayaan Petani pemakai Air (P3A)	Kab. Rembang	100	DPU	20,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
2	03	xx	22	10	Water resources and irrigation Sector Management Program (WISMP)	Kab. Rembang	100	DPU	20,000,000
2	03	xx	22	11	Safe Guarding (Perencanaan dan pengawasan)	Kab. Rembang	100	DPU	325,000,000
2	03	xx	22	12	Pemeliharaan Embung Tambak agung	Kaliori	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	13	Rehabilitasi Jl. Kendalagung	Kragan	100	DPU	225,000,000
2	03	xx	22	14	Rehabilitasi Jl. Sembayan	Kaliori	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	15	Rehabilitasi Jl. Sumur Asin	Kaliori	100	DPU	440,000,000
2	03	xx	22	16	Rehabilitasi Jl. Banyu Urip	Pancur	100	DPU	280,000,000
2	03	xx	22	17	Rehabilitasi Jl. Serundan	Pancur	100	DPU	280,000,000
2	03	xx	22	18	Rehabilitasi Jl. Sendangcoyo	Pancur	100	DPU	330,000,000
2	03	xx	22	19	Rehabilitasi Jl Penewen	Sale	100	DPU	200,000,000
2	03	xx	22	20	Rehabilitasi Jl. Gebang	Sluke	100	DPU	165,000,000
2	03	xx	22	21	Rehabilitasi Jl. Ngelo	Sedan	100	DPU	165,000,000
2	03	xx	22	22	Rehabilitasi Jl. Rondan Gandeng	Sarang	100	DPU	220,000,000
2	03	xx	22	23	Rehabilitasi Jl. Kedung Semar	Bulu	100	DPU	275,000,000
2	03	xx	22	24	Rehabilitasi Jl. Ungkal	Bulu	100	DPU	220,000,000
2	03	xx	22	25	Rehabilitasi Jl. Giyok	Kragan	100	DPU	365,000,000
2	03	xx	22	26	Rehabilitasi Jl. Sikijing	Kragan	100	DPU	225,000,000
2	03	xx	22	27	Perbaikan Embung Kaliombo	Sulang	100	DPU	100,000,000
2	03	xx	22	28	Perbaikan Embung Jatimudo	Sulang	100	DPU	300,000,000
2	03	xx	22	29	Perbaikan Embung Rowosetro	Rembang	100	DPU	300,000,000
					JUMLAH RENJA				34,820,297,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				405,370,000
					BELANJA LANGSUNG				35,912,007,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,551,980,000
					JUMLAH				39,463,987,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				
					Program wajib SKPD			KKP	1,350,888,000
1	03	xx	18	06	Pemeliharaan Trotoar	Terpeliharanya trotoar	100	KKP	400,000,000
1	03	xx	27	10	Pemeliharaan selokan	Terpeliharanya selokan, air menjadi lancar	20	KKP	300,000,000
1	03	xx	27	10	Rehabilitasi selokan Bonang	Terpeliharanya selokan, air menjadi lancar	100	KKP	400,000,000
1	04	xx	19	09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya kelengkapan peralatan Damkar	60	KKP	100,000,000
1	04	xx	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (dan pemeliharaan)	Meningkatnya kenyamanan pengguna jasa makam	100	KKP	100,000,000
1	08	xx	15	13	Pemeliharaan K3	Kebersihan pada daerah - daerah yang terlayani	100	KKP	400,000,000
1	08	xx	15	14	Pengembangan / peningkatan K3	Perluasan daerah -daerah layanan kebersihan	100	KKP	200,000,000
1	08	xx	15	15	Penataan TPA Pancur	Meningkatnya kegiatan operasional	100	KKP	200,000,000
1	08	xx	15	16	Penataan TPA Sedan	Meningkatnya kegiatan operasional	100	KKP	200,000,000
1	08	xx	15	17	Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kemampuan pengelola sampah	100	KKP	10,000,000
1	08	xx	15	18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang K 3	100	KKP	12,000,000
1	08	xx	24	06	Pemeliharaan RTH (Jalur hijau dan taman)	Terciptanya keindahan dan kenyamanan kota	100	KKP	350,000,000
2	08	xx	25	01	Pemeliharaan LPJU	Tertata dan terpeliharanya LPJU	100	KKP	250,000,000
3	08	xx	25	02	Penataan / Pengadaan LPJU	mendorong terciptanya Kamtibmas terutama pada malam hari	60	KKP	100,000,000
1	08	xx	26	01	Pembangunan garasi mobil	Tersedianya garasi untuk 16 mobil	60	KKP	180,000,000
					JUMLAH RENJA				3,202,000,000
					TENAGA KONTRAK				863,126,000
					BELANJA LANGSUNG				5,416,014,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				806,450,000
					JUMLAH				6,222,464,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					DINAS PERHUBUNGAN				
					Program wajib SKPD				518,983,000
1	07	xx	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan	100	Dishub	21,742,000
1	07	xx	15	09	Survey Lalu Lintas Harian rata-rata (LHR)	Peningkatan fungsi jaringan jalan	100	Dishub	40,000,000
1	07	xx	15	10	Penyusunan Data Transportasi Dalam Angka	Data jalan, terminal, jaringan, trayek, data kendaraan dll	100	Dishub	40,000,000
1	07	xx	15	11	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perparkiran	Terwujudnya kepuasan pelayanan parkir bagi masyarakat	100	Dishub	20,000,000
1	07	xx	15	12	Penyusunan DED Pelabuhan Tanjungbendo		100	Dishub	500,000,000
1	07	xx	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal tipe C Rembang dan Pamotan	Terwujudnya pelayanan jasa transportasi	100	Dishub	75,000,000
1	07	xx	16	05	Rehabilitasi / pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	Peningkatan keselamatan lalu lintas	100	Dishub	90,000,000
				06	Rehabilitasi / pemeliharaan Alat Komunikasi	Terwujudnya alat komunikasi yang handal	100	Dishub	25,000,000
1	07	xx	17	18	Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum	Terlaksananya evaluasi pelayanan angkutan umum	100	Dishub	35,000,000
1	07	xx	18	04	Pengadaan tanah dan pembangunan gedung terminal tipe C Sedan, Sale, Gunem dan Sulang dirubah untuk Sedan dan Sale	Peningkatan pelayanan jasa transportasi	100	Dishub	1,000,000,000
1	07	xx	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Peningkatan keselamatan lalu lintas	100	Dishub	100,000,000
1	07	xx	19	02	Pengadaan marka jalan	Meningkatkan ketertiban lalu lintas	100	Dishub	85,000,000
1	07	xx	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Peningkatan keselamatan lalu lintas	100	Dishub	233,100,000
1	07	xx	21	01	Pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan	Terwujudnya kenyamanan, keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan	100	Dishub	75,000,000
1	07	xx	21	02	Pengawasan Angkutan lebaran / Syawalan	Terwujudnya kenyamanan, keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan selama angkutan lebaran	100	Dishub	30,000,000
2	08	xx	22	01	Peningkatan Keamanan ketertiban laut ? Patroli	terjaganya keadaan yang aman dan selamat	100	Dishub	94,000,000
3	09	xx	22	02	Peningkatan keselamatan pelayaran	Terwujudnya keselamatan pelayaran	100	Dishub	86,000,000
4	10	xx	22	03	Peningkatan Pelayanan STKK	Peningkatan pelayanan STKK	100	Dishub	20,000,000
5	11	xx	22	04	Operasional Kamlah	Dapat memberikan bantuan dengan cepat sewaktu-waktu terjadi masalah di laut	100	Dishub	115,000,000
					JUMLAH RENJA				2,684,842,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				228,745,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				3,432,570,000
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,706,600,000
					JUMLAH				5,139,170,000
					CATATAN SIPIL				
					Program wajib SKPD				94,605,400
1	10	xx	15	15	Peningkatan pelayanan Akta Catatan Sipil	Tercapinya pelayanan akta 45.000 lb	100	Capil & Kependudukan	300,000,000
1	10	xx	15	16	Pembuatan KTP/KK Swakelola	KTP 60.000 lb; KK 70.000 lb	90	Capil & Kependudukan	398,777,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
1	10	xx	15	17	Pengadaan buku laporan kependudukan	Tercapainya tertib administrasi kependudukan 1000 buku	100	Capil & Kependudukan	20,000,000
1	10	xx	15	18	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pembuatan KTP dan KK Nasional	100	Capil & Kependudukan	1,136,223,000
					JUMLAH RENJA				1,855,000,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				29,742,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				1,979,347,400
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				507,960,000
					JUMLAH				2,487,307,400
					PARIWISATA				
					Program wajib di SKPD (14 program)	Disparsenibud			137,422,800
1	17	xx	15	06	Pelaksanaan Syawalan	Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD	25	Diparsenibud	50,000,000
1	17	xx	15	07	Gelar Seni dan Budaya Kab. Rembang tahun 2007	Kelompok seniman	100	Diparsenibud	40,000,000
1	17	xx	15	08	Festival Thong - thong Lek	Group kesenian	100	Diparsenibud	40,000,000
1	17	xx	16	07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah (Kegiatan Kartinian di lokasi Makam RA. Kartini	Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD	25	Diparsenibud	8,500,000
1	17	xx	17	08	Pembinaan organisasi kesenian	Peningkatan SDM kelompok seni	100	Diparsenibud	35,000,000
1	17	xx	17	09	Pentas kesenian di Puri Maerokoco dan PRPP	Peningkatan SDM kelompok seni	100	Diparsenibud	30,000,000
1	17	xx	17	10	Pentas kesenian di TMII	Peningkatan SDM kelompok seni	100	Diparsenibud	50,000,000
1	17	xx	17	11	Pentas kesenian di lokasi TRP Kartini	Peningkatan SDM kelompok seni	100	Diparsenibud	40,000,000
2	04	xx	15	09	Pengadaan brosur dan pemasangan iklan kepariwisataan	Investor	100	Diparsenibud	40,000,000
2	04	xx	15	10	Pameran Joglosemar, DKI Jakarta dan Bali	Investor	100	Diparsenibud	170,000,000
2	04	xx	15	11	Karnaval Mobil hias tingkat jateng	Investor	100	Diparsenibud	30,000,000
2	04	xx	15	12	Sepeda wisata start Finish di TRP Kartini	Investor	100	Diparsenibud	25,000,000
2	04	xx	15	13	Pemilihan Duta Wisata	Peningkatan SDM generasi muda	100	Diparsenibud	40,000,000
2	04	xx	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (Pengadaan sarana fasilitas Perpustakaan Umum / TIC)	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	50,000,000
2	04	xx	16	08	Rehab pos Satpam dan pagar TRP Kartini	Peningkatan keamanan dan kenyamanan	100	Diparsenibud	50,000,000
2	04	xx	16	09	Pengelolaan kolam renang dan pengadaan kanopi	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	165,000,000
2	04	xx	16	10	Pengelolaan TRP Kartini	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	250,000,000
2	04	xx	16	11	Pembangunan rumah jangkar dan jalan penyebrangan	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	100,000,000
2	04	xx	16	12	Pemeliharaan talud TRP Kartini	Peningkatan keamanan dan kenyamanan	100	Diparsenibud	20,000,000
2	04	xx	16	13	Pembangunan gasebo di TRP Kartini	Peningkatan keamanan dan kenyamanan	100	Diparsenibud	19,815,000
2	04	xx	16	14	Pemeliharaan Museum dan sanggar budaya	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	40,000,000
2	04	xx	16	15	Pemeliharaan anjungan di Puri Maerokoco	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	45,000,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
2	04	xx	16	16	Penataan Areal Makam Pasujudan/PetilasanSunan Bonang	Peningkatan pengunjung/pendapatan	25	Diparsenibud	25,000,000
2	04	xx	16	17	Pembuatan gazebo di jalan ke Makam RA. Kartini	Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD	25	Diparsenibud	100,000,000
2	04	xx	16	18	Pembangunan area parkir dan penataan kios di makam RA. Kartini	Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD	25	Diparsenibud	100,000,000
2	04	xx	17	01	Pengembangan dan penguatan,informasi dan database (Pembuatan profil Pariwisata dan Seni Budaya Kab. Rembang)	Peningkatan investasi di bid. Pariwisata	25	Diparsenibud	50,000,000
2	04		17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pembinaan Usaha sarana wisata)	Peningkatan SDM dan peran usaha wisata	100	Diparsenibud	30,000,000
2	04	xx	17	10	Penyuluhan masyarakat sadar wisata	Peningkatan masyarakat sadar wisata	100	Diparsenibud	46,500,000
				11	Pembinaan Saka Pandu Wisata	Peningkatan peran Saka Pandu sebagai Pok. Darwis	100	Diparsenibud	15,000,000
				12	Pembentukan dan Pembinaan Desa Wisata	Peningkatan produk dan SDM pariwisata	100	Diparsenibud	20,000,000
2	04	xx	18	01	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan kinerja	25	Diparsenibud	95,000,000
					JUMLAH RENJA				1,819,815,000
					TENAGA KONTRAK				263,899,000
					BELANJA LANGSUNG				2,221,136,800
					BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,101,775,000
					JUMLAH				3,322,911,800
					PUSKESMAS REMBANG I				
					ADMINISTRASI KANTOR				450,862,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				44,263,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				495,125,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
					JUMLAH				495,125,000
					PUSKESMAS REMBANG II				
					ADMINISTRASI KANTOR				233,603,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				14,438,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				248,041,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
					JUMLAH				248,041,000
					PUSKESMAS KALIORI				

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				ADMINISTRASI KANTOR				189,594,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				14,108,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				203,702,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				203,702,000
				PUSKESMAS SULANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				261,086,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				43,148,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				304,234,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				304,234,000
				PUSKESMAS SUMBER				
				ADMINISTRASI KANTOR				287,578,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				38,528,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				326,106,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				326,106,000
				PUSKESMAS BULU				
				ADMINISTRASI KANTOR				193,152,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				19,802,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				212,954,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				212,954,000
				PUSKESMAS LASEM				

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				ADMINISTRASI KANTOR				480,940,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				85,400,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				566,340,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				566,340,000
				PUSKESMAS PANCUR				
				ADMINISTRASI KANTOR				229,001,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				33,877,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				262,878,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				262,878,000
				PUSKESMAS SLUKE				
				ADMINISTRASI KANTOR				306,254,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				60,438,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				366,692,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				366,692,000
				PUSKESMAS PAMOTAN				
				ADMINISTRASI KANTOR				408,642,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				44,819,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				453,461,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				453,461,000
				PUSKESMAS GUNEM				
				ADMINISTRASI KANTOR				159,760,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				HONOR TENAGA KONTRAK				23,227,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				182,987,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				182,987,000
				PUSKESMAS SALE				
				ADMINISTRASI KANTOR				334,536,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				62,442,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				396,978,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				396,978,000
				PUSKESMAS KRAGAN I				
				ADMINISTRASI KANTOR				267,493,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				61,390,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				328,883,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				328,883,000
				PUSKESMAS KRAGAN II				
				ADMINISTRASI KANTOR				475,235,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				60,917,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				536,152,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				536,152,000
				PUSKESMAS SEDAN				
				ADMINISTRASI KANTOR				362,860,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				38,858,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				401,718,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				401,718,000
				PUSKESMAS SARANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				421,586,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				46,428,000
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				468,014,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				468,014,000
				SKB				
				ADMINISTRASI KANTOR				45,858,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				45,858,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				45,858,000
				TK NEGERI REMBANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				18,130,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				18,130,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				18,130,000
				SMA 1 REMBANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				103,757,500
				HONOR TENAGA KONTRAK				-

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				103,757,500
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				103,757,500
				SMA 2 REMBANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				130,666,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				130,666,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				130,666,000
				SMA 3 REMBANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				101,588,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				101,588,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				101,588,000
				SMA 1 SULANG				
				ADMINISTRASI KANTOR				54,123,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				54,123,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				54,123,000
				SMA 1 SUMBER				
				ADMINISTRASI KANTOR				28,678,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				28,678,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				28,678,000
				SMA 1 LASEM				
				ADMINISTRASI KANTOR				230,668,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				230,668,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				230,668,000
				SMA 1 PAMOTAN				
				ADMINISTRASI KANTOR				68,329,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				68,329,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				68,329,000
				SMA 1 SALE				
				ADMINISTRASI KANTOR				65,559,800
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				65,559,800
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
				JUMLAH				65,559,800
				SMA 1 KRAGAN				
				ADMINISTRASI KANTOR				98,840,000
				HONOR TENAGA KONTRAK				-
				JUMLAH BELANJA LANGSUNG				98,840,000
				JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					JUMLAH				98,840,000
					SMK 1 REMBANG				
					ADMINISTRASI KANTOR				260,189,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				260,189,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
					JUMLAH				260,189,000
					SMK 1 SEDAN				
					ADMINISTRASI KANTOR				93,993,300
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				93,993,300
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				-
					JUMLAH				93,993,300
					KEC. REMBANG				
					ADMINISTRASI KANTOR				112,316,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				40,612,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				152,928,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,586,425,000
					JUMLAH				1,739,353,000
					KEC. SULANG				
					ADMINISTRASI KANTOR				109,940,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				19,140,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				129,080,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,539,280,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					JUMLAH				1,668,360,000
					KEC. LASEM				
					ADMINISTRASI KANTOR				108,604,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				8,910,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				117,514,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,237,350,000
					JUMLAH				1,354,864,000
					KEC. PAMOTAN				
					ADMINISTRASI KANTOR				109,102,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				4,620,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				113,722,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,525,760,000
					JUMLAH				1,639,482,000
					KEC. KRAGAN				
					ADMINISTRASI KANTOR				110,624,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				24,750,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				135,374,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,365,960,000
					JUMLAH				1,501,334,000
					KEC. KALIORI				
					ADMINISTRASI KANTOR				111,109,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				111,109,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,880,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					JUMLAH				113,989,000
					KEC. SUMBER				
					ADMINISTRASI KANTOR				109,537,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				13,530,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				123,067,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,240,000
					JUMLAH				126,307,000
					KEC. BULU				
					ADMINISTRASI KANTOR				107,532,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				107,532,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,160,000
					JUMLAH				109,692,000
					KEC. SLUKE				
					ADMINISTRASI KANTOR				108,616,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				108,616,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,680,000
					JUMLAH				110,296,000
					KEC. SARANG				
					ADMINISTRASI KANTOR				109,151,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				109,151,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,880,000

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
					JUMLAH				112,031,000
					KEC. SEDAN				
					ADMINISTRASI KANTOR				107,678,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				5,940,000
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				113,618,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				3,240,000
					JUMLAH				116,858,000
					KEC. SALE				
					ADMINISTRASI KANTOR				108,557,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				108,557,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,560,000
					JUMLAH				110,117,000
					KEC. PANCUR				
					ADMINISTRASI KANTOR				108,390,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				108,390,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,880,000
					JUMLAH				111,270,000
					KEC. GUNEM				
					ADMINISTRASI KANTOR				109,228,000
					HONOR TENAGA KONTRAK				-
					JUMLAH BELANJA LANGSUNG				109,228,000
					JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG				1,860,000

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF
				JUMLAH				111,088,000